

Interaksi Sosial Masyarakat Kelurahan Manembo Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung

Oleh

Taufan Eka Putra¹

Markus Kaunang²

Elfie Mingkid³

E-mail : ekaputra@yahoo.co.id

Abstract

The interaction between man and man became a necessity to make ends meet. This study was conducted to determine and analyze the social interaction that occurs in the community in the Village of Central District of Matuari Manembo Nembo Bitung as a scientific development, especially the development of power cracked management science in the study of resource management.

This study used a qualitative method with the main data comes from interviews with informants is a representation of the village government, environmental coconut, minahasa ethnic communities, ethnic communities Sangihe, Javanese ethnic communities and ethnic communities Gorontalo and other supporting data obtained through direct observation and the use of related documents . The conclusion of this study is the social interaction that occurs in communities in Sub-nembo Manembo Middle District of Matuari Bitung relating to cooperation seen in everyday life, birth, marriage and kinship systems.

Keywords: Social Interaction, Community, Kinship.

PENDAHULUAN

Perubahan dalam konteks interaksi dengan masyarakat yang lebih maju melahirkan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai manifestasi dari teori modernisasi yang memandang bahwa keterbelakangan adalah akibat dari keterlambatan negara-negara terbelakang melakukan modernisasi dirinyakhususnya dalam pengenalan nilai-nilai modern, pemberian modal, pendidikan dan transfer teknologi. Kondisi yang demikianpun terjadi pada masyarakat kota maupun masyarakat desa.

Sebagai pintu gerbang jalur laut di Provinsi Sulawesi Utara dengan berbagai aktivitas perdagangan pendidikan serta keberadaan sumber daya alam yang memadai, Kota Bitung menjadi incaran banyak masyarakat untuk

¹ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

² Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

³ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

mengadukan nasibnya. Kondisi demikian membawa akibat pada perkembangan penduduk baik dalam hal pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan hidup sampai dengan keamanan dan kedamaian hidup dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan Kota Bitung ini secara langsung terjadi juga di Kelurahan Manemboh Nembo Tengah. Kelurahan Manemboh Nembo Tengah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Kota Bitung dan berada di wilayah kecamatan Matuari yang terbagi dalam 4 (empat) lingkungan dan 17 (tujuh belas) rukun tetangga didiami oleh 4.124 jiwa yang terdiri dari 2.042 laki – laki dan 2.079 penduduk dengan 1.090 kelapa keluarga.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan, kondisi social ekonomi masyarakat Kelurahan Manemboh Nembo Tengah dengan populasi penduduk yang didominasi oleh nelayan, petani, buruh bangunan, wiraswasta, pegawai negeri sipil dan ibu rumah tangga. Fenomena permasalahan kurangnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat juga kurang hal ini diikuti juga dengan kurangnya lapangan kerja serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Situasi yang demikian menjadikan salah satu sumber penyebab tingkat kemiskinan masyarakat.

Beragamnya kondisi masyarakat ini membawa pada perkembangan kehidupan social masyarakat yang berada di 4 lingkungan dengan 4.124 jiwa. Masyarakat Kelurahan Manemboh Nembo Tengah sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan manusia lain dalam sebuah pergaulan mengakibatkan tidak dapat hidup dalam sebuah isolasi yang absolut dan permanen. Interaksi antara manusia dengan manusia lainnya menjadi suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi demikian menjadikan masyarakat Kelurahan Manemboh Nembo Tengah diperhadapkan pada situasi interaksi untuk kerjasama, persaingan, pertikaian dan akomodasi.

Kerjasama antar masyarakat baik secara individu maupun kelompok merupakan suatu kajian yang menarik untuk dipahami mengingat lingkungan hidup masyarakat Kelurahan Manemboh Nembo Tengah yang adalah masyarakat kota akan tetapi kehidupan desa masih kental terlihat dan dijalani, memiliki multi etnis (Minahasa, Sangihe, Ternate, Gorontalo, Bolaang Mongondow dan Jawa).

Dalam kehidupannyapun, masyarakat Kelurahan Manembo Nembo Tengah banyak diperhadapkan pada persangan usaha untuk mempertahankan kehidupannya, adanya penyakit masyarakat yang disebabkan oleh kehidupan anak – anak muda yang sering bertikai maupun upaya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang membagi wilayah pemukiman masyarakat Kelurahan Manembo Nembo Tengah menjadi dua bagian yaitu kompleks perumahan dan kompleks masyarakat awal. Menyikapi berbagai fenomena permasalahan yang berhubungan dengan interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Manembo Nembo Tengah sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kota Bitung dalam upaya menganalisis kondisi sosial kehidupan masyarakat pada interaksi sosial masyarakat dalam kerjasama, persaingan, pertikaian dan akomodasi sebagai bagian dari kajian interaksi sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Interaksi antara manusia dengan manusia lainnya menjadi suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia memerlukan tata aturan dalam bertingkah laku dengan sesamanya. Tata aturan ini diperlukan agar manusia dapat hidup dalam suasana harmonis. Norma dapat dipandang sebagai suatu standar atau skala yang terdiri dari berbagai kategori perilaku yang berisikan suatu keharusan dan larangan. Konsepsi norma seperti ini menyebabkan perilaku selalu bersandar kepada norma. Norma susila dan sopan santun memberi pertanda bahwa hubungan antara manusia didasarkan pada suatu pola yang dipahami bersama.

Interaksi sosial merupakan penggerak dari sebuah pembangunan yang menurut Rummel dalam Nasikun (1985) *“the acts, actions, or practices of two or more people mutually oriented towards each other's selves, that is, any behavior that tries to affect or take account of each other's subjective experiences or intentions. Social interaction is not defined by type of physical relation or behavior, or by physical distance. It is a matter of a mutual subjective orientation towards each other. Thus even when no physical behavior is involved, as with two*

rivals deliberately ignoring each other's professional work, there is social interaction.

Menurut pendapat di atas interaksi sosial yang baik terjadi antara subjek dan objek pembangunan yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antar sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain baik itu dalam hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar individu dan kelompok. Hubungan antar manusia atau relasi-relasi sosial ini di dasarkan kepada komunikasi. Karenanya Komunikasi merupakan dasar dari existensi suatu masyarakat. Hubungan antar manusia atau relasi-relasi sosial, hubungan satu dengan yang lain warga-warga suatu masyarakat, baik dalam bentuk individu atau perorangan maupun dengan kelompok-kelompok dan antar kelompok manusia itu sendiri, Mewujudkan segi dinamikanya perubahan dan perkembangan masyarakat. Apabila kita lihat komunikasi ataupun hubungan tersebut sebelum mempunyai bentuk-bentuk yang konkrit, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial di dalam suatu masyarakat, ia mengalami suatu proses terlebih dahulu. Proses-proses inilah yang dimaksudkan dan disebut sebagai proses sosial.

Bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial, dan karena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi, maka interaksi sosial yang dapat dinamakan proses sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Bentuk interaksi sosial menurut Soemardjan dan Soemardi (1971) dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu : (1) kerjasama (*cooperation*); (2) persaingan (*competition*); (3) pertikaian (*conflict*); dan (4) akomodasi (*accommodation*). Menurut Simmel (1986:39-42) ada tiga hal utama dalam interaksi sosial, yaitu Proses social, Tipe-tipe social dan Pola-pola perkembangan.

Sementara itu ada dua syarat yang harus di penuhi agar suatu interaksi sosial itu mungkin terjadi menurut Gillin dan Gillin (1954:489), yaitu adanya kontak social dan adanya komunikasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Nasution, 1988) dengan data utama bersumber dari wawancara kepada 10 orang informan yang merupakan representasi dari pemerintah kelurahan, kelapa lingkungan, masyarakat etnis minahasa, masyarakat etnis sangihe, masyarakat etnis jawa dan masyarakat etnis gorontalo dan data pendukung lainnya diperoleh melalui pengamatan langsung dan penggunaan dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan mengadopsi konsep analisis yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, (1992) yaitu kategorisasi dan mereduksi data, pengelompokan data, melakukan interpretasi, menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan yang didasarkan pada kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 4 (empat) lingkungan dan 17 RT memiliki luas wilayah 45,5 Hektar dengan jumlah penduduk 4.124 jiwa dan 1.090 KK, dengan penduduk miskin yang tercatat di kelurahan sebanyak 1.298 jiwa, 328 KK. Kelurahan Manembo-nembo Tengah dihuni oleh penduduk yang mempunyai profesi yang berbeda-beda bahkan ada yang berprofesi ganda baik sebagai petani dan buruh bangunan. Secara umum profesi yang dijalani oleh masyarakat adalah, nelayan, petani, buruh bangunan, wiraswata sebagian juga berprofesi sebagai abdi negara selaku Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan Manembo-nembo Tengah memiliki peruntukan lahan (berdasarkan RTRW Kota Bitung Tahun 2013) sebagai potensi kelurahan antara lain permukiman, perkantoran, lapangan, dan ruang terbuka hijau.

Secara umum profesi yang dijalani oleh masyarakat Kelurahan Manembo-nembo Tengah adalah nelayan, petani, buruh bangunan, wiraswata

sebagian juga berprofesi sebagai abdi negara selaku Pegawai Negeri Sipil, dan Ibu Rumah Tangga (IRT). Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dan upaya untuk mendapatkan pekerjaan banyak berkaitan dengan kurangnya tingkat pendidikan/ ketrampilan yang dimiliki masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Berdasarkan kondisi objek penelitian maka penelitian ini hanya difokuskan pada kerjasama yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah. Manusia demi untuk menjaga keberlangsungan hidupnya mengadakan kejasama dengan sesama manusia. Dari segi kemasyarakatan menunjukkan bahwa keberlangsungan masyarakat untuk bertahan hidup mengandung nilai – nilai kebersamaan, senasip sepenanggungan dan solidaritas yang mempererat masyarakat dalam berkelompok.

Kerjasama yang merupakan focus penelitian dalam memahami interaksi social pada masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kelahiran, perkawinan dan sistem kekerabatan. Kehidupan sehari-hari, kelahiran, perkawinan dan sistem kekerabatan diamati dan diwawancarai kepada informan khususnya masyarakat etnis Minahasa, Sangihe, Jawa dan Gorontalo.

Pola kehidupan masyarakat etnis Minahasa, Sangihe, Jawa dan Gorontalo di Kelurahan Manembo-nembo Tengah mencakup kegiatan yang dilakukan mereka sehari-hari dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya. Pola hidup masyarakat berdasarkan etnis merupakan cerminan dari adanya kelompok sosial dalam masyarakat.

Aktivitas yang dijalani oleh masyarakat Kelurahan Manembo-nembo Tengah dari pola kehidupan ekonomi mereka adalah nelayan, petani, buruh bangunan, wiraswata sebagian juga berprofesi sebagai abdi negara selaku Pegawai Negeri Sipil, dan Ibu Rumah Tangga (IRT). Dalam kaitannya dengan penduduk berdasarkan etnis, masyarakat etnis Minahasa lebih banyak berprofesi sebagai pegawai negeri, pedagang dan tukang, masyarakat etnis Sangihe banyak berprofesi sebagai tukang/buru bangunan, nelayan dan tukang ojek, Jawa banyak berprofesi sebagai pedagang asongan, pedagang sembako, tukang ojek dan etnis

Gorontalo lebih banyak perprofesi sebagai pedagang, tukang ojek dan buru bangunan.

Pada situasi yang demikian dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan interaksi masyarakat lebih kepada interaksi sosial individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Interaksi sosial sebagai bentuk umum dari proses sosial dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari mulai dari mempersiapkan diri dan keluarga untuk menjalankan aktivitas di hari yang bersangkutan terjadi dan berjalan dalam sebuah wadah seperti kelompok keluarga dan kelompok profesi pekerjaan.

Pola interaksi sosial masyarakat ini lebih didasarkan pada kebutuhan hidup manusia yang adalah mahluk sosial yang berkeinginan untuk dapat melangsungkan kehidupannya dengan mendapatkan kepuasan baik secara lahiria maupun batinia. Upaya mendapatkan kepuasan dalam hubungan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya manusia mempertahankan kehidupannya.

Interaksi sosial melalui kehidupan sehari-hari pada masyarakat sekalipun jika didasarkan pada etnis kelompok masyarakat berbeda pola perilakunya setiap hari, akan tetapi dengan adanya kebutuhan, pekerjaan yang dijalankan serta lamanya menetap menjadikan baik antar etnis maupun sesama etnis pada masyarakat Kelurahan Manembo-nembo Tengah dapat berjalan dengan didasarkan pada komunikasi yang terjadi. Sehingga nyata terlihat bahwa konsep bentuk interaksi sosial melalui kerjasama pada kehidupan sehari hari bagi masyarakat Kelurahan Manembo-nembo Tengah tercipta melalui hubungan sosial yang dinamis sebagai upaya pemenuhan kebutuhan.

Interaksi sosial pada peristiwa kelahiran anak di Kelurahan Manembo-nembo Tengah baik masyarakat etnis Minahasa, Sangehe, Jawa dan Gorontalo tidak jauh berbeda. Hal ini lebih disebabkan karena keberadaan masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah telah diwarnai dengan kehidupan masyarakat kota yang moderen. Pada peristiwa kelahiran biasanya terjadi di Rumah Sakit dengan dibantu oleh tenaga medis.

Peristiwa kelahiran sehubungan dengan interaksi sosial bagi masyarakat Kelurahan Manembo-nemboh Tengah lebih diwarnai oleh kondisi lingkungan kekerabatan melalui kelompok agama, kerukunan dan keluarga. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat etnis Minahasa dan Sangihe yang sebagian besar memeluk agama nasrana, pada saat ada peristiwa kelahiran sering dilakukan kunjungan pelayanan doa. Hal itu juga terjadi pada masyarakat etnis Jawa dan Gorontalo yang didasarkan pada keyakinan agama. Dari kenyataan dilapangan terlihat bahwa Interaksi sosial tidak saja berkorelasi dengan norma sosial secara searah, tetapi melalui interaksi sosial itu pula norma-norma sosial mewujud. Nilai-nilai merupakan ukuran terhadap sesuatu yang baik atau buruk, sesuatu yang pantas atau tidak pantas dilakukan. Kebiasaan yang dianggap pantas untuk dipertahan dan dilakukan dalam masyarakat dipertahankan oleh kelompok masyarakat untuk terus dilakukan.

Interaksi sosial dengan cara mengunjungi keluarga yang baru saja ketambahan satu anggota keluarga melalui proses kelahiran merupakan interaksi sosial yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan juga terjadi di Kelurahan Manembo-nemboh Tengah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Peristiwa perkawinan yang menggambarkan interaksi sosial masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah lebih nampak pada kebiasaan membuat acara dengan mengundang anggota masyarakat yang lain. Data penelitian menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan pada masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah dimana masyarakat yang diundang biasanya keluarga dekat, tetangga dan sesama profesi. Etnis dan agama tidak menjadi ukuran

masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah berinteraksi sehubungan dengan kebiasaan mengundang.

Pada peristiwa perkawinan dalam gambaran interaksi sosial dimana tidak ada perbedaan yang berarti dan dianggap sangat krusial lagi. Sebab telah ada perkawinan antar etnis seperti masyarakat Minahasa dengan Sangehe, Jawa dengan Gorontalo, Jawa dengan Minahasa, Sangehe dengan Gorontalo dan sebaliknya. Melalui peristiwa – peristiwa yang demikian menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam perkawinan bagi masyarakat Kelurahan Manembo-nembo Tengah telah berjalan dengan baik.

Sistem kekerabatan merupakan sesuatu yang universal dalam proses pembentukan kelompok sosial di setiap masyarakat. Sistem ini pada dasarnya mengatur pola kemampuan dan dinamika kehidupan berdasarkan prinsip keturunan dan perkawinan. Sistem kekerabatan mengelompokkan masyarakat ke dalam sebuah referensi atau kerangka acuan dalam menentukan dengan siapa ego dapat berhubungan dan bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. Kelompok kekerabatan tampak pada kehidupan bermasyarakat. Prinsip kekerabatan masyarakat Kelurahan Manembo-nembo Tengah menjalin bentuk kerjasama, yaitu kecenderungan untuk hidup mengelompok yang berlaku pada bidang ekonomi dan tolong menolong.

Kekerabatan sebagai sebuah pengikat untuk hidup rukun. Dalam kehidupan kekerabatan sebagaimana yang dikemukakan oleh informan unsur pemerintah bahwa telah membudaya dalam lingkungan masyarakat bahwa tetangga adalah keluarga yang terdekat. Hal ini diupayakan untuk terus dilakukan guna menjaga keamanan, membangun kebersamaan dalam lingkungan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan masyarakat menunjukkan bahwa sekalipun Kelurahan Manembo-nembo Tengah adalah bagian dari Kota Bitung yang dalam aktivitas menunjukkan kondisi masyarakat kota, akan tetapi kekerabatan masih sangat kental dimiliki oleh masyarakat. Kekerabatan ini baik dari keturunan keluarga, tetangga, etnis maupun profesi.

Etnis masyarakat Minahasa, Sangehe, Jawa dan Gorontalo yang ada di Kelurahan Manembo-nembo Tengah dalam interaksi sosial melalui aspek kekerabatan merupakan kekuatan positif yang dimiliki dalam menjaga hubungan sosial yang dinamis. Kontak dan hubungan timbal balik dari individu dan kelompok sebagai deskripsi dari interaksi sosial tercermin dari kekerabatan dalam masyarakat Kelurahan Manembo-nembo Tengah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung berkaitan dengan kerjasama terlihat pada kehidupan sehari-hari, kelahiran, perkawinan dan sistem kekerabatan. Kehidupan sehari – hari lebih didasarkan pada upaya memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadikan interaksi sosial berjalan dengan baik yang terbentuk melalui profesi pekerjaan. Melalui pola hidup sehari – hari terlihat perbedaan yang menonjol pada interaksi sosial masyarakat etnis Minahasa yang menekankan gaya hidup, sementara masyarakat etnis Jawa dan Gorontalo lebih mementingkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Peristiwa kelahiran sehubungan dengan interaksi sosial bagi masyarakat Kelurahan Manembo-nembo Tengah lebih diwarnai oleh kondisi lingkungan kekerabatan melalui kelompok agama, kerukunan marga dan keluarga. Kemampuan masyarakat mempertahankan interaksi sosial pada peristiwa kelahiran sebagai bentuk empati persamaan moral, kolektif yang sama, dan kepercayaan yang dianut serta di perkuat oleh pengalaman emosional. Peristiwa perkawinan terjadi dalam bentuk saling mengundang, saling membantu dan telah terjadi perkawinan yang berbeda etnis menunjukkan interaksi sosial masyarakat melalui kontak sosial dan komunikasi. Sistem kekerabatan masyarakat terbentuk melalui struktur sosial, sikap dan cara pandang masyarakat terhadap hubungan sosial yang terjadi antar individu, antar kelompok ataupun individu dengan kelompok.

Dari simpulan yang ada, maka penelitian ini menyarankan Pemerintah Kelurahan maupun Kota Bitung perlu menjamin terciptanya interaksi sosial masyarakat dengan cara tidak membedakan pelayanan antar kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain, interaksi sosial melalui profesi kerja perlu ditidak lanjuti dengan cara membentuk kelompok profesi kekerabatan melalui kelompok agama, kerukunan marga dan keluarga perlu dipertahankan dan dijaga dengan baik dan Interaksi sosial yang menekankan gaya hidup perlu disikapi dengan bijaksana dalam setiap hubungan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Gillin, J.L. dan J.P. Gillin. 1954. *Cultural Sociology*. New York: Mac Millan Company.

Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Rohidi dan Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI-Press.

Nasikun. 1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Nasution, S. 1988. *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Soemardjan Selo dan Soemardi Soelaeman (ed). 1971. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penerapan Azaz Desentralisasi Pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Manado

Oleh
William Agustinus Areros⁴
E-mail: areros.william@yahoo.co.id

Abstract

Government decentralization implementation is realized by granting autonomy to the region aims to enable the region to improve the effectiveness and efficiency in governance in the context of public service and implementation of development. Reality shows government officials have not been able to provide a quality service to the public in accordance community expectations.

Through the use of qualitative analysis found that government officials have not been able to provide a quality service to the public in accordance community expectations as a result of the delegation of authority that occurs not surrender the rights of superiors to subordinates, but the delivery of the right of officials to officials. decentralization in improving the quality of public services has the meaning that the quality of public services that are run by the government at a working level dependent or co-determined by the transfer of part of the authorities in the context of decentralization of administration utilized efficiently and effectively

Keywords: Decentralization, Public Services, Local Government

PENDAHULUAN

Sebagai pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 di bidang ketatanegaraan Pemerintah RI., melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berdasarkan UUD 1945 pasal 18, secara lengkap berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. Dari pernyataan ini, “... mengingat dasar permusyawaratan ...” dibentuk daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi. Sedangkan pernyataan “ ... dalam sistem pemerintahan negara ...” dimana Negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan maka desentralisasi

⁴ Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Administrasi FISPOL Universitas Sam Ratulangi;

dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi, serta kemungkinan pelaksanaan berbagai urusan pemerintah di daerah menurut azas tugas pembangunan (Inu Kencana : 2002)

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah tersebut, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam UUD Negara R.I Tahun 1945. Sedangkan dalam penjelasannya, disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Melalui pelimpahan wewenang pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas tiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang didalamnya juga memberikan kewenangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan. Inu Kencana (2002) mengatakan bahwa bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (pemerintahan daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pemberian.

Untuk memastikan bahwa apa yang akan dijalankan oleh pemerintah benar-benar akan merupakan kehendak rakyat, dan bagaimana memastikan bahwa

layanan birokrasi adalah cerminan dari aspirasi rakyat dan bukanlah suatu bentuk aktualisasi dari tuntutan kekuatan penguasa, pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber ide-ide baru. Keadaan masyarakat yang semakin berkembang, tuntutan akan pelayanan semakin berkembang pula. Kondisi demikian menurut aparatur pemerintah harus dapat memainkan peranan yang penting (Sinambela, dkk :2006).

Namun dalam realitasnya aparatur pemerintah yang berada dipusat maupun didaerah belum memberikan pelayanan yang berkualiiitas kepada masyarakat sesuai harapan masyarakat. Kota Manado sebagai pelaksana atas azaz desentralisasi juga tidak luput dari berbagai penyelenggaraan pelayanan baik pada pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan dab lain sebagainya.

Indikasinya, kita sering mendengar kerapkali rakyat (masyarakat) berkata sinis manakala mereka harus mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan melalui sebuah intitusi pemerintah (birokrasi), karena tindakan birokrasi seringkali dianggap mengecewakan mereka. Untuk mengurus suatu dokumen kecil, semisal KTP, SIM atau paspor yang menurut perhitungan kita sebenarnya dapat diselesaikan hitungan jam, namun harus memakan waktu sampai berminggu bahkan berbulan-bulan. Belum lagi melihat tampang aparat yang melayani kita, kadang-kadang mereka sangat angkuh, dan tidak tanggap terhadap keinginan kita.

Sehubungan dengan itu, masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat (aparatur Pemerintah). Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secar empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit – belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masih masyarakat diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum keadaan dibalik menjadi pelayan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikanannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dari uraian diatas tersebut, jelas organisasi (birokrasi) pemerintah dituntut untuk

melaksanakan pelayanan masyarakat (publik) yang berkualitas berdasarkan pelimpahan sebagian wewenang (desentralisasi) dari pemerintah di atasnya.

TEKNIK PENULISAN

Dalam penulisan ini menggunakan desain kualitatif dengan melakukan wawancara pada pimpinan Pemerintahan Kota Manado yang didukung dengan studi kepustakaan secara epistemologi. Penggunaan desain kualitatif yang didukung dengan kepustakaan secara epistemologi yang dalam pengertian berupaya mengkaji penyebab aparatur pemerintah belum mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai harapan masyarakat dengan memanfaatkan asas desentralisasi pada kewenangan penyelenggaraan daerah. Penggunaan desain kualitatif yang didukung dengan kepustakaan memungkinkan bagaimana mendapatkan ilmu itu atau dengan kata lain bagaimana proses yang memungkinkan diperoleh pengetahuan yang berupa ilmu melalui prosedurnya, hal apa yang diperhatikan agar memperoleh pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, apa kriteria kebenaran itu serta cara, teknik, sarana apa yang membantu memperoleh pengetahuan yang disebut dengan ilmu itu.

ANALISIS KONSEP DAN PEMBAHASAN

1. Desentralisasi

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Inu Kencana (2002) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk seterusnya menjadi urusan rumah tangga daerah. Sebagai implementasi lalu diadakan otonomi daerah baik pada Provinsi maupun Kabupaten. Desentralisasi kewenangan itu dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam beberapa bentuk yaitu, desentralisasi teritorial,

desentralisasi fungsional (menurut dinas dan kepentingan), dan desentralisasi administrative (disebut dekonsentrasi).

Menurut Sutarto (1995), pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Jadi tegas bahwa pelimpahan wewenang itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat. Wujud pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara vertikal, yaitu dilakukan oleh pejabat yang berkedudukan lebih tinggi kepada pejabat yang berkedudukan lebih bawah atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Sedangkan secara horizontal, yaitu pelimpahan wewenang dilakukan diantara pejabat yang berkedudukan pada jenjang yang sama atau antara pejabat yang sederajat.

Pelimpahan wewenang menurut Sutarto (1995) akan berhasil baik apabila dipenuhi syarat-syarat bahwa tugasnya jelas, ada pejabat yang memeng bersedia melimpahkan wewenangnya, dan ada pejabat yang memang mampu menerima wewenang, ini adalah merupakan syarat tritunggal. Tujuan desentralisasi di kemukakan oleh Sady dalam Bintoro Tjokroamidjojo (1995 :82) yang secara umum dikatakan sebagai berikut :

1. mengurnagi beban pemerintah pusat dan campur tangan masalah-masalah kecil pada tingkat local. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat local.
2. meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan social ekonomi. Demikian pula pada tingkat local, dapat merasakan keuntungan daripada kontribusi kegiatan mereka itu.
3. penyusunan program-program untuk perbaikan social pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
4. melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri
5. Pembinaan kesatuan nasional

Bagaimanapun juga, suatu bentuk desentralisasi perlu dilakukan, oleh karena kegiatan-kegiatan administrasi negara setidaknya dilakukan dipusat saja tapi juga pada tiap daerah, sehingga meliputi semua waraga masyarakat dari

negara tersebut. Tetapi justru dalam hal pelaksanaan desentralisasi (pelimpahan administrasi pemerintahan di daerah) pelaksanaan administrasi negara dapat dibagi dengan empat kelompok. *Pertama*, adalah dekonsentrasi dalam arti pelaksanaan kegiatan di daerah dilakukan oleh cabang unit-unit kegiatan-kegiatan pemerintah dipusat. Delegasi kewenangan tidak diberikan sepenuhnya, dan dalam banyak hal hanya merupakan alat pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat yang perlu dilakukan di daerah tersebut. *Kedua*, adalah revolusi desentralisasi dalam arti sebenarnya, seringkali disebut pula dengan pemberian otonomi. Dalam hal ini terdapat suatu delegasi kewenangan secara hukum yang berarti penyerahan tugas-tugas pemerintah kepada tingkat daerah. Pelimpahan kewenangan ini saja bersifat administratif, tetapi dengan demikian juga bersifat politik. Pembinaan keputusan terakhir di bidang-bidang tertentu, dalam hal pemberian otonomi atau desentralisasi ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengertian pemerintahan daerah juga berarti peranan perwakilan rakyat daerah untuk lebih membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi yang pertama adalah pelimpahan kewenangan biarpun untuk suatu wilayah kewenangan yang amat terbatas pada pemerintahan daerah dan yang kedua adalah delegasi kewenangan dari unit-unit pusatnya kepada unit-unit cabangnya. *Ketiga* adalah sertatantra, untuk kegiatan-kegiatan tertentu di daerah, beberapa bagian kegiatan pemerintahan pusat dapat dilakukan dalam hubungan kerja dengan pemerintahan daerah. Bentuk-bentuk sertatantra adalah dimana tugas-tugas pekerjaan dalam kewenangan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah daerah. *Keempat* adalah bentuk-bentuk kegiatan yang merupakan pembinaan pemerintah pusat maupun daerah tetapi dilakukan berdasarkan inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat. Program-program partisipatif ini biarpun ada kaitannya dengan suatu kebijakan pemerintah, tetapi pelaksanaannya didesentralisir bahkan dihubungkan dengan kegiatan masyarakat secara langsung. Contoh bentuk ini adalah program pembangunan masyarakat desa, perkoperasian, dan lain-lain perhatian administrasi pembangunan adalah apakah usaha perubahan-perubahan kearah pembaharuan dan pembangunan. Hal ini tergantung sekali dari tingkat pertumbuhan ekonomi, social budaya dari daerah-daerah tersebut untuk

mengembangkan potensi dan cukupnya artikulasi untuk merumuskan usaha pembangunannya. Termasuk disini adalah tersedianya skill yang diperlukan pada tingkat daerah. Karena kenyataan lemahnya keadaan tersebut terdahulu ditingkat daerah dibanyak Negara-negara baru berkembang. Otonomi pada tingkat-tingkat permulaan seringkali membutuhkan ongkos yang mahal tetapi dilain pihak pembinaan otonomi adalah salah satu bentuk partisipasi efektif (Bintoro, 1995 : 83-84).

Kebaikan diadakannya desentralisasi pemerintah menurut Inu Kencana (2002), yaitu sebagai berikut :

1. Meringankan beban, karena aparat pemerintah pusat tidak perlu lagi jauh-jauh ke daerah dimanapun daerah sudah difungsikan dengan baik.
2. Generalisasi berkembang, karena seluruh lapisan masyarakat dengan segala macam kemampuannya dikembangkan.
3. Gairah kerja timbul, karena setiap person (individu) terpakai dan diakui kebenarannya.
4. Siap pakai, karena tenaga – tenaga yang akan dipakai sudah berada didaerahnya masing – masing, jadi dalam system kepegawaian tidak perlu lagi pemindahan status kepegawaian.
5. Efisiensi, karena dalam penghematan waktu pemerintah tidak terlalu lama dalam mengisi formasi yang kosong.
6. Manfaat yang diperoleh besar, karena batin masyarakat terpenuhi melalui pendemokrasian di daerah ini.
7. Resiko tinggi, karena masalah – masalah yang timbul di daerah, bukan hanya dipikirkan dan dipecahkan oleh aparat pusat , tetapi juga dipikirkan penanggulangnya oleh masyarakat daerah.
8. Tempat untuk penduduk yang beraneka ragam, karena pemerintah tidak perlu lagi memaksakan uniformitas (disamping itu kebinekaan adalah kedigjayaan)
9. Menghilangkan kerja yang menumpuk, karena pekerjaan dapat dibagi – bagi antara pusat dan daerah, dan antara daerah dengan daerah lain.
10. Unsur individu menonjol pengaruhnya, karena setiap person (individu) yang memiliki keahlian didaerahnya akan segera terlihat.

11. Masyarakat berpartisipasi pada daerahnya, karena setiap karyanya yang dihasilkan oleh setiap karyawan dilihatnya sendiri dimanfaatkan untuk tanah kelahirannya.
12. Keinginan bersaing dengan daerah lain, karena masyarakat termotivasi untuk mengejar ketinggalan dibandingkan didaerah lain yang lebih maju dan keinginan ini keluar dari kesadarannya sendiri.
13. kepengurusan yang berbelit – belit terhindarkan, karena setiap urusan dapat diselesaikan didaerah masing – masing (hasil dari pendelegasian wewenang kepengurusan secara menyeluruh).
14. Timbul jiwa korszak kesaerahan, karena setiap daerah yang berhasil dalam pembangunan, akan memperdalam kecintaannya kepada grupnya (daerahnya).
15. Kesewenangan berkurang, karena pemerintah pusat telah memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka ketergantungan daerah kepada pusat berkurang, sebaliknya kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
16. Mengurangi pengawasan oleh pusat, karena telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah atau negara bagian maka pengawasan tidak lagi terlalu ketat dari pemerintah pusat.
17. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat pemerintah daerah, karena diberikan kesempatan untuk berkembang dan berkarya.
18. Memperbanyak jumlah parlemen – parlemen daerah, karena desentralisasi merupakan pendemokrasian di daerah.
19. Mengurangi kemungkinan pertentangan dari elit lokal terhadap pemerintah pusat, karena kebutuhan mereka untuk ikut berpartisipasi selama ini terpenuhi.
20. Menciptakan administrasi yang relative lebih fleksibel, inovatif dan kreatif karena dalam rangka kerja sama untuk mencapai tujuan tersebut muncul kreasi, keinginan untuk maju berkembang serta luwes dalam menyelesaikan permasalahan kedaerahan.

2. Pelayanan Publik

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal timbulnya pelayanan umum. Dengan kata lain antara

kepentingan umum ada korelasi dengan pelayanan umum. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses adanya penyelenggaraan kegiatan organisasi. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan umum (publik) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiel melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 2002 : 27).

Didalam ensiklopedi adminisrasi pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan dari organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada publik. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah birokrasi publik, yang memilih orientasi pada pelayanan. Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Sianipar (1998 : 5) pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak dibidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia untuk dimiliki oleh birokrasi secara efektif di daya gunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumberdaya dari aparat sangat di perlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai (Dwiyanto, 2006 : 67). Untuk memenuhi berbagai kebutuhan baru dalam pelayanan publik yang efisien dan berkualitas diperlukan suatu refleksi kritis untuk mencari solusi yang di anggap cocok dan mampu. Disinilah menurutnya relevansi *teori governance* dengan salah satu pendekatannya yang disebut *Socioecybernaties Approach* (Rhodes, 1996 : dalam Abdul Wahab 2001 : 43).

Inti dari pendekatan ini adalah bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan masyarakat dan kian kompleksnya isu yang harus segera diputuskan, beragamnya intitusi pemerintah serta kekuatan masyarakat madani

(civil society) yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan (policy making), maka akhir hasil (out come) yang memuaskan dari kebijakan public tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan sektor pemerintah. Kebijakan publik yang efektif dari sudut pandang teori governance adalah produk sinergi interaksional dari beragam aktor atau intitusi (Rhodes, 1996 : Stoker, 1998 : dalam Abdul Wahab, 2001 : 44).

Kecenderungan pikiran global khususnya yang mengkritisi bagaimana kebijakan pelayanan bagaimana pelayanan publik seyogyanya di implementasikan, kalau di pandangi dari sudut pandang teori governance, sebenarnya mencerminkan gugatan terhadap kesahihan, keabsahan, serta peran sentral yang selama ini di nikmati oleh negara dalam penyediaan dan pengalokasian sebagai bentuk pelayanan dasar (basic service) sebab kendati negara masih diharapkan memainkan peran tradisionalnya dalam menyediakan berbagai bentuk pelayanan dasar kepada rakyatnya, entah itu di bidang informasi, pendidikan, keamanan/ keselamatan komunita, infrastruktur dan lain sebagainya, namun sejauh menyangkut pilihan-pilihan politik mengenai bentuk peran dan strategi haruslah makin efektif. Para pakar teori governance membuktikan bahwa negara/ pemerintah kini tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi/ aktor yang mampu secara efisien, ekonomis dan adil menyediakan bentuk pelayan tadi (Lihat Rhodes 1996; Stroker, 1998; Eaiden, 1999) karena itu dipandang teori ini tidaklah beralasan jika proses perumusan dan implementasi kebijakan dalam pelayanan publik itu harus didesain oleh pemerintah sendiri, menurut selera pemerintah dan dikendalikan melalui mekanisme politik-birokrasi (direct service provision) bagi policy-makers, terbentang cukup luas spektrum pilihan-pilihan politik dan strategi implementasi kebijakan yang dapat di tempuh dalam hal pengaturan, penyediaan dan pembiayaan dalam beragam jenis pelayanan publik. Oleh karenanya dalam menjalankan misi pelayanan publiknya, pilihan politiknya harus dikembangkan secara cerdas dengan bersandar pada paradigma pilihan-pilihan publik (public choice), artinya pilihan-pilihan itu senantiasa mempertimbangkan secara kritis interaksi di antara kekuatan-kekuatan pasar, masyarakat madani dan kemampuan nyata dari masing-masing dinas pemerintah itu sendiri (abdul Wahab, 2001 : 44).

Tuntutan akan perlunya pembudayaan (internalisasi nilai-nilai) kewirausahaan dan perilaku inovatif dalam manajemen publik dan manajemen pemerintah membawa implikasi tentu konkretnya, eksistensi dan substansi pelayanan publik yang dilakukan oleh berbagai dinas pemerintah kini tidak lagi dipandang sebagai segala sesuatu yang absebtabel (secara social, ekonomi dan politik) jika professional, hanya dilakukan dengan prinsip asal jalan atau di kelola dengan manajemen by semau gue, tanpa harus dihitung resiko (Abdul Wahab, 1998; dalam Abdul Wahab 2001 : 46).

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi (dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain-lain;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik (Sinambela,dkk, 2006 :6).

Gasperz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

1. kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk; dan
2. kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan (Sinambela, dkk, 2006 :7).

Makna kualitas menurut Jackson dan Plamer ialah persepsi konsumen terhadap ciri-ciri dan tampilan tertentu dianggap ada pada sebuah pelayanan, dan nilai-nilai yang mereka berikan pada ciri-ciri dan tampilan tersebut. Jadi sebagai sebuah konsep, kualitas pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang dilihat dari sudut pandang mereka yang di layani, bukan hasil rekayasa dari hasil yang memberikan pelayanan (Jackson dan Palmer dalam Abdul wahab, 2001 : 52).

Menurut Sinambela dkk (2006 : 43), bagaimana sebenarnya pelayanan birokrasi yang berkualitas, dapat didefinisikan melalui ciri-cirinya, yaitu : (1) pelayanan yang bersifat anti birokratis; (2) distribusi pelayanan; dan (3) desentralisasi dan berorientasi kepada klien.

Selanjutnya , penerapan peraturan desentralisasi akan merubah secara dramatis pola hubungan antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Sistem perencanaan dan pelaksanaan lama yang bersifat top-down dan hierarkis harus diganti dengan sistem perencanaan dan prosedur baru yang menghubungkan lembaga pelayanan publik dan swasta serta masyarakat ke dalam suatu jaringan hubungan dua arah. Pendekatan pelayanan yang bermutu memberikan alat-alat yang bisa digunakan dalam proses ini dan dapat memberikan banyak manfaat.

Pembahasan

Ada beberapa alasan pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Alasan – alasan ini didasarkan pada kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai sistem pemerintah yang dianut oleh Negara seperti idiologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Berbagai alasan tersebut mendorong para politisi dan ahli pemerintahan untuk terus berupaya dan mencari bentuk yang pas dari desentralisasi dan otonomi daerah untuk dituangkan

kedalam undang – undang yang kini dikenal dengan Undang – Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penjelasan Undang – Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 tersebut, disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan bertanggungjawab. “Seluas-luasnya”, dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang – undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. “Prinsip otonomi nyata” adalah suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “otonomi yang bertanggung jawab” adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pelayanan kepada publik di daerah merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi utama pemerintah secara umum yaitu memberikan pelayanan kepada publik. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan itu, Siagian (1995) mengemukakan sifat pelayanan administrasi negara pada aparat pemerintah semua berkewajiban melayani semua warga negara itu dimata hokum sama. Oleh karena itu harus diberikan pelayanan yang sama. Inu Kencana (2002) mengatakan bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi – bagi pemerintahan menjadi

system yang lebih kecil (pemerintahan daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah – daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah – daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (publik) dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak – pajak daerah , retribusi daerah dan lain – lain pemberian.

Desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber – sumber daya (dana, manusia, dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah kegiatan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh perogram dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber – sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal (www.Gtzsdm.or.id/capacity/cb_index.htm).

Oleh karenanya pemerintah dituntut untuk melaksanakan pelayanan masyarakat (publik) yang berkualitas berdasarkan pelimpahan sebagai wewenang (desentralisasi) sebab salah satu kebaikan dari desentralisasi pemerintahan seperti yang dikatakan oleh Inu Kencana (2002) adalah kepengurusan yang berbelit belit terhindarkan, karena setiap urusan dapat diselesaikan di daerah masing – masing (hasil dari pendelegasian wewenang kepengurusan secara menyeluruh).

PENUTUP

Dengan memahami makna yang terkandung dalam Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah diberi berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Pelimpahan wewenang itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat. Wujud pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara vertikal maupun horozontal. Sedangkan tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif dan kesamaan hak dengan tidak memperlakukan diskriminasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa desentralisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki makna bahwa kualitas pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah di suatu tingkatan kerja tergantung atau turut ditentukan oleh pelimpahan sebagian wewenang dalam konteks desentralisasi pemerintahan yang dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus, 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.Yogyakarta: Bumi Aksara
- Moenir H. A. A., 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ndraha Talaziduhu, 1981. *Dimensi – Dimensi Pemerintahan*. Jakarta : Bina Aksara
- Siagian S. P. 1995. *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sianipar, G.J.P. MM 1998. *Manajemen Pelayanan Masyarakat* : Bahan Diklat Prajabatan Golongan III. Jakarta ; LAN RI
- Sinambela, L.P. MM. MPd. Dkk, 2006. *Revormasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sutarto, 1995. *Dasar – Dasar Organisasi*. Jogyakarta : Gadjah Mada University Press

Syafiie Inu Kencana, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Tjokroamidjojo Bintoro, 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Pustaka LP3ES.

Wahab Abdul, 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sumber – Sumber Lain :

Undang – Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Website : www.Gtzsdm.or.id/capacity/cb_index.htm

Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi Manado

Oleh
Djefry Lumi⁵
Joyce J. Rares⁶
Femmy G. Tulusan⁷
E-mail :jef_lumi@yahoo.com

Abstract

Sam Ratulangi University as one of the major universities are very concerned will be given public service employees, to the competence of the employees is a problem that is considered by the leadership, because without a good employee competence given the public service will not be maximized.

The research methodology used is that while the survey is descriptive analytical method. The target population in this study is that there are employees in the Central Office and the University of Sam Ratulangi University Students Sam Ratulangi, with a total sample as many as 113. The data were analyzed by using multiple linear regression statistical correlation. From this study it can be concluded that Altogether employee competence, namely the concept of self (Self Concept), the competence of employees that employee knowledge and competence of the employees that employee skills a positive effect on improving the quality of public services in the Central Office of Sam Ratulangi University.

Keywords: Employee Competence, Quality of Public Services

PENDAHULUAN

Masalah ketidakpuasan akan pelayanan publik yang dilakukan pegawai akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Universitas Samratulangi sebagai salah satu Universitas yang besar juga sangat memperhatikan akan pelayanan publik yang diberikan pegawainya. Hal-hal yang dinilai sangat mempegaruhi kompetensi seorang pegawai yaitu antara lain pengetahuan dari pegawai, jika pegawai memiliki pegetahuan yang kurang, maka secara otomatis pegawai tersebut tidak akan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal. Hal lainnya menyangkut keterampilan dan juga konsep diri dalam hal ini sikap dalam bekerja. Jika pegawai tidak memiliki keterampilan bekerja yang baik, maka

⁵ Mahasiswa Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

⁶ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

⁷ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

pekerjaan yang dihasilkan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik, begitupun dengan sikap dalam bekerja, jika pegawai tidak menerapkan sikap bekerja yang profesional, maka secara otomatis, para konsumen akan merasa bahwa pelayanan publik yang diberikan tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Pengaruh kompetensi pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi Manado. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi?
2. Apakah ada pengaruh antara kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi?
3. Apakah ada pengaruh antara kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi?
4. Apakah ada pengaruh antara kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT), kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai dan kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai secara bersama-sama terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kompetensi Pegawai

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang

terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut (Wibowo 2007). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Pengertian kualitas pelayanan menurut Tjiptono (2006), adalah pelayanan yang unggul (*service excellent*) dari suatu sikap atau cara karyawan/pegawai dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Secara spesifik tidak ada definisi mengenai kualitas layanan yang diterima, namun secara universal, dari berbagai definisi yang ada terdapat beberapa persamaan, yang dikelompokkan kedalam 2 pengertian sebagai berikut:

- a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

Menurut Sedarmayanti (2000), pengertian kualitas layanan kepada publik atau masyarakat, dapat dilihat pada lima dimensi yaitu:

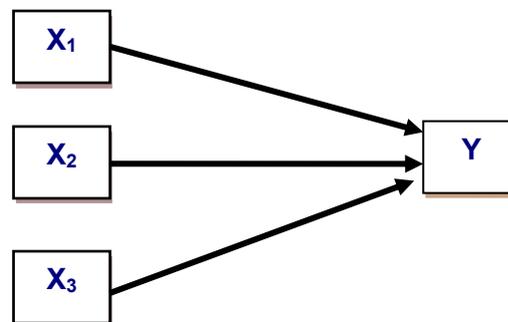
- a. *Reliability*, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/ pelanggan;
- b. *Responsiveness*, kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat;
- c. *Assurance*, pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen; dan
- d. *Empathy*, kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi perlindungan, serta berusaha mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen;
- e. *Tangibles*, penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya seperti peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan.

3. Kerangka Pemikiran

Di dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik kemampuan pegawai dituntut semakin kompeten. Kemampuan pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pada mutu pelayanan yang diberikan (Bardiyati, 2014). Karakteristik kompetensi dibedakan berdasarkan pada tingkat mana kompetensi

tersebut dapat diajarkan. Keahlian dan pengetahuan biasanya dikelompokkan sebagai kompetensi di permukaan sehingga mudah tampak. Kompetensi ini biasanya mudah untuk dikembangkan dan tidak memerlukan biaya pelatihan yang besar untuk menguasainya. Kompetensi konsep diri, karakteristik pribadi dan motif sifatnya tersembunyi dan karena itu lebih sulit untuk dikembangkan atau dinilai (Jenong, 2010).

Berdasarkan landasan teori sebagaimana telah diuraikan, maka model penelitian ini seperti tampak dalam diagram kerangka konseptual berikut ini :



Keterangan :

X₁ = kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT)

X₂ = kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai

X₃ = kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai

Y = peningkatan kualitas pelayanan publik

HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) (X₁) berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi (Y) .
2. Kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai (X₂) berpengaruh positif peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi (Y).

3. Kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai (X_3) berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi (Y).
4. Kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) (X_1), kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai (X_2) dan kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai (X_3) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi (Y) .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu survei sedangkan metodenya yaitu deskriptif analitis. Metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif dan pada akhir penelitian akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini (Effendi, 2003).

Populasi sasaran dalam penelitian ini yaitu pegawai yang ada di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi Manado dan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado. Sejalan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu : Pengaruh kompetensi pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi, sehingga, untuk menghindari adanya distorsi hasil penelitian, pengambilan sampel dikerjakan memakai teknik *Random Sampling*.

Untuk penelitian ini diambil sampel yaitu : Pegawai Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi sebanyak 116 orang pegawai dan diambil 50 % dari populasi yaitu 58 pegawai dan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial

dan Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kesehatan Masyarakat, masing-masing sebanyak 5 mahasiswa, jadi total sampel untuk mahasiswa sebanyak 55 mahasiswa, jadi total sampel yaitu sebanyak 113. Jumlah sampel ini dianggap memenuhi syarat dikarenakan sudah melebihi 30 sampel yang merupakan jumlah minimal sampel dalam penelitian kuantitatif.

Untuk mengumpulkan data tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa seperangkat kuesioner (daftar pertanyaan) berbentuk angket berstruktur pada skala ordinal. Kuesioner dibagi dalam 4 (empat) bagian sesuai dengan banyaknya variabel penelitian. Pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan cara angket.

Data yang diperoleh diedit dan kemudian ditabulasi dengan menggunakan analisis statistik melalui program SPSS 18, karena penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu penelitian ini bersifat kuantitatif, maka data yang terkumpul akan dianalisis dengan teknik statistik regresi linier berganda dengan korelasi (Sudjana, 1992).

Adapun variabel penelitian terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu :

- a) Kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) (X_1). Variabel ini diukur dengan indikator-indikator seperti: semangat kerja, kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, daya tahan terhadap tekanan dalam menghadapi tantangan tugas.
- b) Kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai (X_2). Variabel ini diukur dengan indikator-indikator seperti : tahu yaitu diartikan sebagai mengingat suatu materi/pekerjaan yang telah dipelajari sebelumnya, memahami pekerjaan yang akan dikerjakan, kemampuan mengaplikasikan materi/pengetahuan akan pekerjaann dan menerapkan pegetahuan yang dimiliki dalam pekerjaan, pengetahuan yang dimiliki dapat menyelesaikan masalah pekerjaan, kesesuaian jenjang pendidikan dengan standar organisasi.

- c) Kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai (X_3). Variabel ini diukur dengan indikator-indikator seperti : kemampuan untuk melaksanakan tugas khusus, kemampuan untuk bekerja secara baik dengan orang lain, kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam pekerjaan, kemampuan mempergunakan peralatan yang dibutuhkan dalam bekerja.
- d) Kualitas pelayanan publik (Y). Variabel ini diukur dengan indikator-indikator seperti : Kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh variabel kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) (X_1) terhadap kualitas pelayanan publik (Y)

Dari hasil penelitian, ternyata kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) (X_1) berada pada urutan ketiga dari koefisien regresi sebesar 0, 213 dan memiliki tanda positif, ini menunjukkan pergerakan yang searah dari kedua variabel ini, yang menerangkan bahwa semakin baik kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang akan semakin tinggi pula, dengan t_{hitung} 3,686 yang lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) pegawai (X_1) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) yang diukur dengan menggunakan indikator : semangat kerja, kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, daya tahan terhadap tekanan dalam menghadapi tantangan tugas, berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi dengan

derajat hubungan signifikan. Dengan demikian hipotesis I yang berbunyi kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) (X_1), berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y), diterima dalam penelitian ini secara meyakinkan pada taraf signifikansi 5%.

2. Pengaruh variabel kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai (X_2) terhadap kualitas pelayanan publik (Y)

Dari hasil penelitian, ternyata kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai (X_2) berada pada urutan kedua dari koefisien regresi sebesar 0,214 dan memiliki tanda positif, ini menunjukkan pergerakan yang searah dari kedua variabel ini, yang menerangkan bahwa semakin baik kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang akan semakin tinggi pula, dengan t_{hitung} 4,038 yang lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai (X_2) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai yang diukur dengan menggunakan indikator : tahu yaitu diartikan sebagai mengingat suatu materi/pekerjaan yang telah dipelajari sebelumnya, memahami pekerjaan yang akan dikerjakan, kemampuan mengaplikasikan materi/pengetahuan akan pekerjaann dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam pekerjaan, pengetahuan yang dimiliki dapat menyelesaikan masalah pekerjaan, kesesuaian jenjang pendidikan dengan standar organisasi, berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi dengan derajat hubungan signifikan. Dengan demikian hipotesis II yang berbunyi kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai (X_2), berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y), diterima dalam penelitian ini secara meyakinkan pada taraf signifikansi 5%.

3. Pengaruh variabel kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai (X_3) terhadap kualitas pelayanan publik (Y)

Dari hasil penelitian, ternyata kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai (X_3) berada pada urutan pertama dari koefisien regresi sebesar 0,420 dan memiliki tanda positif, ini menunjukkan pergerakan yang searah dari kedua variabel ini, yang menerangkan bahwa semakin baik kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang akan semakin tinggi pula, dengan t_{hitung} 8,666 yang lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai (X_3) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai yang diukur dengan menggunakan indikator : kemampuan untuk melaksanakan tugas khusus, kemampuan untuk bekerja secara baik dengan orang lain, kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam pekerjaan, kemampuan mempergunakan peralatan yang dibutuhkan dalam bekerja, berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi dengan derajat hubungan signifikan. Dengan demikian hipotesis III yang berbunyi kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai (X_3), berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y), diterima dalam penelitian ini secara meyakinkan pada taraf signifikansi 5%.

4. Pengaruh Kompetensi Pegawai Yaitu Konsep Diri (SELF CONCEPT) (X_1), Kompetensi Pegawai Yaitu Pengetahuan Pegawai (X_2) dan Kompetensi Pegawai Yaitu Keterampilan Pegawai (X_3) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y).

Faktor-faktor yang menentukan kualitas pelayanan publik yaitu kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) (X_1), kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai (X_2) dan kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai (X_3) secara individual seperti yang sudah dibahas diatas memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, bahwa masing-masing faktor tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk melihat seberapa besar ke ketiga variabel bebas menentukan variabel terikat, digunakan R Square (Koefisien Determinasi). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil analisis statistik maka koefisien determinasi sebesar 0,923 berarti 92,3 % kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi ditentukan oleh kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) , kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai dan kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai. Sisanya 7,7 % pengaruhnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari faktor kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) , kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai dan kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan demikian dapatlah disimpulkan semakin baik kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT), kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai dan kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai otomatis akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi, hal ini dikarenakan pegawai selalu bekerja dengan semangat kerja yang tinggi serta bekerja dengan kepercayaan diri yang tinggi sehingga hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik, akan tetapi tingkat kedisiplinan sebagian pegawai belum maksimal sehingga terkadang ada pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya.
2. Kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi, hal ini nampak pada saat pegawai melaksanakan pekerjaannya selalu menerapkan materi/pekerjaan yang telah dipelajari sebelumnya, selanjutnya pegawai juga

memiliki pemahaman akan pekerjaan yang akan dikerjakan dengan demikian pegawai mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta mampu untuk memberikan produk pelayanan publik yang dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.

3. Kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi, terbukti dengan pegawai umumnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan, pegawai juga cukup baik dalam dengan orang lain serta menunjukkan sikap yang sopan dan ramah dalam melayani dosen maupun mahasiswa yang mengurus berbagai administrasi di kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi Manado, begitu juga dengan kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam pekerjaan serta, pegawai juga umumnya mampu untuk mempergunakan peralatan penunjang dalam memperlancar pekerjaan sehingga pekerjaan yang dihasilkan umumnya selesai sesuai waktu yang diharapkan dengan hasil yang baik.
4. Secara bersama-sama kompetensi pegawai yaitu konsep diri (SELF CONCEPT) , kompetensi pegawai yaitu pengetahuan pegawai dan kompetensi pegawai yaitu keterampilan pegawai berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi.

Atas dasar kesimpulan seperti tersebut di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penerapan sistem pemberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan disiplin, sehingga pegawai dapat disiplin datang ke kantor serta disiplin menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Pegetahuan pegawai harus terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik melalui pendidikan dan latihan, yaitu dengan meningkatkan pemahaman pegawai tentang cara berkomunikasi baik dengan rekan sekerja, para dosen dan mahasiswa begitu juga dengan meningkatkan pengetahuan pegawai tentang

inovasi-inovasi teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai.

3. Keterampilan kerja pegawai juga harus tetap ditingkatkan yaitu dengan meningkatkan ketelitian, kecermatan dan mampu mengambil keputusan yang tepat pada saat dibutuhkan. Serta dapat mengantisipasi munculnya kesalahan di dalam melaksanakan pekerjaan dengan bekerja secara cermat, teliti, tepat. Sehingga dengan meningkatnya keterampilan kerja pegawai maka akan meningkatkan kinerja pegawai.
4. Secara keseluruhan ketiga faktor yang diteliti oleh penulis kiranya bisa menjadi masukan bagi pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik dan perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil faktor-faktor lainnya di luar faktor yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. H. B., 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, S., 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta : Yogyakarta.
- Bardiyati, 2014. Pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di BKS Pamardi Siwi. UI. Jakarta.
- Effendi, S., 2003, *Metode Penelitian Survei*, Lembaga Penelitian pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) : Jakarta.
- Jenong, S., 2010. *Kompetensi Pegawai*. STISIP.
- Kerlinger, F.N., dan Lee, H.B., 2000. *Foundation of Behavioral Research*. Forth Worth. Harcourt Coledge Publisher.
- Nasir, M., 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Sedarmayanti, 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Mneghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bangung : Mandar Maju.
- Sudjana,. 1992 . *Metode Statistika*. Tarsito, Bandung.

Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta. Bandung.

Tjiptono, F., 2006. *Manajemen Pelayanan Jasa*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

_____, 2001. *Kualitas Jasa: Pengukuran, Keterbatasan dan Implikasi*.
Manajerial, majalah Manajemen Usahawan Indonesia. Jakarta.

Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Parsada: Jakarta.

Peranan Public Relation Pada PT. Grapari Telkomsel Branch Manado

Oleh :

Chevny Bolung⁸

Markus Kaunang⁹

Very Y. Londa¹⁰

E-mail : cbcheyhoney@gmail.com

Absrtact

One of the efforts to achieve the goals in an organization is the implementation of an efficient public relations and effective. The purpose in this paper is to analyze the role of Public Relations at PT. Telkomsel Grapari Branch Manado. The methodology used is qualitative, data were collected through observation, interviews and literature studies. The number of informants 17 people. The data obtained were related to the role of public relations then analyzed through categorization and data reduction.

The final conclusion is that the role of public relations in Grapari Telkomsel Branch Manado, in this case has not been running with good views of the function as a communicator and as a relationship. So that should make improvements human resources through training, as well as in the form of the existing service system in Grapari Telkomsel Branch Manado. Public relations role played by customer service seen from the function as a communicator as well as the relationship is not going well.

Keywords: Public Relations, Communicators, Relationship

PENDAHULUAN

Telkomsel merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang telekomunikasi yang melayani masyarakat luas yang menggunakan teknologi komunikasi. Di dalam memberikan pelayanan terhadap *customer* atau pelanggan dan juga karyawannya, Telkomsel harus mempunyai *public relation* yang mengatur hubungan keluar, disini yang dimaksud adalah customer atau pengguna, dan juga hubungan didalam Telkomsel itu sendiri, yaitu hubungan antar karyawan. Di dalam Telkomsel sendiri semua jajaran karyawan didalamnya merupakan seorang *public relations* karena Telkomsel adalah perusahaan penyedia jasa.

Public Relation adalah seorang komunikator, untuk membangun sebuah komunikasi yang menyeluruh atau komprehensif, perusahaan harus mendesain

⁸ Mahasiswa Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

⁹ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

¹⁰ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

model komunikasi yang mampu mempengaruhi konsumen. Bentuk pengaruh itu berupa kesadaran bahwa produk barang atau jasa yang dihasilkan atau yang dipasarkan berkualitas, pembangunan citra positif bagi perusahaan bahwa perusahaan yang menghasilkan produk tersebut sangat *kredibel*, dan presentasi keunggulan kompetitif produk jika dibandingkan dengan produk perusahaan lain. Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris *communication* berasal dari bahasa latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna, (Effendy, 2003: 9). Komunikasi adalah penciptaan makna antara dua orang atau lebih lewat penggunaan simbol - simbol atau tanda - tanda. Komunikasi disebut efektif bila makna yang tercipta relatif sesuai dengan yang diinginkan komunikator, (Effendy, 2003: 49). Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kebutuhan untuk saling berhubungan satu sama lainnya, dan ini dilakukan melalui komunikasi.

Pada umumnya, komunikasi pemasaran dirancang untuk membuat konsumen peduli, bahkan tertarik dengan produk perusahaan, memunculkan komitmen atau loyalitas konsumen, menciptakan sikap konsumen yang positif terhadap produk, memberikan makna simbolik produk, atau memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi konsumen.

Seiring berkembang zaman, fungsi PR pun berkembang secara bertahap. Secara konseptual ada 3 fungsi utama PR :

a. *Communicator*

Sebagai juru bicara organisasi, PR berkomunikasi secara intensif melalui media dan kelompok masyarakat. Hampir semua teknik komunikasi antar personal (*interpersonal communication*) dipergunakan, komunikasi lisan, komunikasi tatap muka sebagai mediator maupun persuader.

b. *Relationship*

Relationship yang tidak harmonis beresiko menimbulkan ketidakpuasan publik yang pada akhirnya mengancam kelangsungan bisnis perusahaan.

c. *Good Image Maker*

Menciptakan citra dan publisitas positif perusahaan kepada stakeholdernya,

Public Relations mempunyai tiga fungsi *good image maker*, yaitu:

- 1) Memberikan penerangan kepada masyarakat.
- 2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- 3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya (Jefkins, 2003:19).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah dengan bermunculannya berbagai macam *gadget* yang di produksi dengan berbagai aplikasi dan program yang menarik dari berbagai produsen. Sudah dapat dikatakan bahwa *gadget* bukan lagi tergolong barang mewah namun sudah menjadi salah satu kebutuhan. Dengan fitur-fitur yang menarik dan yang memang dibutuhkan pada saat-saat seperti ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Dalam mengimbangi hal tersebut maka para *provider* atau penyedia layanan pun dituntut untuk lebih meningkatkan kualitasnya dalam segala hal. Terjadinya penurunan *market share* sebesar 51% (data 1 januari 2007) sampai menjadi 42% (data tahun 2013) merupakan tanda awas kepada PT. Telkomsel karena para kompetitornya telah mengambil 0,9% dari presentasi awalnya. Salah satunya dikarenakan oleh mahalnya tarif. Kompetitor yang ada memanfaatkan peluang dengan menurunkan harga mereka. Oleh sebab itu maka untuk menyeimbangkan kekurangan yang ada pada Telkomsel pada diperlukan pelayanan yang baik. Dan bukan hanya dinilai dari produknya saja, namun dari para karyawan dalam hal ini manusia sebagai representasi dari *brand company* yang ada. Salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan adalah dengan membina hubungan yang baik atau memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Ini adalah salah satu tugas dari para *public relations* yang ada. Jadi naik atau turunnya suatu produk bukan dikarenakan oleh kualitas produk itu sendiri, namun bagaimana seorang *public relations* dapat menarik perhatian kepada calon pelanggan ataupun pelanggan yang lama untuk tetap memakai produk Telkomsel.

Provider-provider baru yang telah masuk di Manado baik GSM maupun CDMA, seperti; 3, Axis, Smartfren, XL, dan lain sebagainya. Padahal dulu hanya ada dua *provider* yang ada di Manado, yakni Telkomsel dan Indosat sebagai

saingan terberat pada waktu itu. Dengan masuknya banyak *provider* lainnya di Manado, membuat persaingan semakin ketat. Banyak pelanggan yang berganti *provider* karena perang tarif yang sangat kompetitif, perang produk, program dan juga kegiatan-kegiatan yang inovatif dari *provider* lainnya. Juga iklan yang dirancang sedemikian mungkin yang dapat membuat khalayak berubah haluan meninggalkan Telkomsel. Citra bagi sebuah perusahaan/organisasi merupakan hal yang berperan penting, karena citra merupakan salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh public relations. Citra positif diharapkan dapat menciptakan ketertarikan seseorang pada organisasi atau perusahaan sehingga seseorang dapat memberikan dukungannya terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Citra berkaitan dengan suatu penilaian, tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi atau simbol-simbol tertentu terhadap bentuk pelayanan, nama perusahaan dan merek suatu produk barang atau jasa dari pihak public sebagai khalayak sasaran. Citra tersebut dapat bersifat positif atau negatif (Ruslan, 2010:17).

Citra merupakan gambaran yang ada dalam benak publik tentang perusahaan. Citra adalah persepsi publik tentang perusahaan menyangkut pelayanannya, kualitas produk, budaya perusahaan, perilaku perusahaan, atau perilaku individu-individu dalam perusahaan dan lainnya. Pada akhirnya persepsi akan mempengaruhi sikap publik, apakah mendukung, netral atau memusuhi (Krisyantono, 2008:9-10).

Telkomsel harus berpikir keras bagaimana agar tetap dipilih dan menjadi kepercayaan dari konsumen/pemakai layanan. Agar tidak tergeser atau tersingkirkan oleh para kompetitor. Telkomsel sebagai *provider* yang sudah memiliki banyak konsumen dan sudah punya nama besar, harus berusaha agar tetap menjaga para pemakai layanannya agar tidak berpaling darinya, itulah yang juga menjadi salah satu tugas dari para *Public Relation* dalam mempengaruhi perilaku konsumen.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan design penelitian kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang peranan *public relation* pada Grapari

Telkomsel Branch Manado. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa atau perilaku yang dapat diamati. Alasan menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pendayagunaan perpustakaan di Badan Prpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara yang memerlukan jawaban secara deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diteliti sebagaimana adanya diikuti dengan interpretasi secara rasional berbagai temuan dilapangan sekaligus menganalisis semua keadaan di lokasi penelitian.

Fokus penelitian ini adalah peranan *public relation* pada Grapari Telkomsel Branch Manado. Adapun yang menjadi indikator adalah fungsi communicator, fungsi relationship dan fungsi good image maker. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan besarnya jumlah informan tidak ada ukuran yang mutlak. Informan dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sebagai sampling bertujuan (*purposive sampling*) dan yang menjadi informan adalah Grapari Telkomsel Branch Manado yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari team leader, customer service, dan konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Obeservasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peranan public relation pada Grapari Telkomsel Branch Manado. Wawancara mendalam merupakan percakapan antara peneliti dengan informan yang berada pada Grapari Telkomsel Bbranch Manado, dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan guna mendapatkan informasi baik

verbal maupun nonverbal. Studi literatur (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menggunakan reduksi data yang dilakukan dengan meringkas data kualitatif dengan berbagai bentuknya, reduksi data disini termasuk proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi serta transformasi data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Display data, kumpulan informasi yang terorganisasikan. Tampilan data ini biasanya dalam bentuk teks naratif, matrik, tabel atau bagan. Tahap analisis Data diakhiri dengan pembuatan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dapat dikatakan posisi seorang *customer service* untuk menjalankan fungsi dari public relations adalah salah satu bagian yang dapat dijadikan ujung tombak di suatu perusahaan guna melayani kepentingan masyarakat luas. Hal ini tentunya dibutuhkan seperti tenaga, *attitude* dan *skill* yang tinggi untuk menjadi penghubung perusahaan dan mampu bersaing. Menjalin hubungan yang harmonis dengan publiknya dan menyelesaikan krisis yang terjadi.

Dalam hal ini *public relation* perusahaan haruslah dapat membuat strategi untuk mengubah perilaku konsumen atau *image* dan persepsi masyarakat, juga memberikan stimuli-stimuli kepada mereka agar dapat respon yang baik. Yang terjadi pada GraPARI Telkomsel Manado adalah, komunikasi yang ada belum berjalan dengan baik. Sejauh ini yang telah dilakukan oleh *customer service* hanyalah dalam memberikan informasi produk baik itu dalam penawaran produk maupun dalam memberikan bantuan lainnya. Namun masih belum dapat berkomunikasi dengan baik.

Berdasarkan pada pengamatan dan hasil wawancara yang ada maka *customer service* dalam menjalankan peranannya sebagai *public relations* dilihat pada fungsi yang ada, yaitu:

1. *Communicator*

Untuk membangun sebuah komunikasi yang menyeluruh dan komprehensif, perusahaan harus mendesain model komunikasi yang mampu mempengaruhi konsumen. Bentuk pengaruh itu berupa kesadaran bahwa produk atau jasa yang dihasilkan atau dipasarkan berkualitas, pembangunan citra positif bagi perusahaan yang menghasilkan produk tersebut sangat kredibel, dan presentasi keunggulan kompetitif produk jika dibandingkan dengan produk perusahaan lain. Pada umumnya komunikasi pemasaran dirancang untuk membuat konsumen peduli, bahkan tertarik dengan produk perusahaan, memunculkan komitmen atau loyalitas konsumen, menciptakan sikap konsumen yang positif terhadap produk, memberikan makna simbolik produk, atau memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi konsumen. Telkomsel harus jeli melihat banyaknya kompetitor yang bermunculan saat ini. Oleh sebab itu selain dari kualitas produk yang harus ditingkatkan, maka pilihan lainnya adalah pelayanan yang baik dan prima. Oleh sebab itu customer service harus mampu menguasai produk yang di jualnya, dan juga harus dapat memberikan penjelasan kepada konsumen khususnya dengan melakukan cara berkomunikasi dengan baik.

Untuk membangun komunikasi dengan konsumen perlu diperhatikan hal-hal seperti siapa si penerima pesan atau komunikan yang ada, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Disertai dengan menyesuaikan gaya bahasa yang digunakan dengan karakteristik si penerima pesan. *Customer service* harus mampu beradaptasi dengan siapa orang yang ada didepannya. Jangan sampai ia memberikan penjelasan menggunakan bahasa asing atau bahasa komputer kepada konsumen yang tingkat pendidikan rendah, atau kepada tingkat usia yang sudah diatas atau sudah berumur. Otomatis mereka tidak akan mengerti akan penjelasan yang ada dan membuat pesan atau informasi yang disampaikan tidak dapat diterima. Gunakan bahasa yang baik, apalagi jika konsumen itu berasal dari pedalaman yang mungkin tidak bisa mengerti dengan Bahasa Indonesia, maka *customer service* bisa memberi penjelasan menggunakan bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Kitapun dapat meningkatkan umpan balik yang baik atau buruk tergantung pada bagaimana

komunikator itu dapat memberikan informasi yang sesuai. Kesalahpahaman bisa dikurangi jika proses umpan balik dilakukan dengan baik, sehingga mereka tahu apakah pesannya sudah diterima atau tidak.

Komunikator harus menempatkan dirinya sebagai penerima sehingga proses penyandian, penggunaan bahasa, dan saluran disesuaikan dengan kondisi penerima. Bahasa yang kompleks atau istilah-istilah teknis menyebabkan komunikasi sulit dipahami oleh pendengar atau penerima. Hampir setiap gagasan dapat disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga setiap orang dapat memahami isi pesan yang disampaikan, gunakan bahasa atau istilah yang dipakai oleh pendengar, karena komunikasi adalah masalah memahami dan dipahami.

Bagi seorang *customer service* sebagai seorang komunikator, ia harus mampu mendengarkan dengan seksama, sabar, dan penuh perhatian. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan keberhasilan seseorang untuk mengirim pesan secara jelas, manusiawi dan efisien. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, komunikasi berjalan secara efektif dan efisien, pesan yang dikirim tersampaikan secara akurat. Komunikasi yang efektif dapat mengubah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku si penerima pesan. Proses penerimaan atau penolakan isi pesan yang disampaikan pengirim pesan seperti munculnya kesadaran dari calon konsumen, adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Seperti ketika seorang konsumen memiliki *smartphone*, maka ia pun akan berpikir bagaimana untuk dapat menggunakan fitur yang ada didalamnya. Otomatis ia akan menggunakan atau memilih *provider* yang tepat. Kemudian tumbuh minat, minat memotivasi konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Telkomsel memiliki banyak peluang yang besar, untuk dipilih sebagai *provider* yang ada. Oleh sebab itu diperlukan pemberian informasi kepada konsumen tentang produk yang ada serta kelebihan atau keunggulan produk tersebut.

2. Relationship

Menjadi jembatan antara masyarakat luas dalam hal ini konsumen dan perusahaan Telkomsel, *customer service* harus dapat memberikan pelayanan yang

terbaik. Karena ia bukan hanya sebagai pemberi informasi tapi juga sebagai representative dari perusahaan yang ada. Salah satu cara adalah dengan bersikap ramah terhadap konsumen yang ada. Ia harus tahu bagaimana mengambil perhatian dan mendapatkan simpati dari konsumen yang ada. Karena dengan membuka hubungan yang baik dengan konsumen secara tidak langsung ia sudah dapat mengetahui apa yang menjadi mau dari konsumen tersebut, dan membuat konsumen untuk dapat bersikap baik pula terhadap dirinya.

Sikap timbul dari stimulus, terbentuknya sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya keluarga, norma, agama, dan adat istiadat. Sikap itu dapat diubah dan dibentuk apabila terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia. Antara konsumen dan *customer service* harus ada *relation* yang baik, agar tercipta *feedback* atau respon yang diharapkan. Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap terbentuk dalam hubungannya dengan suatu objek, orang, kelompok, lembaga, nilai, melalui hubungan antar individu, hubungan didalam kelompok, dan sebagainya. Penting bagi *customer service* untuk menjaga sikap, bukan hanya ketika mendapatkan order dari konsumen, tetapi juga komplain karena produk kita tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Bisa jadi konsumen akan berkeluh kesah atau menjadi emosi ketika memberitahukan bahwa produk kita telah membuat pelanggan mengalami kerugian. Maka *customer service* harus memiliki sikap yang benar ketika menanggapi keluhan dari konsumen. Tidak menjadi emosi dan dengan sekuat tenaga membela habis-habisan produknya. *Customer service* harus tetap tenang ketika menerima keluhan dan berjanji untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Dengan memperhatikan pesan verbal dan nonverbal, *customer service* dapat membangun komunikasi yang positif dengan konsumen. Dalam komunikasi tatap muka, para ahli sepakat bahwa pesan lewat kata-kata hanya 20% sedangkan 45% disampaikan oleh kualitas nada dan sisanya melalui bahasa tubuh. Pelanggan perlu merasakan bahwa mereka telah didengar dan dimengerti, dan itu tidak bisa terjadi tanpa sikap mendengarkan yang baik. Sebagian besar dari kita tahu bahwa mendengar dan mendengarkan adalah aktifitas dan kemampuan yang berbeda.

Mendengar memerlukan fungsi telinga, sedangkan mendengarkan membutuhkan pemahaman.

3. Good Image Maker

Memahami bahwa keberhasilan perusahaan selain bergantung pada mutu produk dan jasanya juga pada kepiawaian membangun citra perusahaan. Maka seharusnya setiap perusahaan perlu mengetahui dan membangun citranya di masyarakat. Telkomsel sebagai perusahaan yang sudah memiliki citra yang baik dimata pelanggannya harus tetap mempertahankan. Jika tidak maka banyak konsumen yang akan berpindah ke *provider* yang lain. Persaingan yang cukup ketat bukan hanya oleh kualitas produk tetapi juga bagaimana pelayanan yang ada di perusahaan tersebut. Karena jika citra tersebut tidak dijaga maka dapat berimbas kepada image buruk dan bahkan produk akan ditinggalkan.

Dalam asosiasi organisasi konsumen akan mengaitkan sebuah produk dengan perusahaan yang memproduksinya. Asosiasi organisasi akan menjadi faktor penting jika merek yang ada mirip dalam hal atribut dengan merek lainnya, atau jika organisasi merupakan hal penting untuk dilihat. Dukungan asosiasi merek merupakan respon konsumen terhadap atribut, manfaat, serta keyakinan dari suatu merek produk berdasarkan penilaian mereka atas produk. Atribut disini tidak berkaitan dengan fungsi produk, tetapi berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap produk yang menganggap bahwa produk yang dikonsumsi itu baik dan bermanfaat bagi konsumen.

Setelah mengonsumsi sebuah produk, konsumen akan mengingat kesan yang ditangkap dari produk tersebut. Jika konsumen telah merasakan manfaatnya, ingatan konsumen terhadap produk tersebut akan lebih besar lagi daripada ketika konsumen belum menggunakannya. Itulah yang membuat ingatan konsumen semakin kuat terhadap asosiasi sebuah merek. Kekuatan asosiasi merek ditunjukkan dengan reputasi baik yang dimiliki produk tersebut di mata konsumen, produk tersebut dirasa memiliki manfaat ekspresi diri dan menambah rasa percaya diri konsumen. Jika sebuah produk mempunyai ciri khas yang membedakannya dari produk lain, produk tersebut akan diingat oleh konsumen. Ingatan konsumen itu akan semakin kuat jika konsumen sudah merasakan manfaat dari sebuah

produk dan merasa bahwa merek lain tidak akan bisa memuaskan keinginannya tersebut.

Citra merek yang positif memberikan manfaat bagi produsen untuk lebih dikenal konsumen. Dengan kata lain, konsumen akan menentukan pilihannya untuk membeli produk yang mempunyai citra yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika citra merek negatif, konsumen cenderung mempertimbangkan lebih jauh lagi ketika akan membeli produk. Seberapa jauh citra yang akan terbentuk, sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana *public relations* mampu membangun persepsi yang didasarkan oleh realitas yang terjadi. Dalam hal ini, fungsi *public relations* “ membeli” sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu kepercayaan masyarakat berupa opini dan persepsi yang baik terhadap perusahaan dan sekaligus perusahaan dituntut untuk memberikan yang baik pula.

Citra perusahaan PT. Telkomsel Branch Manado dimata masyarakatnya menurun, karena seperti yang telah disinggung sedikit di awal yakni ada beberapa faktor yang membuat citra perusahaan menurun. Beberapa waktu yang lalu sebelum banyaknya pesaing *provider* di Manado, Telkomsel benar-benar menempati tempat nomor satu di hampir seluruh masyarakat Manado, namun setelah beberapa lama citra tersebut berubah drastis. Banyak pelanggan setia Telkomsel berpindah pada *provider* lainnya, juga telah banyak yang mengeluhkan tentang kekurangan Telkomsel. Oleh karena itu, hal ini harus tepat ditangani oleh customer service di PT. Telkomsel Manado dalam membangun kembali citra dan membentuk perilaku masyarakat agar kembali kepada produk Telkomsel.

Dengan menggunakan peran media massa baik itu cetak maupun elektronik, Telkomsel telah mengambil hati masyarakat luas. Dengan mencitrakan Telkomsel sebagai provider yang terpercayai dan unggul yang memiliki jangkauan yang luas dan sudah memiliki pasar yang besar. Pemilihan iklan yang ada sudah jelas memikat masyarakat. Dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini yang semakin maju dan berkembang dan munculnya beragam alat komunikasi, baik itu berupa telepon genggam ataupun untuk internet lewat modem yang ada, maka Telkomsel memberikan menu yang lengkap, untuk dipilih pelanggan mulai dari paket telepon, paket sms, paket internet, dengan produk

Telkomsel yaitu AS, simPATI, dan kartuHalo. Maka dapat dipastikan pilihan konsumen akan jatuh kepada Telkomsel sebagai penyedia layanan yang sudah *branded*. Sedangkan untuk image pribadi dalam hal ini customer service itu sendiri dalam pelayanannya dinilai masih belum memuaskan para konsumen. Dinilai dan dilihat dari cara kerjanya yang masih belum maksimal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di GraPARI Telkomsel *Branch* Manado, peran *public relations* lebih condong dengan peran *public relations* sebagai *Good Image Maker*. Sedangkan untuk fungsi *communicator* dan *relationship*, belum berjalan dengan baik. Secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

Communicator (komunikator) sebagai salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam proses komunikasi belum berjalan dengan baik. Dikarenakan customer service dalam memberikan informasi tidak memperhatikan latar belakang konsumen yang ada. Sehingga komunikasi tidak berjalan sebagai mana mestinya. Termasuk didalamnya adalah pada sistem pelayanan di GraPARI, banyak yang mengajukan komplain dan belum terlihat peranan komunikator yang ada dari seorang *customer service*. Cara berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada pelanggan hanya sebatas pengetahuan mengenai produk, namun dalam bersikap sebagai komunikator yang baik dimana ia harus dapat memahami siapa komunikan yang ada, sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan baik.

Relationship (hubungan) diantara pihak perusahaan dan masyarakat dalam hal ini dalam konsumen pemakai layanan adalah faktor yang riskan. Karena sebagai *representatif* dari perusahaan yang ada, *customer service* seharusnya lebih profesional lagi dalam menghadapi berbagai macam komplain atau sifat dan sikap dari para konsumen. Kesalahpahaman sering kali terjadi di dalam pelayanan yang ada, dan membuat masalah muncul dari segi pribadi atau personal antara konsumen dan *customer service*. Seringkali yang ada dikarenakan ketidaksabaran dan tidak mengertinya konsumen ada sistem yang ada atau akan informasi yang didapat. Oleh sebab itu *customer service* tidak menyadari bahwa mereka

seharusnya dapat menjadi jembatan antara konsumen dan perusahaan sehingga hubungan yang baik itu terbangun, bukan sebaliknya menghancurkan atau meruntuhkan hubungan yang baik tersebut. Menjaga sikap dan perilaku mereka dengan kesopanan, dan tata krama yang baik sehingga dapat mempengaruhi konsumen akan respon atau *feedback* yang baik pula.

Good Image Maker mempertahankan citra perusahaan yang sudah ada. Bahkan memperbaiki citra perusahaan yang buruk yang disebabkan oleh komplain atau masalah yang ada. Telkomsel sebagai perusahaan yang sudah dipercayai oleh banyak orang harus mampu mempertahankan nama baiknya, bahkan harus terus mengembangkan produk yang ada demi kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu diperlukan orang-orang yang kredibel yang mampu untuk tetap mempertahankan *image brand* yang ada, dan salah satunya adalah *customer service* yang secara langsung berhadapan dengan konsumen, didalam mereka menjalankan fungsi *public relations*. Telkomsel Manado telah dapat mempertahankan citra perusahaan mereka yang sudah lama terbangun. Yang sangat dominan lewat iklan baik itu media cetak maupun elektronik. Sehingga *image* atau citra perusahaan menjadi baik dimata masyarakat luas.

Berdasarkan penelitian di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan sumberdaya manusia dalam hal ini *customer service* khususnya pada keahliannya.
2. Memberikan pelatihan akan cara menghadapi konsumen seperti training khusus, agar *customer service* menjadi lebih profesional dalam menghadapi berbagai macam konsumen.
3. Memajang *Standart Operation* Telkomsel pada dinding atau papan yang ada, sehingga konsumen juga dapat mengetahui akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
4. Menambah tenaga atau *back up customer service*, khususnya jika keadaan sedang ramai atau padat banyak pengunjungnya.
5. Memfungsikan kotak saran dalam menanggapi keluhan pelanggan atau konsumen yang datang ke GraPARI dalam peningkatan pelayanan yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Frank Jefkins dan Daniel Yadin (2004). *Publik Relation*. Edisi kelima, Erlangga, Jakarta.
- Krisyantono, R. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media Group cetakan ke-5, Jakarta.
- Onong Uchajana Effendy (2002). *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Telkom, PT. 2013. *Laporan Tahunan*. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- Tribunews.com, edisi Selasa, 25 Juni 2013: Jakarta

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Kantor Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Papua

Oleh :

Abraham Bagubau¹¹

William A. Areros¹²

J. H. Goni¹³

E-mail : Abraham_bagubau@yahoo.com

Abstract

Human resource development that occurs in pemerrintah personnel and the general public can not be separated from factors outside or from within. Homeyo District is one of the names of the seven district in Intan Jaya district. Human resource development that occurs in the government and public officials Homeyo District mainly because of education, knowledge. Factors driving force includes contact with the culture that comes from the West, another public system open, heterogeneous population consisting of several genera such as Bagubau, Bagau, Belau, Kobogau, Selegani, Tipagau, Mayani, Hagimuni, Miagoni, Migau, Wandagau, Japugau, Duwitau, Zanambani, Wamuni, Jagani, Holombau, as well as future-oriented society, but other things, that hinder the process of development of human resources, among others, is to have a level of education and knowledge are low both education and nono fromal fromal.

Keywords: Development, Human Resources, Education, Training.

PENDAHULUAN

Pengembangan sumber daya manusia yang terjadi pada aparatur pemerintah maupun masyarakat umum tidak terlepas dari faktor luar maupun dari dalam. Distrik Homeyo ialah salah satu nama dari antara tujuh Distrik yang ada di kabupaten Intan Jaya. Pengembangan sumber daya manusia yang terjadi pada aparatur pemerintah maupun masyarakat Distrik Homeyo terutama karena adanya pendidikan, pengetahuan.

Faktor pendorongnya meliputi kontak dengan kebudayaan yang datang dari Barat, lain sistem masyarakat yang terbuka, penduduknya heterogen terdiri dari beberapa marga seperti Bagubau, Bagau, Belau, Kobogau, Selegani, Tipagau, Mayani, Hagimuni, Miagoni, Migau, Wandagau,

¹¹ Mahasiswa Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

¹² Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

¹³ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Japugau, Duwitau, Zanambani, Wamuni, Jagani, Holombau, serta masyarakat yang berorientasi kedepan, namun hal lain, yang menghambat dalam proses pengembangan sumber daya manusia antara lain ialah memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia

Landasan hukum untuk memberikan Otonomi Daerah di seluruh Indonesia yaitu Undang-undang (UU) No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini ialah terkait dengan pemekaran dan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk membererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk membercepat pembangunan. Tujuan nasional dan cita-cita tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia ialah salah satu tujuan adanya sistem pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan Distrik ialah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa tujuan peningkatan sumber daya manusia tiada lain untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia secara optimal, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja yang diperlukan. Makna produktivitas ialah keinginan dan upaya manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan disegala bidang (Sdarmayanti, 2009:96) selanjutnya sumber daya manusia yang efektif serta produktif Menurut Dale Timpe (Husein, 2000: 12

Menurut penjelasan undang-undang N0 8 tahun 1974 pembinaan yaitu usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pegawai negeri (sumber daya manusia) yang mempunyai sifat-sifat 1) penuh dan taat kepada panasila, UU-45 Negara dan pemerintah 2) bersatu padu 3)

bermental baik, 4) berwibawa 5) bersih, 6) berkualitas tinggi, dan 7) sadar akan tanggung jawabnya.

2. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

a. Pendidikan

Pengembangan Pendidikan ialah unsur sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, keperbadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UUSPN N0. 20 Tahun (2003).

Pendidikan memiliki fungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk perilaku peradaban bangsa dan Negara demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan suatu hal dimana seseorang mampu meningkatkan kemampuannya dan taraf hidupnya demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik di masa depan nanti. Pendidikan merupakan suatu usaha atau bentuk pengajaran yang dimana seseorang di tuntut untuk belajar memahami berbagai kehidupan dan dituntut untuk memahami kebutuhan kehidupan yang kelak, pendidikan mendorong seorang untuk mau berusaha dan menumbuhkan rasa ingin tahu untuk merencanakan, memahami, melakukan dan menganalisis yang ada dilingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan komponen-komponen kehidupan yang mendorong manusia untuk berusaha agar mereka mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang mereka tahu.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia, Engkoswara (2001) meyebutkan bahwa manajemen pendidikan yang diharapkan menghasilkan pendidikan yang produktif, yaitu efektif dan efisien, memerlukan analisa kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan Vital.

b. Pengembangan Pelatihan

Menurut Henry Simamora (2004) metode Pelatihan ini dilaksanakan untuk karyawan baru agar dapat menjalankan tugas-tugas baru yang disebabkan dan untuk karyawan lama guna meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya sekarang maupun masa yang akan datang. Pada dasarnya pelatihan dan pendidikan itu merupakan proses yang berkelanjutan bukan proses sesaat saja. Menurut Dasar hukum dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ialah sebagai berikut: (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 1999; (2) peraturan pemerintah nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri Sipil; (3) Keputusan Persiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan badang kepegawaian daerah; (4) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan di jajaran departemen

c. Pelatihan Secara Fromal

Pengembangan formal dilakukan oleh organisasi dengan menggunakan biaya yang besar. Pengembangan ini dilakukan karena tuntutan organisasi, dan persaingan yang semakin tinggi. Pengembangan semacam ini di harapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Bagi pegawai pengembangan semacam ini sangat bermanfaat karena mereka akan mempunyai dan memiliki kemampuan, keahlian, serta keterampilan yang lebih tanpa mengeluarkan biaya. Pengembangan terdiri dari dua bagian yaitu pengembangan pelatihan, pengembangan pendidikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua. Distrik Homeyo ialah salah satu nama daerah kedudukan Distrik yang dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dilihat dari kondisi pengembangan sumber daya manusia yang ada

pada kantor distrik maupun masyarakat sangat berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama yang disebabkan oleh faktor pendidikan, sehingga Pengembangan sumber daya manusia masih belum dikatakan baik, peneliti ingin memilih lokasi di Distrik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengembangan sumber daya manusia yang ada di distrik ini sesuai dengan tingkat pendidikan, dan kemampuan pengembangan sumber daya manusia

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif, wawancara, dimana data primer atau sekunder yang diperoleh akan dikumpulkan, dianalisis, dan dideskripsikan, sedangkan pendekatan yang dipakai berdasarkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua. Distrik Homeyo ialah salah satu nama daerah kedudukan Distrik yang dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dilihat dari kondisi pengembangan sumber daya manusia yang ada pada kantor distrik maupun masyarakat sangat berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama yang disebabkan oleh faktor pendidikan, sehingga Pengembangan sumber daya manusia masih belum dikatakan baik, peneliti ingin memilih lokasi di Distrik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengembangan sumber daya manusia yang ada di distrik ini sesuai dengan tingkat pendidikan, dan kemampuan pengembangan sumber daya manusia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Distrik Homeyo selatan secara Administratif berada di dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya dengan luas wilayah sebesar 2.172,19 Ha. Wilayah Distrik Homeyo ini masih terdapat pedalaman atau daerah ini dikenal dengan bayak sekali terdapat gunung-gunung, Lembah, sungai, yang besar, (medang yang cukup berat), sehingga sangat sulit dijangkau oleh pemerintah Kabupaten, Distrik ini amat sangat luas dengan hutan rimba dan berbagai jenis dataran tinggi yang sangat subur.

Jumlah penduduk yang ada di Distrik Homeyo Selatan sebanyak sepuluh ribu koma, empat ratus empat puluh tujuh (10, 447) jiwa terdiri dari lima ribu lima ratus Sembilan belas jiwa (5,519) laki-laki, dan empat ribu sembilang ratus tiga puluh empat (4,934) jiwa perempuan.

Pendidikan tradisioal bagi masyarakatnya sangat diperhatikan oleh suku Moni, terutama untuk generasinya, masyarakat moni di Distrik Homeyo menganggap bahwa melalui pendidikan secara tradisional efektif, Ideologi migani (*moni*) dapat terus dikembangkan. Salah satu cara efektif, yaitu dengan membangun dua macam rumah; rumah laki-laki yang disebut (*Nduni*) dan rumah wanita yang disebut (*Minai*). Rumah Nduni ialah tempat pembinaan para laki-laki untuk mengembangkan diri, marga atau suku. Sedangkan Minai, sebagai pengembangan para Ibu dan anak gadisnya, juga memproses makanan bagi kaum laki-laki. Masing-masing terpisah, begitu pula kamar mandi, (*basigi*) dan lain-lain.

Dari wawancara yang dilakukan terungkap bahwa pangkat ikut Pelatihan ialah mereka yang kedudukannya menunjukkan tingkatan pegawai negeri sipil (PNS), berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian kenaikan pangkat ialah penghargaan yang diberikan atas perstasi kerja dan pegawai negeri sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan perstasi kerja dan pengabdianya. agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya, susunan pangkat dan golongan ruang pegawai negeri sipil Distrik Homeyo sebagai berikut:

Golongan yang bisa ikut pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan, tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai itu sendiri pangkat yang ikut pelatihan I/a II/a II/b. II/c I/d. III/a golongan yang belum ada atau belum memiliki oleh aparatur pemerintah Distrik Homeyo ialah III/b, III/c, III/d dan III/e. Maka pelatihan merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Studi banding biasa dilakukan dengan maksud peningkatan mutu, kualitas perluasan pemahaman pengetahuan, sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan lain-lain. kegiatan studi banding yang dilakukan oleh pemerintah distrik kepentingan untuk menguji atau menemui obyek tertentu pada suatu daerah yang maju yang sudah disiapkan dan berlangsung dalam waktu relative singkat. Intinya ialah untuk membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada ditempat sendiri. Hasilnya berupa pumpan data dan informasi sebagai bahan acuan dalam perumusan konsep yang di inginkan, serta meningkatkan kualitas kinerja. Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membawa wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kepadanya untuk menjadi lebih baik.

Maju mundurnya kemajuan satu daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, namun untuk selanjutnya dikembangkan potensi yang ada pasti didukung melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal, sehingga pemerintah daerah menyediakan beberapa fasilitas pendukung pendidikan di Distrik Homeyo.

Kebutuhan akan pendidikan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia memerlukan perhatian yang lebih lanjut, terutama dalam sektor pendidikan lanjutan. Begitu pula dengan pemertaan sarana pendidikan yaitu sekolah yang masih memerlukan perhatian dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Distrik Homeyo masih belum memadai baik fisik maupun mental.

Kepandaian membaca dan menulis merupakan faktor yang utama dalam pengemangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat Homeyo. pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang mempengaruhi cara berpikir yang lama beralih pada hal-hal yang ilmiah khususnya berkaitan dengan perubahan pengembangan sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Karena itu keberadaan gedung-gedung, sekolah (SD) yang ada di setiap kampung, Distrik Homeyo diantaranya YPPK Bilai,

YPPK Sanepa, SD.N Kendetapa, SD.N Selemama, SD.N Ogeapa, SD. N Pogapa, SD. N Mapa, sekolah pendidikan ini sangat dibutuhkan. Dengan dibangunnya sekolah-sekolah merupakan jawaban yang paling tepat untuk menghantarkan warga masyarakat memperoleh pendidikan yang baik untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia sangat fundamental baik para pegawai maupun masyarakat dianggap penting bagi kepentingan masyarakat maupun kinerja pemerintah karena itu aparatur pemerintah Distrik dituntut akan memiliki kemampuan dalam pengembangan dalam rangka terkait dengan melaksanakan tugas-tugas pelayanan, masyarakat penulis membahas lebih jauh

Peningkatan pengembangan sumber daya manusia Distrik Homeyo Selatan. Memang ada peningkatan kualitas para sumber daya manusia merupakan hal yang fundamental bagi pemerintah yang tidak bisa pisahkan dari dua hal yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan, pengembangan diartikan sebagai penyiapan seorang pegawai negeri untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam kinerja. Di tingkat pendidikan pegawai Distrik Homeyo masih belum peningkatan kemampuan secara signifikan terutama cara berfikir, bertindak untuk melakukan suatu pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh atasan juga kerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atasan, begitupun tingkat pengetahuan para pegawai kebanyakan belum tahu menulis, belum bisa membedakan berbagai macam surat yang masuk, surat keluar disiposisi surat, sesuai dengan kebutuhan kantor maupun kebutuhan masyarakat. pegawai-pegawai Distrik semua putra, putri daerah dilingkungan Distrik Homeyo sehingga masih pegang teguh pada adat dan kebiasaan dilingkungan maupun factor pendidikan dan pengetahuan. jika memberikan pendidikan dan pelatihan pasiti mereka tahu tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka.

Karenanya faktor tingkat pendidikan pegawai Distrik Homeyo rata-rata sekolah dasar (SD). sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah Menengah kejuruan (SMK), lebih dari

itu dua sampai tiga orang Strata satu S1 maka disisi pengembangan peningkatan kualitas pegawai pendidikan, pengetahuan masih belum bisa mengatakan baik secara total tetapi sisi kuantitas daripada pegawai yang ada empat puluh satu (41) pegawai bisa dikatakan baik, namun selama ini pemerintah masih belum memberikan pendidikan dan pelatihan para pegawai terkait dengan Pengembangan pegawai, biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang di perlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik.

Kecapaian pengembangan pendidikan dan pengetahuan Ketercapaian pendidikan pada pemerintah Distrik maupun masyarakat Homeyo dipengaruhi juga oleh persediaan sarana dan prasarana pendukung, hal ini sesuai dengan pengamatan dan wawancara di lapangan bahwa setelah peningkatan dan penambahan fasilitas pendidikan tingkat pencapaian prestasi siswa meningkat seiring dengan pengembangan sarana pendung yang dimaksud.

Pendidikan warga masyarakat kebanyakan belum tamat SD, SMP dan SMA, Tenaga pengajar masih kurang, Sulit untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun setelah perkembangan menjadi dunia modern Sudah tersedia fasilitas pendidikan berupa Sekolah Dasar (SD YPP), dua SDN 5 pegawai Distrik kebanyakan sudah tamat SMA dan bahkan ada yang sampai di perguruan tinggi.

Teknologi sangat berpengaruh terhadap peningkatan, pengembangan sumber daya manusia pada umumnya sosial masyarakat Distrik Homeyo . sebelum ada teknologi belum ada alat komunikasi (Telepon atau Hanpone), Media Informasi belum ada (media elektronik maupun media cetak seperti televisi, radio dan majalah), Masih terisolir dan belum ada akses transportasi darat, dan Masih menggunakan alat tradisional untuk pertanian dan keperluan rumah tangga, tetapi sesudah peningkatan pengembangan sudah ada alat komunikasi (Telepon atau Hanpone), ada media Informasi (media elektronik maupun media cetak seperti televisi, radio).

PENUTUP

Sebagai upaya untuk membina perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan tugas pemerintahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik bersih dan berwibawa (Good Governance) salah satu pendekatan utama ialah pembangunan sumber daya manusia melalui pengempangan pendidikan dan pelatihan pola karier pegawai negeri sipil (PNS) yang diikuti oleh pendidikan dan pelatihan yang tepat.

Pola karier yang jelas terarah, transparan, yang diikuti oleh pendidikan dan pelatihan yang tepat merangsang pegawai untuk mengembangkan karier dan profesionalismenya. dengan terwujudnya aparatur yang profesional dapat membangkitkan kesadaran mengatasi kejahatan-kejahatan kurangnya melaaksanakan kinerja pemerintah maupun kroupsi, kolusi dan nepotisme. Aparatur pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dalam hal Pengembangan sumber daya manusia pada Distrik Homeyo. Pengembangan pegawai itu dapat di aplikasikan melalui pengembangan dengan menempatkan jenis-jenis kegiatan pengembangan dibarengi dengan peningkatan pendidikan, pelatihan pembinaan disiplin, kerja dalam melaksanakan aktivitas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai aparat pemerintah Distrik Homeyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia lewat , pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengarahan, yang strategis dengan latar belakang pendidikan yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Menurut Barry Cuchway. 1994. Manajemen sumber daya manusia sebagai rangkaian strategi Jakarta : Rinkea Cipta.
- Husein, 2000. meningkatkan keterampilan manajemen: teknik-teknik meningkatkan pembelajaran dan kinerja terjemahan Ramaelan. Jakarta: PT Gramedia.
- Flippo, Edwin B. 1987 personel management. Boton; Houghton Mifflin Company.

Henry Simamora (2004) manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta; STIE YKPN.

_____ 1994. Pengembangan Sumber Daya Innsani Jakrta; Gunung Agung

Sedarmayanti. 2009 Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas kerja. Jakarta: Penerbit Mandar Maju.

Sumber lainnya :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000), tentang pembentukan Distrik.

Undang-undang nomor 43 1999; (2) peraturan pemerintah nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri Sipil

Keputusan Persiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan badang kepegawaian daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan di jajaran departemen

Peraturan menteri dalam negeri Nomor. 1 Tahun 2006 Tentang pedoman penegasan batas daerah.

Undang-undang (UU) No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Kesejahteraan Karyawan PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara

Oleh :

Dian Fitriani Karim¹⁴

Markus Kaunang¹⁵

VeryY. Londa¹⁶

E-Mail : dian_fitriani27@yahoo.co.id

Abstract

Employee welfare is a form of welfare services provided by the company to the employees who have given power, mind and their services. Company Parties have an obligation to make efforts to motivate employees to provide benefits that can improve employee productivity. Welfare programs provided by the company to employees of PT. Royal Coconut North Minahasa yet either.

Using qualitative methodology, research results show that the well-being of employees is not a good idea due to the PT. Royal Coconut not impose the maximum employee welfare services in terms of economic, facilities, and welfare services.

Key Words: werlfare, imployee, economis, service, and facility

PENDAHULUAN

Perusahaan dan karyawan pada hakekatnya saling membutuhkan, karyawan adalah sumber daya perusahaan karena tanpa adanya sumber daya manusia maka perusahaan tidak akan bisa berjalan, begitu juga karyawan tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai tempat mencari nafkah sekaligus implementasi dari disiplin ilmu yang mereka miliki sendiri. Maka karyawan harus diperhatikan kesejahteraannya sehingga perusahaan tidak hanya menuntut kewajiban karyawan saja dengan berbagai macam beban pekerjaan, begitu pula dengan karyawan yang jangan hanya menuntut hak mereka tetapi pekerjaan dan tanggung jawab sebagai karyawan tidak diselesaikan.

Namun masih ada perusahaan yang kurang memperhatikan karyawannya sehingga tingkat kesejahteraan rohani dan jasmanai karyawan belum terpenuhi dan kehilangan motivasi, malas, dan terkesan tidak baik hasil pekerjaannya. Sehingga mereka beranggapan bahwa sekeras apa pun mereka bekerja perusahaan

¹⁴ Mahasiswa Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

¹⁵ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

¹⁶ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

tidak mempedulikan mereka, apalagi untuk memberikan kesejahteraan dan imbalan yang layak untuk mereka.

Pentingnya kesejahteraan karyawan adalah untuk mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dan meningkatkan sikap loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Untuk mempertahankan karyawan ini hendaknya diberikan kesejahteraan/kompensasi lengkap/fringe benefits. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar semangat kerja meningkat adalah melalui program kesejahteraan karyawan yang disusun berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan serta berpedoman kepada kemampuan perusahaan.

Perusahaan pabrik tepung kelapa atau yang dikenal dengan PT. Royal Coconut memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di sektor swasta baik dalam bidang produksi, serta pemberian kesejahteraan terhadap ketenagakerjaan untuk usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan banyak diperhadapkan manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkaran kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan (sumber daya manusia) yang mengelola faktor-faktor produksi tersebut. Namun, sumber daya manusia (karyawan) sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya faktor produksi lainnya merupakan masukan (*input*) yang diolah oleh perusahaan menghasilkan keluaran (*output*).

Dalam kenyataannya masih banyak program kesejahteraan karyawan yang belum diberlakukan oleh PT. Royal Coconut dilihat dari segi ekonomis, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan diantaranya: pertama, dilihat dari segi ekonomis seperti tidak tersedianya uang pensiun bagi karyawan dikarenakan oleh perusahaan tersebut masih dalam sistem kontrak, uang makan dan uang transfer ditanggung oleh masing-masing karyawan, sehingga hal tersebut memberatkan beban keuangan karyawan terlebih lagi uang makan dan uang transport tersebut di masukan di dalam slip gaji karyawan, padahal mereka tidak

mendapatkannya. Kedua, dilihat dari segi fasilitas seperti fasilitas kesenian, dana pendidikan maupun koperasi yang tidak disediakan oleh perusahaan tersebut. Padahal beberapa karyawan sangat mengharapkan jika hal tersebut disediakan untuk mereka demi meningkatkan gairah kerja mereka. Ketiga, pelayanan kesehatan gratis bagi karyawan dan keluarganya berupa Jamsostek yang beralih menjadi BPJS hanya saja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada karyawan belum memadai dan merata serta belum sepenuhnya dirasakan oleh karyawan. Selain itu, walaupun ada klinik kesehatan gratis, akan tetapi tidak ada ada dokter yang merawat karyawan ditempat klinik tersebut terlebih lagi obat-obatan yang disediakan masih cenderung terbatas. Hal terpenting yang diharapkan oleh karyawan PT. Royal Coconut ialah masalah tunjangan keluarga, kesehatan gratis bagi keluarga mereka, dana pendidikan, kompensasi tidak langsung yang dapat menunjang kesejahteraan hidup bagi mereka.

Akan tetapi, jika ditinjau dari segi pengupahan kepada karyawan pada dasarnya sudah sesuai standar UMP dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja. Para dasarnya sulit untuk mengukur tingkat kesejahteraan karyawan karena ketidakpuasan atas upah yang diberikan oleh PT. Royal Coconut ialah berasal dari individu itu masing-masing, faktor ekonomi merupakan alasan dari beberapa orang karyawan untuk mengatakan bahwa mereka belum puas dengan upah yang mereka dapatkan hanya berdasarkan UMP saja. Dengan demikian untuk menutupi sebagian dari ketidakpuasan tersebut PT. Royal Coconut memberikan pelayanan kesejahteraan kepada karyawan agar loyalitas dan motivasi kerja mereka tetap stabil. Pemberian kesejahteraan merupakan tunjangan tambahan untuk karyawan baik itu bersifat materil maupun non materil.

Para karyawan juga menuturkan jika kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh perusahaan PT. Royal Coconut berupa dana bantuan pendidikan yang belum diberlakukan, bantuan keuangan dan bantuan sosial belum baik atau maksimal maka hal tersebut akan mengurangi produktifitas serta ketenangan kerja mereka. Harapan-harapan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut hendaknya dapat tercapai sehingga program kesejahteraan karyawan dapat

bermanfaat dan mendorong tujuan perusahaan yang efektif dan tidak melanggar peraturan pemerintah serta memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan dan keluarganya. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui mengapa kesejahteraan karyawan PT. Royal Coconut belum baik. Berdasarkan fenomena yang ada, tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kesejahteraan karyawan PT. Royal Coconut Minahasa Utara.

Menurut Hasibuan (2007) kesejahteraan karyawan adalah balas jasa lengkap materi (gaji, tunjangan) dan non materi (berupa kepuasan hasil kerja dan penghargaan) yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya meningkat.

Pentingnya program kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja karyawan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007:182) adalah: “Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin dan sikap loyal terhadap perusahaan sehingga *labour turn over* relative rendah.” Dengan tingkat kesejahteraan yang cukup, maka mereka lebih tenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan ketenangan tersebut diharapkan para karyawan akan lebih berdisiplin.

Adapun tujuan program kesejahteraan pada pegawai menurut Hasibuan (2007:187) adalah:

- a) Untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai dengan perusahaan.
- b) Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pegawai beserta keluarganya.
- c) Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktifitas pegawai.
- d) Menurunkan tingkat absensi. Dan *labour turn over*.
- e) Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman.
- f) Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Berbagai jenis program kesejahteraan kepada karyawan, seperti yang diutarakan oleh Hasibuan (2007) dalam tabel berikut ini:

Table 1. Jenis Kesejahteraan Karyawan

No	Ekonomis	Fasilitas	Pelayanan
1.	Uang pensiun	tempat ibadah	Kesehatan
2.	Uang makan	kafetaria	mobil jemputan
3.	Uang transport	olahraga	penitipan bayi
4.	Tunjangan hari raya	kesenian	bantuan hukum
5.	Bonus	pendidikan	penasehat keuangan
6.	Uang duka	cuti	asuransi
7.	Pakaian dinas	koperasi	kredit rumah
8.	Uang pengobatan	izin	

Sumber : Malayu S.P. hasibuan, manajemen Sumber Daya Manusia, Hal 188

Bentuk lainnya dari program kesejahteraan karyawan didalam perusahaan dapat berupa dana bantuan pendidikan, bantuan keuangan, dan bantuan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2003), menyebutkan bahwa: “dalam usaha mendorong produktifitas serta ketenangan kerja pada karyawannya, perusahaan memberikan jasa-jasa tertentu kepada karyawannya pembayaran diluar upah dan gaji serta berbagai manfaat sampingan. Umumnya diberikan jasa-jasa tersebut antara lain bantuan pendidikan, bantuan keuangan, dan bantuan sosial.

Menurut Rivai (2011:741), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksana fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian.

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau

akan dilakukan. Menurut Rivai (2011:758) upah dapat didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Menurut Wibowo (2011), tunjangan adalah tambahan *benefit* yang ditawarkan perusahaan pada pekerjanya. Ada 2 macam tunjangan, tunjangan tetap dan tidak tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin per bulan yang besarnya relatif tetap, contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Sedangkan, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja, seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, insentif, biaya operasional. Menurut Torang (2013: 200) Ada dua tipe penghargaan, yaitu: penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah penghargaan yang diberikan berupa finansial, materil atau penghargaan sosial. Sedangkan penghargaan intrinsik adalah penghargaan yang diberikan berupa penghargaan psikis (*self-granted*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan design penelitian kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang Kesejahteraan Karyawan PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa atau perilaku yang dapat diamati. Alasan menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara

yang memerlukan jawaban secara deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diteliti sebagaimana adanya diikuti dengan interpretasi secara rasional berbagai temuan dilapangan sekaligus menganalisis semua keadaan di lokasi penelitian.

Fokus penelitian ini adalah kesejahteraan karyawan PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara. Adapun yang menjadi indikator adalah sumber daya manusia, koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, sistem layanan yang dipergunakan di perpustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan besarnya jumlah informan tidak ada ukuran yang mutlak. Informan dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sebagai sampling bertujuan (*purposive sampling*) dan yang menjadi informan adalah sebagai pekerja *white collar* dan *blue collar* di PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara yang berjumlah 24 orang yang terdiri dari pimpinan, General Manajer, supervisor, forman, dan karyawan harian, bulanan, dan borongan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesejahteraan karyawan PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara. Wawancara mendalam merupakan percakapan antara peneliti dengan informan yang berada pada PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara, dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan guna mendapatkan informasi baik verbal maupun nonverbal. Studi literatur (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menggunakan reduksi data yang dilakukan dengan meringkas data kualitatif dengan berbagai bentuknya, reduksi data disini termasuk proses

pemilihan, penyederhanaan, abstraksi serta transformasi data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Display data, kumpulan informasi yang terorganisasikan. Tampilan data ini biasanya dalam bentuk teks naratif, matrik, tabel atau bagan. Tahap analisis Data diakhiri dengan pembuatan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Upah Tenaga Kerja/Karyawan

Pendapatan atau upah harian/bulanan pekerja/karyawan yang diberlakukan oleh PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang bekerja sama dengan perusahaan dimana upah mereka ditetapkan sebesar Rp. 1.900.000/ 25 hari kerja atau sebesar Rp. 76.000/ hari.

Standar pengupahan dan penggajian pada dasarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena prosedur pengupahan ataupun penggajian itu berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterapkan pada tenaga kerja harian dan bulanan sebesar Rp. 1.900.000/ 25 hari kerja atau sebesar Rp. 76.000/ hari kerja. Pertama, untuk pekerja yang memiliki jabatan tertentu seperti manajer, supervisor, dan forman/pengawas maupun harian, yakni: untuk manajer gaji pokoknya ialah sebesar Rp. 4.000.000 ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp.1.000.000 jika dijumlahkan menghasilkan Rp.5.000.000/ bulan.

Kedua, untuk supervisor dan forman/pengawas sebesar Rp.76.000 + Rp.200.000 atau Rp.1.900.000 + Rp.200.000 = Rp. 2.100.000 per bulan. Ketiga, untuk pekerja harian, upah mereka berdasarkan UMP yang ditentukan yakni sebesar Rp. 1.900.000. Berbeda dengan karyawan borongan biasanya upah yang mereka dapatkan melebihi UMP, karena jika pemborong sheller dan perer mengupas kulit maupun tempurung kelapa melebihi target 2.400, maka upah borongan mereka akan melebihi UMP.

2. Kesejahteraan Tenaga Kerja

Mengenai jaminan sosial tenaga kerja atau kesejahteraan tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam penelitian ini, beberapa pelayanan kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh PT. Royal Coconut belum baik seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Tenaga Kerja tersebut, karena fasilitas yang disediakan oleh perusahaan yang masih terbatas untuk karyawan. Adapun fasilitas yang hanya tersedia yakni pelayanan keluarga berencana, fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan kesehatan. Itupun fasilitas kesehatan yang diberikan cenderung masih terbatas mengingat perusahaan tersebut masih dalam sistem kontrak atau segala asset yang ada dalam perusahaan tersebut masih dalam sistem kontrak.

Adapun ruang lingkup pengaturan jaminan sosial bagi tenaga kerja/karyawan PT. Royal Coconut meliputi:

- a) Jaminan Kecelakaan Kerja
- b) Jaminan Kematian
- c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dalam penelitian ini. peneliti menemukan beberapa permasalahan pokok di bidang ketenagakerjaan di perusahaan tersebut dimana jaminan kesehatan dan keselamatan yang kurang begitu diperhatikan oleh PT. Royal Coconut dimana beberapa karyawan mengeluhkan masalah perlindungan keselamatan atau risiko karyawan dalam bekerja khususnya karyawan perer dan sheller yang merupakan karyawan *blue collar* dimana pekerjaan mereka membutuhkan skill yang cukup baik dan pekerjaan tersebut sangat berisiko karena mereka mengupas kulit tempurung menggunakan pisau tajam dan harus mengerjakannya dengan cepat guna mencapai target pengupasan sebanyak 2400 buah kelapa. Adapun masalah lainnya yakni masalah fasilitas kesehatan yang belum memadai atau dengan kata lain persediaan obat-obatan bagi karyawan yang sakit masih sangat minim sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan tersebut belum begitu baik.

Belum lagi pelayanan kesehatan hanya diberlakukan untuk karyawan itu sendiri, tidak diberlakukan untuk keluarga karyawan. Hal tersebut membuat produktivitas kerja para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut menurun. Tetapi karena tuntutan ekonomi mereka tetap bekerja di perusahaan tersebut demi menopang kesejahteraan hidup keluarga mereka.

Perlindungan sosial tenaga kerja dan perlindungan teknik tenaga kerja merupakan bagian dari kesejahteraan karyawan yang diperhatikan oleh perusahaan PT. Royal Coconut dalam rangka pemenuhan kebutuhan karyawan beserta keluarganya karena pada dasarnya para karyawan mempunyai berbagai macam kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

3. Program Kesejahteraan Karyawan

Adapun program kesejahteraan yang diberlakukan di PT. Royal Coconut dilihat dari segi ekonomis, fasilitas, dan pelayanan, sebagai berikut:

Dalam penelitian ini beberapa program kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh PT. Royal Coconut belum begitu baik seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, karena fasilitas yang disediakan oleh perusahaan yang masih terbatas untuk karyawan. Adapun fasilitas yang hanya tersedia yakni pelayanan keluarga berencana, fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan kesehatan. Itupun fasilitas kesehatan yang diberikan cenderung masih terbatas mengingat perusahaan tersebut masih dalam sistem kontrak atau segala asset yang ada dalam perusahaan tersebut masih dalam sistem kontrak.

Pelayanan kesehatan yang diberikan sangat terbatas walaupun sudah disediakan klinik kesehatan gratis dan suster, tetapi persediaan obat-obatan sangat terbatas. Para karyawan mengeluhkan bahwa pemberian jaminan kesehatan (Jamsostek) yang beralih menjadi BPJS itu merata dan belum begitu jelas karena program pemerintah tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu beberapa bentuk pelayanan kesejahteraan karyawan yang belum diberlakukan diantaranya mobil jemputan, penitipan bayi, bantuan hukum, penasehat keuangan, asuransi, dan kredit rumah, bantuan dana pendidikan, uang makan, dan uang transportasi. Hal tersebut sangat

diharapkan oleh karyawan PT. Royal Coconut untuk segera diberlakukan guna meningkatkan produktivitas kerja mereka serta pemenuhan kebutuhan maupun peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Royal Coconut Kabupaten Minahasa Utara, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa belum baiknya kesejahteraan karyawan disebabkan karena PT. Royal Coconut belum memberlakukan pelayanan kesejahteraan karyawan secara maksimal ditinjau dari segi ekonomis, fasilitas, maupun pelayanan kesejahteraan. Upah yang diperoleh oleh karyawan PT. Royal Coconut seperti karyawan harian dan bulanan pada dasarnya sudah sesuai dengan standar UMP (Upah Minimum Provinsi). Tetapi berbeda dengan karyawan borongan seperti karyawan sheller (karyawan laki-laki di bagian kupas tempurung) dan perer (karyawan perempuan di bagian kupas kulit halus tempurung), upah mereka dapat melebihi UMP dan hal ini berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan mereka.

Adapun kesejahteraan karyawan dalam bentuk tunjangan-tunjangan seperti: tunjangan pensiun, tunjangan dana pendidikan, asuransi, tunjangan uang transport, tunjangan uang makan, dan koperasi merupakan hal-hal yang tidak diberlakukan oleh PT. Royal Coconut. Pemberian kesejahteraan kepada karyawan PT. Royal Coconut masih sangat minim, padahal sudah tertera dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa “untuk meningkatkan kesejahteraan bagi buruh/karyawan dan keluarganya, pengusaha wajib memberikan fasilitas kesejahteraan.

Dari simpulan yang ada, maka disarankan untuk dapat memperhatikan kembali hal-hal yang menyangkut dengan program kesejahteraan karyawan guna meningkatkan produktivitas, motivasi, dan pemenuhan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Serta dapat memperhatikan kembali mengenai kejelasan program BPJS Ketenagakerjaan, memberikan pelayanan klinik kesehatan gratis seperti pengadaan obat-obatan yang memadai untuk karyawan serta pengadaan tenaga medis di klinik kesehatan gratis seperti

dokter dan suster pada jam kerja karyawan, mengganti atau menambah fasilitas kerja seperti mengganti mesin-mesin yang rusak dengan mesin-mesin baru sehingga memberikan kenyamanan dan gairah kerja karyawan dalam bekerja dan memberlakukan tunjangan pendidikan, tunjangan uang makan, uang transport, asuransi dan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malaya. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori dan Praktik, Edisi 2 Cetakan 4*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian.Sondang P. 2003.*Manajemen Sumber Daya Mannusia*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Torang Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (perilaku, struktur, budaya dan perubahan organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Faktor – Faktor Penciri Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia Kerja Terdidik Di Sulawesi Utara

Oleh :

Carlos Erickson¹⁷

Olly Esry H. Laoh¹⁸

Wiske Rotinsulu¹⁹

E-mail : erickcarlos@yahoo.com

Abstract

This study aims to peel identifier factors of employment status on the educated working age population in North Sulawesi. Moreover, in this paper also calculated the deficit of decent work opportunities in North Sulawesi in 2015. Sources of key data used in the analysis and calculations using secondary data Sakernas 2013. Methods of analysis using multinomial logistic regression.

Processing results obtained three significant variables: age, number of household members who work, and gender. Logistic regression models were obtained form 68.6% concordance rate. For a decent amount of work that needs to be created at least 107 thousands between 2012 and 2015 or 35 thousands per year, if the target of 6.62% poverty rate and unemployment rate of 3.94% in 2015 to be achieved. The study recommends further research by incorporating several new variables among household income. Government needs to empower the productive population and women. Other decent employment targets also need to be developed such as a decrease in youth unemployment.

Keywords: Labor, Population of Working Age.

PENDAHULUAN

Penduduk usia kerja merupakan sumber daya layak yang harus berperan penting dalam pembangunan. Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. PUK berdasarkan status ketenagakerjaan dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Angkatan Kerja terdiri mereka yang bekerja (*employed*) dan mereka tidak bekerja dan mencari pekerjaan (*unemployed*).

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kota Manado

¹⁸ Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

¹⁹ Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

2. Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya (penduduk usia lanjut, cacat, dsb).

Penduduk usia kerja terdidik merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Penduduk usia kerja terdidik seharusnya aktif dalam ketenagakerjaan, baik berstatus karyawan atau membuka lapangan usaha baru dan sedikit mungkin sebagai pengangguran. Rendahnya partisipasi angkatan kerja yang terjadi pada kelompok ini akan menyebabkan pemborosan sumber daya yang potensial.

Preferensi status ketenagakerjaan pada penduduk usia kerja terdidik bisa dipengaruhi banyak faktor. Jika faktor-faktor ini bisa diketahui, maka pemerintah bisa melakukan sebuah upaya strategi pengurangan jumlah pengangguran pada kelompok ini. Pola penanganan masalah ketenagakerjaan haruslah dipadukan dengan semangat otonomi daerah, di mana untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

Beberapa karakteristik yang menjadi hipotesis penciri pada penduduk usia kerja terdidik di Sulawesi Utara, yaitu:

1. Umur individu sangat menentukan keputusan seseorang dalam mengambil peluang kerja atau menundanya hingga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menurut persepsi dirinya.
2. Jumlah anggota rumahtangga diperkirakan turut berkontribusi dalam pengambilan keputusan seseorang untuk bekerja.
3. Banyaknya anggota rumahtangga yang bekerja akan mempengaruhi tingkat pendapatan rumahtangga. Adanya dukungan akan kebutuhan finansial, membuat penganggur terdidik pada rumahtangga ini bertahan pada kondisinya hingga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasinya.
4. Perbedaan gender masih berpengaruh pada ketenagakerjaan mikro (rumahtangga) baik disebabkan oleh budaya maupun pemikiran setempat.
5. Faktor hubungan fisiologis antara anak dengan orangtua sangat kentara pada sebagian rumahtangga di Sulawesi Utara.

6. Status perkawinan mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi pada kegiatan ekonomi.
7. Pencari kerja di daerah perkotaan cenderung mempunyai kemudahan akses ke media informasi, di samping itu dinamika sosial ekonomi perkotaan juga lebih tinggi dari daerah perdesaan.
8. Semakin jauh dari ibu kota provinsi, maka kesempatan individu untuk mendapatkan akses kesempatan kerja akan semakin kecil dan mempengaruhi keputusan individu dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu tantangan besar lain di Sulawesi Utara adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak (*decent work*) bagi angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat karena perubahan struktur umur penduduk dan peningkatan karakteristik pendidikan. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus: penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja, dan peningkatan produktifitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*). Masalah ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah guna mencapai tingkat kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2015 sesuai target RPJMD Sulawesi Utara dan MDGs. Cakupan lapangan kerja yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah lapangan kerja dari seluruh lapisan pendidikan dan tidak terbatas pada kalangan terdidik saja karena keterbatasan data yang ada.

Definisi lapangan kerja layak/produktif dan lawannya – pekerja miskin dan pengangguran – menjadikan keterkaitan antara lapangan kerja layak dan pekerjaan yang produktif di satu sisi dan pengentasan kemiskinan di sisi lain secara sangat eksplisit.

Pekerja miskin didefinisikan sebagai orang yang bekerjadimana penghasilannya tidak memadai untuk mengangkat diri mereka dan tanggungannya keluar dari kemiskinan (ILO, 2012). Hal ini karena imbal balik (penghasilan) atas kerja yang mereka lakukan terlalu rendah (yang biasanya dihubungkan dengan tingkat produktivitas yang rendah) dan/atau karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang cukup banyak dan ingin bekerja lebih banyak lagi.

Lapangan kerja produktif, sebaliknya, didefinisikan sebagai kesempatan kerja yang menghasilkan imbal balik yang memadai kepada pekerja guna memungkinkan tingkat konsumsi pekerja dan tanggungannya di atas garis kemiskinan.

Defisit kesempatan kerja layak terdiri dari mereka yang berada dalam angkatan kerja namun tidak memiliki lapangan kerja produktif. Hal ini memiliki dua bentuk: pekerja miskin dan pengangguran. Bersama dengan mereka yang bekerja secara produktif, mereka merupakan total angkatan kerja (Gambar 1).

Pentingnya fokus pada defisit kesempatan kerja layak adalah bahwa banyak negara maju juga menghadapi defisit kesempatan kerja layak yang serius dalam bentuk tingginya tingkat pengangguran dan juga, tingginya tingkat pengangguran kaum muda. Di negara-negara dengan sistem perlindungan sosial yang maju, kurangnya lapangan kerja produktif cenderung mengambil bentuk pengangguran daripada pekerja miskin. Kedua-duanya merupakan bentuk dari kurangnya lapangan kerja produktif, walaupun respon terhadap mereka yang terkena dampaknya bergantung pada kondisi ekonomi dan faktor-faktor kelembagaan.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Menentukan faktor-faktor penciri yang dapat membedakan status ketenagakerjaan pada penduduk usia kerja terdidik di Sulawesi Utara.
2. Menentukan model penciri status ketenagakerjaan pada penduduk usia kerja terdidik di Sulawesi Utara.
3. Memperkirakan defisit kesempatan kerja layak pada tahun 2015 di Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan (Juni – November 2014). Data yang digunakan dalam studi ini ialah data sekunder. Data sekunder utama diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan dari berbagai sumber termasuk data yang telah dirilis BPS. Periode data Sakernas yang dipilih pada penelitian ini ialah data pada

bulan Agustus (Triwulan III), karena merupakan pertengahan tahun dan dipandang dapat mewakili situasi tahun berjalan. Unit analisis sebagai obyek penelitian yang digunakan ialah individu dengan karakteristik umur lebih besar atau sama dengan 15 tahun (usia kerja) dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan lebih tinggi dari SMA pada rumah tangga sampel di Sulawesi Utara. Total kasus yang memenuhi kriteria sebanyak 857 orang dan akan diambil sampel penelitian secara acak sebesar 102 orang terbagi atas individu dengan status ketenagakerjaan Bekerja (34 orang), Pengangguran (34 orang) dan BAK (34 orang). Hasil penyaringan pada data penelitian menunjukkan rentang umur PUK terdidik yang tercakup ialah 21 – 72 tahun dengan ijazah pendidikan D-1 hingga S3 ke atas.

Status ketenagakerjaan PUK terdidik dibedakan dalam tiga kategori, yaitu sebagai (1) kelompok penduduk yang kegiatan utamanya bekerja, (2) sebagai penganggur maupun sebagai (3) Bukan Angkatan Kerja (BAK) seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya. Melekatnya status tersebut pada setiap diri individu tidak terlepas dari beberapa karakteristik yang melatarbelakanginya. Karakteristik tersebut diantaranya:

1. Karakteristik individu: umur, jenis kelamin, hubungan dengan kepala rumah tangga, status perkawinan;
2. Karakteristik rumah tangga: jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja;
3. Karakteristik regional: daerah tempat tinggal (perkotaan/pedesaan), wilayah tempat tinggal.

Metode Analisis Data yang digunakan pertama Analisis deskriptif bersifat eksploratif dan menyajikan rangkuman statistik, indikator ketenagakerjaan, analisis tabel silang dan analisis gambar atau grafik dan kedua Analisis Regresi Logistik Multinomial. Regresi logistik multinomial merupakan suatu model analisis yang memfokuskan pengaruh sekumpulan variabel penjelas yang saling bebas terhadap satu variabel respons. Regresi logistik multinomial digunakan apabila variabel respon bersifat nominal (data kategori yang tidak bisa diurutkan).

Suatu variabel respon dengan tiga kategori akan membentuk tiga model persamaan logit. Model pertama sebagai model pivot bernilai nol. Model ke dua dan ke tiga membentuk regresi logistik biner yang membandingkan suatu kelompok kategori terhadap referensi/pivot, dengan persamaan lengkap sebagai berikut:

$$g_0(x) = 0 \dots\dots\dots (1)$$

$$g_1(x) = \ln \frac{P(Y=1|x)}{P(Y=0|x)} = \ln \frac{\mu_1(x)}{\mu_0(x)} = \beta_{10} + \beta_{11}x_1 + \dots + \beta_{1p}x_p \dots\dots\dots (2)$$

$$g_2(x) = \ln \frac{P(Y=2|x)}{P(Y=0|x)} = \ln \frac{\mu_2(x)}{\mu_0(x)} = \beta_{20} + \beta_{21}x_1 + \dots + \beta_{2p}x_p \dots\dots\dots (3)$$

Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi logistik multinomial adalah:

1. Melakukan pengujian parameter secara simultan untuk mengetahui kecocokan model analisis tersebut.
2. Melakukan pengujian parameter secara parsial untuk mengetahui variabel bebas yang paling berpengaruh dalam model tersebut.
3. Melakukan pemeriksaan data *outlier* dan berpengaruh.
4. Melakukan validasi model.
5. Melakukan interpretasi terhadap nilai rasio kecenderungan dan model yang terbentuk.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur ketenagakerjaan pada 2011-2013 tidak banyak mengalami perubahan. Penduduk yang termasuk angkatan kerja lebih banyak dibanding yang termasuk bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja, penduduk yang bekerja lebih banyak dibandingkan yang menganggur. Untuk bukan angkatan kerja, penduduk yang mengurus rumah tangga merupakan yang terbanyak, kemudian sekolah dan lainnya.

Daerah perkotaan masih menjadi kantong pengangguran ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,17% dibandingkan pedesaan yang 5,40%. Secara absolut jumlah pengangguran di perkotaan sekitar 38ribu orang dan di pedesaan sekitar 29ribu orang.

Sektor pertanian tetap mendominasi lapangan pekerjaan utama penduduk di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sekitar 34 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Sektor lain yang banyak menyerap tenaga kerja ialah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (20 persen) dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (19 persen). Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ialah 102 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah variabel bebas sebanyak 8, berarti rasionya ialah 12,75:1. Rasio ini melebihi saran Hosmer *et al* (2013), agar jumlah kasus minimum untuk tiap variabel bebas ialah 10.

Faktor-faktor yang menjadi hipotesis penciri status ketenagakerjaan Penduduk Usia Kerja Terdidik di Sulawesi Utara sebanyak 8, yaitu: Umur, Jenis Kelamin, Jumlah Anggota Rumah Tangga, Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja, Hubungan dengan KRT, Status Perkawinan, Daerah dan Wilayah. Berdasarkan hasil pengolahan regresi logistik multinomial, 4 faktor terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap model, 1 faktor mengandung multikolinieritas dan 3 faktor terbukti berpengaruh signifikan terhadap model.

Model yang dihasilkan ialah:

$$G_0(x) = 0 \dots\dots\dots (4)$$

$$G_1(x) = 10,191 - 0,234 \text{ UMUR} - 1,306 \text{ JML_ART_KER} - 0,218 \text{ D}_{JK=0} \dots\dots\dots (5)$$

$$G_2(x) = 2,062 - 0,019 \text{ UMUR} - 1,220 \text{ JML_ART_KER} + 1,231 \text{ D}_{JK=0} \dots\dots\dots (6)$$

dengan:

UMUR	=	umur
JML_ART_KER	=	jumlah ART yang bekerja
D _{JK=0}	=	jenis kelamin perempuan (1=ya; 0=tidak)
G ₀ (x)	=	model untuk kelompok bekerja
G ₁ (x)	=	model untuk kelompok pengangguran
G ₂ (x)	=	model untuk kelompok BAK

Model regresi logistik multinomial yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi klasifikasi sebesar 68,6%. Meskipun akurasi tersebut dipandang memadai namun perlu dilakukan validasi untuk memastikan kualitas model yang dihasilkan. Validasi ini akan digunakan dengan mengolah 80% data yang ditetapkan menjadi sampel master dan 20% data yang ditetapkan sebagai sampel ujicoba. Hasil uji

regresi logistik multinomial pada sampel master didapatkan akurasi sebesar 75,6% dan model yang dihasilkan mirip dengan model *full data*. Model yang didapatkan dari sampel master kemudian diterapkan pada sampel ujicoba secara manual dan didapatkan ketepatan akurasi antara prediksi dan observasi sebesar 80,0%. Kriteria model valid ialah tingkat akurasi pada sampel ujicoba tidak lebih kecil 10% dari tingkat akurasi pada sampel master. Hasilnya tingkat akurasi sampel ujicoba justru lebih besar dari sampel master. Hal ini menunjukkan bahwa model penciri ini bisa diandalkan dalam melakukan pencirian status ketenagakerjaan penduduk usia kerja terdidik di Sulawesi Utara.

1. Faktor-faktor Penciri Status Ketenagakerjaan

Faktor-faktor yang tidak signifikan berpengaruh terhadap faktor Status Ketenagakerjaan ialah:

- a. Jumlah ART. Hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga bisa mempengaruhi keputusan seseorang dalam status ketenagakerjaan ternyata tidak terbukti. Faktor ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan individu akibat pendapatan keluarga masih mampu mencukupi kebutuhan konsumsi mereka. Faktor ketahanan finansial keluarga lebih penting daripada beban tanggungan keluarga.
- b. Status Perkawinan. PUK dengan status perkawinan tertentu seharusnya bisa mengambil keputusan status ketenagakerjaan tertentu pula. Berdasarkan hasil pengolahan diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara PUK dengan status Kawin dan Belum Kawin/Cerai Hidup/Mati. Status perkawinan tidak menjadi keputusan ekonomi karena umumnya di Sulawesi Utara faktor dukungan sosial yang besar, baik dari orang tua, keluarga besar dan lingkungan masih sangat berpengaruh. Banyak beberapa kasus ditemukan bahwa meskipun individu tersebut sudah menikah namun masih menjadi tanggungan dari orang tuanya sehingga belum merasa perlu untuk bekerja.
- c. Daerah. PUK terdidik yang tinggal di perkotaan memiliki preferensi yang sama dengan yang di perdesaan. Faktor kemudahan mendapatkan informasi ketenagakerjaan dan kondisi sosial ekonomi yang dinamis pada perkotaan tidak memberikan pengaruh signifikan. Situasi ini dipengaruhi oleh penyerapan

tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor pertanian yang dominan di perdesaan dan kurang membutuhkan peranan informasi ketenagakerjaan canggih dan cukup dengan informasi antar penduduk.

- d. Wilayah. PUK terdidik yang tinggal di ibukota provinsi juga memiliki preferensi ketenagakerjaan yang sama dengan yang tinggal di kabupaten/kota dekat ibukota provinsi dan di kabupaten/kota jauh dari ibukota provinsi. Manado sebagai ibukota provinsi diharapkan menjadi magnet bagi para pencari kerja. Hasil pengolahan menunjukkan jarak tempat tinggal dengan ibukota provinsi justru tidak berpengaruh signifikan. Pembangunan yang meningkat di kabupaten/kota di luar Manado menjadikan pasar tenaga kerja daerah mulai banyak menyerap tenaga kerja lokal termasuk tenaga kerja terdidik. Hal ini menyebabkan tidak berbedanya preferensi PUK terdidik baik di Manado, kabupaten/kota dekat dari Manado dan kabupaten/kota jauh dari Manado.

Faktor yang mengandung multikolinieritas ialah Hubungan dengan KRT. Hubungan dengan KRT memiliki hubungan yang kuat dengan faktor Jenis Kelamin. Dominasi pencari nafkah berjenis kelamin laki-laki dan tanggungan keluarga berjenis kelamin perempuan menyebabkan hubungan kedua faktor ini cukup kuat. Hasil pengolahan menunjukkan variabel Hubungan dengan KRT dipengaruhi secara kuat oleh variabel Jenis Kelamin sehingga dikeluarkan dari model.

Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi variabel Status Ketenagakerjaan ialah:

- a. Umur. Umur memiliki pengaruh signifikan bagi individu dalam pengambilan keputusan. Semakin tua umur individu maka semakin tinggi peluangnya untuk terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi khususnya bekerja. Banyaknya penduduk yang memasuki usia produktif saat ini menuntut pemerintah lebih memperhatikan kelompok ini. Bonus demografi yang terjadi di provinsi ini menuntut anggaran yang selama ini lebih dominan ke sektor non produktif seperti pendidikan untuk mulai direalokasi ke sektor produktif seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan bantuan modal usaha. Banyak literatur yang menganjurkan agar pemerintah memanfaatkan masa-masa ini di mana

tenaga produktif tersedia cukup berlimpah dan dapat di dayagunakan demi kesejahteraan bangsa.

- b. Jumlah ART yang bekerja. Hasil pengolahan menunjukkan semakin banyak ART yang bekerja mempengaruhi seseorang untuk ikut bekerja. Faktor ekonomi dan gaya hidup yang didapat orang dari bekerja menyebabkan anggota rumah tangga lain tertarik untuk ikut bekerja. Informasi pekerjaan umumnya lebih cepat di dapat melalui anggota rumah tangga lain yang bekerja ataupun jaringan sosial yang lebih luas. Untuk mengantisipasi terus melonjaknya penawaran tenaga kerja, pemerintah harus lebih menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja melalui kebijakan-kebijakan yang *pro-job*, *pro-growth* dan *pro-poor*. Tantangan yang semakin berat ketika era Masyarakat Ekonomi Asean akan diberlakukan pada 2015 di mana akan semakin banyak tenaga kerja ASEAN yang masuk ke provinsi ini khususnya tenaga-tenaga kerja terdidik.
- c. Jenis Kelamin. Stigma laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan yang mengurus rumah tangga tercermin dari hasil pengolahan. Jenis kelamin terbukti signifikan dalam penentuan status ketenagakerjaan pada PUK terdidik di Sulawesi Utara. Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan perempuan pada kelompok ini terutama yang sudah berumah tangga agar bisa lebih aktif dalam ekonomi meskipun bekerja dari rumah tanpa harus meninggalkan identitas mereka sebagai ibu rumah tangga. Saat ini sudah banyak peluang pekerjaan yang bisa dilakukan perempuan dari rumah, seperti *catering*, warung kelontong, warung makan, konsultan, industri kreatif, penjualan *online* dan sebagainya.

Perbandingan preferensi individu atas status Pengangguran atau Bekerja dijelaskan melalui model $G_1(x)$ dengan *Odds Ratio* ($exp(\beta)$) dan tingkat signifikansi parameternya:

- a. PUK terdidik dengan umur semakin tua, maka peluangnya untuk menjadi pengangguran akan semakin kecil dibandingkan bekerja. Setiap peningkatan umur, kemungkinan PUK berstatus pengangguran turun 20,9 % (OR = 0,791 dan sig. 0,000 < 0,1).

- b. PUK terdidik dengan semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja, maka peluangnya untuk menjadi pengangguran akan semakin kecil dibanding bekerja. Setiap peningkatan jumlah ART bekerja, kemungkinan untuk berstatus pengangguran turun 72,9% (OR = 0,271 dan sig. 0,001 < 0,1).

Perbandingan preferensi individu atas status Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau Bekerja dijelaskan melalui model $G_2(x)$ dengan *Odds Ratio* ($exp(\beta)$) dan tingkat signifikansi parameternya:

- a. PUK terdidik dengan semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja, maka peluangnya untuk menjadi BAK akan semakin kecil dibanding bekerja. Setiap peningkatan jumlah ART bekerja, kemungkinan untuk berstatus BAK turun 70,5% (OR = 0,295 dan sig. 0,001 < 0,1).
- b. PUK terdidik dengan jenis kelamin perempuan, peluang untuk menjadi BAK lebih besar dibanding bekerja. Peluang PUK terdidik dengan jenis kelamin perempuan berstatus BAK 2 kali lipat lebih besar daripada status bekerja (OR = 3,426 dan sig. 0,033 < 0,1).

2. Proyeksi Defisit Kesempatan Kerja Layakdi Sulawesi Utara Tahun 2015

Tantangan-tantangan dalam mengurangi defisit kesempatan kerja layak di Sulawesi Utara haruslah diukur dengan mempertimbangkan konteks angkatan kerja yang tumbuh. Proyeksi pertumbuhan angkatan kerja dan kebutuhan untuk menciptakan kesempatan kerja perlu dihitung sehingga dapat memberikan gambaran kuantitatif terhadap tantangan dalam memenuhi target pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran yang telah ditetapkan tingkat regional pada tahun 2010 untuk tahun 2015.

Proyeksi yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan layak yang perlu ditingkatkan adalah setidaknya 107 ribu antara tahun 2012 dan 2015, apabila target untuk menurunkan kemiskinan menjadi 6,62% dan tingkat pengangguran menjadi 3,94% pada tahun 2015 hendak dicapai. Peningkatan ini mencakup para pendatang baru dalam angkatan kerja (67 ribu), mereka yang perlu dialihkan dari pengangguran sehingga memperoleh pekerjaan (37 ribu) dan mereka yang perlu pindah dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi (2.886). Dengan kata lain,

hampir 104 ribu pekerjaan perlu diciptakan dan setidaknya 2.886 pekerjaan harus diperbaharui dalam hal produktivitasnya atau diganti dengan pekerjaan lain guna mencapai target-target ini (lihat Gambar 2 dan 3).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status ketenagakerjaan pada penduduk usia kerja terdidik dipengaruhi oleh umur individu, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, dan jenis kelamin.
2. Model penciri status ketenagakerjaan pada PUK terdidik yang terbentuk sebanyak tigamodel, yaitu model untuk penciri Pengangguran dan Bukan Angkatan kerja yang akan dibandingkan dengan Bekerja sebagai model referensi. Model inidigunakan untuk melakukan prediksi status ketenagakerjaan pada penduduk usia kerja terdidik dengan membentuk tingkat akurasi klasifikasi sebesar 68,6%;
3. Jumlah pekerjaan layak yang perlu ditingkatkan adalah setidaknya 107 ribu antara tahun 2012 dan 2015, apabila target untuk menurunkan kemiskinan menjadi 6,62% dan tingkat pengangguran menjadi 3,94% pada tahun 2015 hendak dicapai.

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun tingkat akurasi klasifikasi sudah memadai(68,6 %) namun bila didukung koefisien determinan semu yang tinggi tentu akan lebih baik. Nilai *Pseudo R-squared* pada Nagelkerke sebesar 61,2%, yang berarti masih ada sekitar 38,8% variasi dari model yang belum terjelaskan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya kajian atau penelitian berikutnya dengan memasukkan variabel bebas lainnya yang relevan. Beberapa contoh variabel yang perlu dipertimbangkan ialah: pendapatan rumah tangga, rasio ketergantungan dalam rumah tangga, bantuan dari pemerintah, komposisi usia dalam rumah tangga, dan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam rumah tangga.
2. Faktor-faktor penciri yang ditemukan kiranya bisa menjadi dasar kebijakan pemerintah yang *pro-job* melalui pemberdayaan usia produktif dengan alokasi

- anggaran untuk kelompok ini yang lebih ditingkatkan, penciptaan lapangan pekerjaan baru, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan.
3. Penurunan jumlah pekerja miskin dan penciptaan lapangan kerja baru harus menjadi fokus strategi pembangunan di tahun-tahun mendatang. Setidaknya 35 ribu pekerjaan baru per tahunnya perlu diciptakan pada tahun 2012-2015 guna mencapai target pengangguran 3,94 persen dan kemiskinan 6,62 persen. Harapan ke depan, target-target lapangan kerja layak tersebut perlu dilengkapi dengan target-target ketenagakerjaan lainnya, seperti penurunan pengangguran kaum muda, penurunan pengangguran terdidik, pekerjaan yang rentan atau peningkatan tingkat kesempatan kerja.
 4. Hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2001. *Kualitas Pertumbuhan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- . 2006. *Analisis Pengangguran Terdidik*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- . 2008. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2008. Kemajuan dan jalan menuju pembangunan padat karya*. Kantor ILO Jakarta dan Timor Leste. Jakarta.
- . 2011. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2010*. BPS Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- _____. 2012. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2011*. BPS Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- . 2012. *Memahami defisit kesempatan kerja produktif dan menetapkan target: Panduan metodologi*. ILO. Jenewa.
- . 2012. *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. McKinsey Global Institute, Jakarta.

- . 2013. *Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan*. Bappenas, Jakarta.
- _____. 2013. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2012*. BPS Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- _. 2014. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2013*. BPS Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
- . 2014. *Tinjauan Kompas Menatap Indonesia 2014, Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____. 2014. *Key Indicators of The Labour Market, Eight edition*. ILO. Jenewa.
- . Multinomial Logistic Regression: Basic Relationships. Diakses 2 Juni 2014 dari www.utexas.edu/.../MultinomialLogisticRegression_BasicRelationships.
- . Multinomial Logistic Regression: Complete Problems. Diakses 2 Juni 2014 dari www.utexas.edu/.../SolvingProblems/MultiLogisticRegression_CompleteProblems.
- Boediono. 1993. *Ekonomi Makro*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Chow, Gregory C. 2011. *Memahami dahsyatnya Ekonomi China*. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.
- Handayani, Titik dan Laksmi Rachmawati. 1996. Pengangguran Pemuda Terdidik di Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Timor Timur. Disampaikan dalam Prosiding Membangun Manusia Berkualitas di Kawasan Timur Indonesia: Menghadapi Era Globalisasi. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI. Jakarta.
- Hosmer, David W, Stanley Lemeshow & Rodney X. Sturdivant. 2013. *Applied Logistic Regression, Third Edition*. John Wiley & Sons Inc, New Jersey.
- Jhingan, ML. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Laoh, Esri. 2010. Buku Ajar Ekonomi Pembangunan. Diktat Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Newbold, Paul; William L. Carlson, dan Betty Thorne. 2003. *Statistics For Bussiness and Economics. Fifth Edition.* Pearson Education International, New Jersey.
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan A. R. Karseno. 2008. *Ekonomi Perkotaan Edisi 4.* BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Setiawan, Satrio Adi. 2010. Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja dan Jenis Kelamin Terhadap Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Magelang. Skripsi Falkultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 101 hal.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua Cetakan 11.* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sulaiman, Wahid. 2005. *Statistik Non Parametrik, Contoh Kasus dan Pemecahannya dengan SPSS.* Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sumarto, Agus Herta. 2010. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat.* PT. Indeks, Jakarta.
- Suparno, Eman. 2009. *Strategi Ketenagakerjaan Nasional. Sebuah Upaya Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif Global.* Jakarta, Kompas.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi.* PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan, Jilid 1.* Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wahyu R, Tri. 2011. Analisis Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Media Ekonomi dan Teknologi Informasi Vol. 17. Hal 27-48.

Peran adat istiadat dalam terbentuknya solidaritas sosial Suku Togutil di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur

Oleh

Arnel Marthen Lolo²⁰

Agustinus B. Pati²¹

Very Y. Londa²²

E-mail : arnelmarthen@yahoo.co.id

Abstract

Indigenous peoples Togutil tribe in East Halmahera, categorized primitive tribes but why can soidaritas well maintained compared to modern society in identical scientific community. This study used a qualitative descriptive method. This study aims to describe and understand the behavior patterns of public interest as it is in the context Togutil intact so as to describe the properties Togutil public interest in life activities.

Based on the research results can be concluded that the customs of the strong role that social solidarity terbentuknya Togutil in the District of North Maba. For Togutil tribe who remained in the forest or in the three villages namely in Forest Tribe Togutil is keeping customs, strong solidarity with others around the settlement. So the authors suggest Togutil tribal communities in the District of North Freshmen need to keep the preservation of culture / customs and leave the lifestyle that can not accept social change. One of the negative impact is not open to other tribes so Communities for Parts Togutil always glued to the natural life.

Keywords: customs, social solidarity, community.

PENDAHULUAN

Memahami masyarakat adat terlihat dari karakter yang membatasi diri dan mengidentikan diri mereka sebagai sebuah kelompok kecil yang memiliki otoritas dalam menempati sebuah wilayah tertentu berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati secara konvensional sebagaimana yang dipahami oleh kelompok masyarakat tersebut. Begitupun halnya dengan masyarakat adat Suku *Togutil* yang ada di Halmahera Timur. Bila mendengar kata “**TOGUTIL**”, maka bayangan yang muncul dalam pikiran semua orang di Maluku Utara pada umumnya pasti akan tertuju pada komunitas suku terasing yang kejam, suka membunuh, hidup secara nomaden di pedalaman pulau Halmahera. Tapi mungkin lain halnya dengan

²⁰ Mahasiswa Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

²¹ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

²² Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

masyarakat di luar Provinsi Maluku Utara, misalnya orang-orang di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Papua. Nama suku *Togutil* mungkin baru kali ini didengarnya. Bagi orang Maluku Utara pada umumnya, kata “*Togutil*” sebagai sebuah istilah, itu identik dengan makna kata primitif, “keterbelakangan, jahat, ketertinggalan serta masih banyak lagi konotasi-konotasi yang bermakna serupa lainnya sebagaimana yang berkembang pada masyarakat umum.

Bila dilihat Solidaritas sosial masyarakat Suku *Togutil* yang ada di kecamatan Maba Utara kecenderungan kolektivitas dan ikatan kelompok primordial yang sangat kental dalam masyarakat tersebut. Kelompok sosial ini, khususnya primordial, lebih di anggap sebagai identitas masyarakat *Togutil* dan sebagai benteng perlindungan. Itu berarti, apa yang dialami oleh seorang anggota dialami pula oleh anggota lain. Semua anggota mempunyai kewajiban melindungi setiap anggota.

Fenomena yang menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa Suku *Togutil* yang ada di kecamatan Maba Utara terbagi dua tempat yaitu sebagian sudah tinggal di pesisir pantai atau *O” Dowongi Oka* dan ada masih tetap tinggal di Hutan atau *O” Honganoka*. Yang tinggal di pesisir pantai sudah dibentuk desa yaitu Desa Lili dan Desa Akelamo dan Waleino. Dari ketiga desa ini sudah mengenal dunia modernisasi tetapi adat istiadat selaku suku *Togutil* masih tetap dijaga dengan baik seperti halnya yang masih tinggal di hutan. Kerukunan antara suku *Togutil* yang tinggal di pesisir pantai dan dihutan terjalin dengan baik.

Sekalipun suku *Togutil* yang sudah membantuk Desa namun mereka lebih cenderung menghargai pada tokoh-tokoh agama/ misionaris, tokoh-tokoh adat dan kepala suku dibanding dengan pemerintah kecamatan bahkan Pemerintah Kabupaten. Suku *Togutil* sebelumnya mereka tinggal di hutan dan berpindah pindah tempat. Pada tahun 1992 Misionaris Amerika yang bernama Rev Kith bersama keluarga datang untuk menyebar luaskan injil di Suku-suku terasing dan salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Kecamatan Maba Utara. Selama beberapa tahun Rev Kith bersama keluarga dan salah seorang perjemahan menginjili, melayani Suku *Togutil* yang berhamburan dihutan sepanjang

Kecamatan Maba Utara. Selama beberapa tahun banyak masalah yang dihadapi oleh Rev Kith karena Suku *Togutil* sebagian pada saat itu masih memiliki sifat yang kasar dan juga Rev Kith belum menguasai bahasa dan adat istiadat, tetapi dengan berkat Tuhan sehingga pada 1995 telah disatukan menjadi satu dusun dan pada tahun 2012 ketiga desa tersebut telah diresmikan menjadi desa.

Masyarakat Suku *Togutil* yang ada di Desa Lili, Waleino dan Akelamo dan suku yang masih tinggal di hutan masih tetap satu adat-istiadat dan keunikan masih tetap sama. Salah satu keunikan suku *Togutil*, ini dari sejak anak bisa bicara sampai orang tua selalu menggunakan bahasa daerah mereka yaitu Tobelo modole dan salah satu keunikan yang menarik adalah dari sejak anak bisa berpergian ke kebun, ke desa-desa bahkan ke kota, itu diberikan tanda pengenal yaitu memakai gelang tangan yang dibuat dari rotan dan di pasang di sebelah lengan tangan kanan dan sebagian dipakai di pinggang itu bertanda sebagai anak-anak suku *Togutil* atau orang *Togutil*.

Sebagian yang masih memakai pakaian tradisional atau koteka/cawat lebih dikenal lagi bahasa daerah Tobelo yaitu *HABEBA/ VIHA*. Suku *Togutil* yang tinggal satu pemukiman itu disebut *O" Kapongo* atau *O" Gogogere moi*. Salah satu keunikan juga yang menarik dari suku *Togutil* adalah bila ada yang menemukan barang-barang milik orang lain maka itu harus di bawah ke Kepala Suku bagi yang masih tinggal di hutan, bagi yang sudah tinggal di pesisir atau di Desa barang tersebut dibawa kepada pimpinan Desa atau *O" Haeke* pimpinan desa/ Tokoh agama agar bisa disampaikan kepada warganya.

Adat istiadat yang membangun kerukunan terjalin sangat solid. Baik terhadap sesama sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan masyarakat suku *Togutil*. Norma sopan santun, gorong royong, kepercayaan kebiasaan atau adat yang tetap dijaga dan dikembangkan dari generasi ke generasi dan dijadikan adat sebagai aturan hidup masyarakat *Togutil*. Keberadaan hidup Masyarakat *Togutil* sangat menghargai Tokoh Adat, Kepala Suku, serta sangat melindungi alam/hutan sekitar. Akan tetapi suatu dampak yang kurang berkembang dengan adanya adat *Togutil* dimana tidak berkembangnya pembangunan serta perubahan sosial lain kearah hal – hal tradisional. Masyarakat kurang beradaptasi dengan pogram –

pogram pemerintah bahkan tidak taat kepada pemerintah. Demikian pula terlihat bahwa masyarakat *Togutil* kurang memiliki kesadaran dalam mengikuti perkembangan modernisasi.

KAJIAN PUSTAKA

Yang dimaksud dengan Adat Istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu negeri yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut pengejawatahan unjuk rasa seni budaya masyarakat, seperti acara-acara keramaian anak negeri, seperti pertunjukan randai, saluang, rabab, tari-tarian dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan, pengangkatan penghulu maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung. Adat istiadat semacam ini sangat tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Bila sedang panen baik biasanya megah meriah, begitu pula bila keadaan sebaliknya. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah (Martono, 2011).

Istilah adat istiadat sering terdengar dalam kehidupan kita, bahkan disadari atau tidak, kita sedikit banyak masih terikat oleh hukum tersebut. Pengertian adat istiadat adalah lembaga sosial yang terdapat di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Di Indonesia, masyarakat semacam itu terdapat terutama di pelosok-pelosok desa. Dalam pengertian yang lain adat istiadat adalah sistem norma yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun disebut tradisi. Warga masyarakat yang melanggar adat atau tradisi, pada umumnya akan dikenakan sanksi.

Dalam kaitannya dengan solidaritas social, kata ‘solidaritas’ yang sudah biasa kita pakai dalam komunikasi sehari-hari, diambil dari akar kata ‘solidare’ (Latin), artinya: memperkuat, mengukuhkan; meneguhkan, menegakkan. ‘Solidus’ (adj.) berarti: teguh, kuat, tegak, padat. Sedangkan kata ‘sosial’ dari akar kata ‘socius’ (Latin) artinya: teman, kawan, sahabat, sekutu. ‘Societas’ berarti:

persekutuan, ikatan, hubungan, masyarakat. Ungkapan ‘Solidaritas Sosial’, berdasarkan arti katanya, dapat dipahami sebagai daya-upaya manusia untuk dapat meneguhkan dan menguatkan orang lain, sesamanya, baik individu atau kelompok, secara khusus mereka yang lemah dan miskin. “Kemiskinan” di sini haruslah dipahami secara lebih luas. Tidak hanya ‘miskin harta dan uang’ yang mempersulit mereka untuk mengalami kehidupan yang lebih layak sebagai manusia, tetapi juga ‘miskin kasih sayang & perhatian’.

Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim (1858-1917) dalam mengembangkan teori sosiologi. Durkheim (dalam Johnson, 1988) menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar manusia sebagai satu komunitas masyarakat.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Penggunaan pikiran, naluri, perasaan, keinginan manusia memberi reaksi dan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Mac Iver (1937) pakar sosiologi politik pernah mengatakan:”Manusia adalah makhluk yang dijerat oleh jaring – jaring yang dirajutnya sendiri”. Jaring – jaring itu adalah kebudayaan. Mac Iver ingin mengatakan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat (*socially constructed*) tetapi pada gilirannya merupakan suatu kekuatan yang mengatur bahkan memaksa manusia untuk melakukan tindakan dengan “pola tertentu”.

Paul B. Horton & C. Hunt menegaskan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang

cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Sedangkan Karl Marx menganggap masyarakat adalah suatu struktur yang menderita karena suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Martodirdjo (1991:74) mengatakan tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan dan memahami pola perilaku suatu masyarakat sebagaimana adanya dalam konteks keutuhan atau satu kesatuan yang bulat. Merujuk kepada pendapat itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan dan memahami pola perilaku masyarakat *Togutil* sebagaimana adanya dalam konteks yang utuh. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat masyarakat *Togutil* dalam aktivitas kehidupannya, yang meliputi sistem pengetahuan, tata nilai, perilaku, sejarah, dan adat kebiasaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum Kecamatan Maba Utara adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara. Kecamatan Maba Utara berada di Kabupaten Halmahera Timur, secara geografinya memiliki kekayaan sumber daya alam berupa pertambangan nikel dan *legal logging* terbesar di Pulau Halmahera dan salah satu penunjang pembangunan di Propinsi Maluku Utara bahkan Negara, tetapi bila dilihat dari fakta-fakta bahwa Suku Primitif atau Suku *Togutil* yang mendominasi, masih berhamburan di hutan bahkan sudah memiliki tempat pemukiman menetap di pesisir pantai namun kehidupan sosial masyarakat Suku *Togutil* masih terisolasi dibanding dengan masyarakat suku-suku lain pada umumnya di Kabupaten Halmahera Timur .

Dari hasil penelitian penulis menemukan ada empat bentuk adat istiadat yang tetap bertahan sehingga tercipta solidaritas sosial masyarakat Suku *Togutil*, hal ini dari sejak para leluhur masyarakat Suku *Togutil* di Kecamatan Maba Utara, diantaranya: Bahasa, Kepercayaan, Tata Krama dan Gotong Royong

a. Bahasa/*Demo-demo*

Bahasa adalah alat komunikasi dan merupakan dasar dalam interaksi masyarakat Suku *Togutil*. Dalam komunikasi keseharian masyarakat Suku *Togutil* menggunakan komunikasi secara verbal maupun nonverbal, dalam komunikasi yang dibangun oleh masyarakat Suku *Togutil*, dimulai dari masa ke kanak-kanakan sampai pada orang dewasa digunakan adalah bahasa Tobelo boenge dan modole. Bahasa adalah salah satu bentuk alat pemersatu, memperkokoh hubungan secara emosional dan menunjukkan identitas sebagai Masyarakat Suku *Togutil*. Salah satu contoh bila bertemu di jalan, maka saling menyapa dengan ungkapan kata *Hobata*. Kata *hobata* menunjukkan pada seseorang maupun secara menyeluruh dan tidak memandang bulu. Makna kata *Hobata* berkonotasinya adalah ungkapan perasaan yang dalam, cinta kasih bahkan merasa bahagia sehingga tercipta solidaritas sosial Masyarakat Suku *Togutil*. Bukan hanya komunikasi verbal yang digunakan oleh masyarakat Suku *Togutil*, tetapi juga komunikasi nonverbal misalkan berpergian ke hutan atau di lahan pertanian dimana ada lokasi-lokasi tertentu diberikan tanda berupa bekas penampungan api, daun-daunan yang diselipkan di pohon dan diberikan tanda x pada pohon apa saja, dari ketiga makna menunjukkan bahwa memasuki lokasi perkebunan atau ke hutan tidak bisa dengan sembarangan. Ada yang menunjukkan bahwa di lokasi tersebut adalah lokasi yang berbahaya, misalkan ada ranjau/ *O" ode ma modoi*. untuk rusak dan babi, ada juga bermakna bahwa lahan hutan adalah tersebut milik seseorang, tidak bisa dengan sembarangan menebang hutan/pohon-pohon. Yang paling menarik lagi pada orang dewasa adalah bila berpergian ke hutan atau kesalah satu perkampungan masyarakat suku di Kecamatan Maba Utara, itu harus memakai tanda berupa gelang tangan atau *aro-aro*, gelang ini di buat dari rotan dan itu di pakai sebelah tangan kanan yang menjunkan identitas sebagai Suku *Togutil*.

b. Kepercayaan/ *O" ngongaku*

Kepercayaan masyarakat Suku *Togutil*, kepada alam adalah salah satu bentuk adat-istiadat yang ditinggalkan para leluhur didasarkan pada perasaan moral, kearifakan lokal dan kepercayaan yang dianut bersama sehingga

kepercayaan tersebut dijadikan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat Suku *Togutil*. Pengetahuan tradisioanal merupakan bentuk kepercayaan yang dianut bersama didasrakan pada fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat Suku *Togutil* secara turun-temurun. Misalkan daun-daun, akar, bermeditasi/ *imagumatere*, binatang seperti cicak, bila ada warga sakit, maka yang dianggap memiliki kemampuan supranatural bisa mengobati penyakit yang dideritanya, dengan cara mengambil daun-daun atau akar-akar yang dianggap dapat menyembukan penyakit, setelah diambil diproses sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Bermeditasi atau *Imagumatere*, Idu-idu adalah bentuk kepercayaan masyarakat Suku *Togutil*, dengan cara berbaring di tempat tidur menutupi dengan kain, irama, ketukan di tempat tidur sambil bercerita seakan-akan terjadi interaksi dengan para leluhur untuk meminta petunjuk penyakit apa yang dideritanya, obat apa yang harus dikonsumsi dan mengapa orang tersebut bisa diderita dengan penyakit. Beberapa menit kemudian suara orang yang bermeditasi sudah berubah, terdengar suara tidak seperti suara yang sebelumnya, suaranya sangat unik, berubah-ubah suaranya bisa suara seorang nenek maupun suara seorang kakek. Proses berlangsung selama 30-sampai 40 menit tergantung pada interaksi yang dibangun. Setelah proses selesai, maka orang tersebut menceritakan penyebab penyakitnya dan harus mengonsumsi daun-daun dan akar-akar yang layak digunakan, tetapi jika penyakit tersebut disebabkan ada pelanggaran moral terhadap seseorang maupaun pada keluarga, maka diharapkan untuk meminta maaf tidak perlu mengonsumsi obat-obat tradisional. Upacara ritual tersebut penulis sendiri pernah menyaksikan ketika penulis berumur 12 tahun dan itu kakek penulis sendiri yang melakukan ritual pengobatan. Pada tahun 1998 penulis menyaksikan lagi ritual pengobatan di pemukiman suku *Togutil* di Gau kecamatan Buli. Suku *Togutil*, yang masih tinggal di dalam hutan ini masih menggunakan pakaian seadanya. Mereka hanya menyulap kulit kayu atau daun-daun tertentu dijadikan cawat dan selanjutnya. Arti dari suara cicak bila warga berpergian ke hutan, kebun pada saat mau keluar dari rumah dan pada saat itu cicak bersuara sampai tiga kali, maka warga harus membatalkan kepergian mereka. Ada tiga bentuk makna dari suara cicak yakni yang pertama adalah keluarga dekat atau orang lain akan datang

kerumah, kedua adalah ada tanda-tanda fenomena alam seperti banjir dan yang ketiga adalah warga atau keluarga akan mengalami kedukaan.

Dari hasil penelitian penulis melihat bahwa pengetahuan tentang obat tradisional merupakan salah satu bidang terpenting dari Pengetahuan Tradisional bagi masyarakat Suku *Togutil*, didasarkan pada kepercayaan yang dianut bersama secara turun-temurun.

c. Tata Krama/ *O" Galipi Madotoro*

Masyarakat Suku *Togutil*, memiliki karekteristik yang unik dibanding dengan Suku-suku lain di Halmehera pada umumnya. Penulis melihat betapa hebatnya Tata Krama baik individu maupun secara bersama yang dibangun danditerjemahkan pada kehidupan sehari-hari. *O"Galipi madatoro*. Bagi masyarakat Suku *Togutil*, tata krama adalah nilai-nilai dari adat-istiadat, kepercayaan sehingga dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun bermasyarakat terlihat terjalin dengan baik. Dalam pemahaman bagi masyarakat Suku *Togutil*, bila tidak dimiliki tata krama baik pribadi maupun secara bersama, maka tidak bisa mempertahankan adat istiadat bahkan solidaritas sosial. *O" Galipi madotoro* datangnya dari hati nurani seseorang baik buruknya perilaku dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Suku *Togutil*.

d. Gotong royong/ *Imakiriwo*

Imakiriwo adalah satu bentuk adat istiadat yang merujuk pada kebiasaan saling tolong menolong pada pekerjaan yang di anggap perlu membantunya. Tradisi seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat Suku *Togutil* dengan bermacam bentuk antara lain:

1. Kerja sama untuk kepentingan bersama dengan kata lain bakti sosial (Baksos) di desa maupun di lahan perkebunan. Kerja sama dilahan perkebunan berkonotasi pada kebun jemaat maupun lahan perkebunan milik seseorang misalkan merombak hutan dan menamam padi.
2. Saling membantu sesama warga bila ada kedukaan, upacara perkawinan maupun membangun rumah.

Dari ke empat adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Suku *Togutil*, maka terlihat bahwa pedoman pola hidup masyarakat Suku *Togutil* yang di tatah

secara terstruktur dengan perasaan, moral dan kepercayaan yang dianggap baik bagi generasi-kegenarasi. Kuatnya peran adat istiadat sehingga tercipta solidaritas sosial masyarakat Suku *Togutil* sampai pada saat ini masih terjalin dengan baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa adat istiadat memegang peranan yang kuat pada kehidupan keseharian dalam bentuk gotong royong, tata krama, bahasa dan kepercayaan sehingga terbentuknya solidaritas sosial masyarakat Suku *Togutil* di Kecamatan Maba Utara. Bagi Suku *Togutil* yang masih berada di hutan maupun di pesisir tetap menjaga adat istiadat yang sama. Peran adat istiadat dalam terbentuknya solidaritas sosial Masyarakat Suku *Togutil* terlihat pada kehidupan sehari-hari yakni sistem kekerabatan, sistem kepercayaan dan agama.

Sistem kekerabatan merupakan sesuatu yang universal dalam proses pembentukan kelompok sosial di setiap masyarakat. Sistem ini pada dasarnya mengatur pola kemampuan dan dinamika kehidupan berdasarkan prinsip keturunan dan perkawinan. Sistem kekerabatan mengelompokkan masyarakat ke dalam sebuah referensi atau kerangka acuan dalam menentukan dengan siapa ego dapat berhubungan dan bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia mengadakan interaksi dengan lingkungannya melalui sistem budaya yang dimilikinya. Sistem budaya ini merupakan hasil pengolahan akal atau budi manusia sepanjang hidupnya dalam rangka mengembangkan perangkat keperluan hidupnya. Selanjutnya hasil pengembangan ini membuat manusia memiliki pola untuk berbagai aktivitas hidup yang menyangkut dirinya maupun orang lain.

Dilihat dari cara hidup sehari-hari, berpakaian maupun penataan rumah masih sangat sederhana dibanding dengan suku *Togutil* yang ada di desa Akelamo, disebabkan kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak terlalu memahami dengan kebersihan lingkungan rumah, bagaimana bisa pola hidup yang baik didalamnya adalah menata kebersihan disekitar lingkungan.

Salah satu alasan kenapa desa masyarakat desa lili tidak berkembang maju seperti masyarakat suku *Togutil* di Akelamo karena tidak mau membuka diri untuk masyarakat Luar. Dalam pandangan mereka bahwa tidak pantas bila dari luar yang memimpin mereka. Namun satu hal yang sangat menarik adalah adat-istiadat mereka dalam solidaritas sangat kuat sehingga tidak pernah terjadi konflik sesama warga. Mereka lebih cenderung menghargai para tokoh-tokoh, adat, kepala Suku agama dibanding dengan pemerintah.

Oleh karena kehidupan masyarakat suku *Togutil* adalah berpegang teguh pada adat istiadat, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, agar supaya dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai perubahan-perubahan sosial di setiap wilayah, sehingga dengan sendirinya masyarakat Suku *Togutil* di Kecamatan Maba Utara bisa menyadari dan membuka diri dengan adanya kehidupan modernisasi.
2. Perlu adanya sikap dari pihak gereja untuk meningkatkan disiplin kerja serta motivasi secara berkesinambungan baik lewat pendidikan formal, sosialisasi dalam memberdayakan diri mereka dari pandangan gereja.
3. Perlu gereja berperan dalam pendidikan keagamaan terhadap perilaku kepercayaan Suku *Togutil* kepada roh leluhur, pohon dan binatang yang selama ini dianut bersama.
4. Membuka diri dengan masyarakat luar, partisipasi dengan program-program pemerintah secara langsung agar bisa perubahan secara perlahan-lahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, gereja dan desa itu tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif dari anggota masyarakatnya baik sebagai kesatuan sistem maupun individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan dan gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, Emil. 1983. *The Division Of Labor In Society*. New York : Free Press.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terjemahan Alimandan. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

MacIver, Robert M. 1937. *Society: A Textbook of Sociology*. New York: Farrar and Rinehart.

Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Rohidi dan Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI-Press.

Martodirdjo, Haryo S. 1991. *Orang Tugutil di Halmahera, Struktur dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan*. Bandung : Disertasi Program Pascasarjana Unpad.

Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Press.

Sairin, Syafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pengelolaan Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung Di Disrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat

Oleh :

Yosephus Turot²³

Markus Kaunang²⁴

Very Y. Londa²⁵

E-mail : yosepturot@yahoo.co.id.

Abstract

Implementation of Developments Strategic Plan through the village in the district of North Aifat Maybrat - West Papua has not been effective when linked to the aims of the RESPEK program itself that is the creation of an independent village prosperous society. RESPEK implementation will work well if starting from the planning, implementation and supervision of running well. The method used in this research was qualitative. Data obtained by using three ways: interviews, observation and documentation. The informants determined by purposive in total amounting to 23 peoples. Data were analyzed descriptively.

From these results of this research it can be concluded that the ineffective management of RESPEK in the district of North Aifat Maybrat caused by (1) the ineffective planning, not implemented deliberations village by the Village Council Head to plan what needs to be built, there was no public participation in the formulation of things what will be built using funds of Respect, the reason people do not participate because there is no consensus that done by the village government. (2) The implementation of development which uses a source of funds of RESPEK misses the point and not in accordance with the operating instructions of activities. Education, women's credit (SPP) and the infrastructure was not running optimally. (3) Supervision, no oversight of the government's RESPEK program management, while people also keep an eye on but no socialization of the government about how the flow monitoring and reporting on violations found, so that peoples often fight with TPKK.

Keywords: Management, Strategic Planning, Development.

PENDAHULUAN

Sejak pertengahan tahun 2006 pemerintah Provinsi Papua memberikan perhatian serius diarahkan untuk membangun masyarakat kampung Papua. Alasan sederhananya adalah bahwa sebagian besar rakyat Papua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya bermukim di kampung-kampung dengan kondisi

²³ Mahasiswa prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

²⁴ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

²⁵ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjan Universitas Sam Ratulangi.

geografis seperti di pulau-pulau, pesisir, daerah berawa, dipinggiran sungai, di lembah-lembah, sampai dilereng gunung yang tinggi, mereka hidup terpencil tetapi juga terpencar.

Perhatian tersebut diwujudkan dengan salah satu program primadonanya adalah melalui pemberian dana tunai kepada kampung-kampung untuk dikelola, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan di Kampung-kampung, dana tunai yang diberikan adalah berjumlah Rp. 100.000.000,- untuk setiap kampung dalam program yang dinamakan Rencana Strategis Pembangunan Kampung yang disingkat RESPEK. RESPEK merupakan jalan keluar yang paling Utama dalam pembangunan manusia Papua, melalui RESPEK pemerintah bisa mewujudkan dengan sebenar-benarnya prinsip pemberlakuan otonomi khusus sebagai solusi menyeluruh pemantapan integritas NKRI di Papua, yaitu melalui pemihakan, pemberdayaan dan kemandirian orang-orang asli Papua dalam berbagai aspek.

Diwilayah kabupaten Maybrat yang dalam Peta Papua berada di wilayah kepala Burung Papua dan dimekarkan untuk menjadi satu kabupaten tersendiri pada tahun 2009. hingga tahun 2014 terdapat perkembangan jumlah desa atau di Papua disebut dengan Kampung yang cukup signifikan. Pemekaran kampung selain kebutuhan untuk memperpendek rentan kendali di indikasikan juga sebagai ajang untuk bagi-bagi uang melalui program pemberdayaan kampong dengan alasan utama yakni jumlah KK riel yang ada hanya sekitar 5-7 KK sudah dimekarkan menjadi kampung tersendiri, ada SK kampung dan aparat Kampung namun tidak ada lokasinya, tidak ada aktifitas, aparat yang ditunjuk sebagai kepala kampung menancapkan papan nama kampung pada salah satu rumah sudah beres tinggal tunggu dana pemberdayaan, Selain itu tujuan pembangunan masyarakat juga bahwa mencapai kemandirian dimana masyarakat tidak tergantung pada pihak-pihak lain namun kondisi riel yang terjadi dimana bukan kemandirian melainkan ketergantungan masyarakat pada bantuan-bantuan pemerintah.

Program RESPEK tersebut belum dikelola secara baik, contoh konkritnya adalah tidak ada satupun papan nama proyek dikampung yang

pembiayaanya bersumber dari dana RESPEK, dana tersebut cenderung digunakan untuk kepentingan individu, dibagikan kepada setiap masyarakat, digunakan untuk membayar masalah sosial yang pada akhirnya sama sekali tidak berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan makna hakiki dari pemberdayaan itu sendiri tidak terwujud sebab lawan dari pemberdayaan adalah ketergantungan.

Belum efektifnya pengelolaan program RESPEK disebabkan oleh pengelolaan yang tidak baik, segala tahapan dalam pengelolaan tidak dilakukan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Di Provinsi Papua Barat hingga tahun 2011 pengelola program Respek dipaketkan dengan PNPM Mandiri namun pasca tahun 2011 hingga 2015 ini pengelola Respek di Papua Barat dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat. Kepala Distrik atau Camat secara langsung menjadi ketua tim pengelola kegiatan tingkat distrik atau kecamatan sedangkan kepala kampung menjadi ketua tim pengelola kegiatan ditingkat kampung berlaku semenjak tahun 2011. Tim Pengelola Kegiatan Kampung (TPKK) dibentuk sendiri oleh kepala kampung, dengan kepala kampung bersangkutan berperan sebagai ketua TPKK dan kepala distrik untuk Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD).

Dalam pelaksanaan pembangun dengan menggunakan dana respek yang lebih difokuskan pada bidang pokok yakni makanan, gizi, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur kampung, pengelolaan hutan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas aparat distrik, kampung dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Bidang infrastruktur sendiri belum maksimal yang dibangun dengan dana RESPEK di wilayah distrik Aifat Utara, yang terdapat hanya infrastruktur dengan logo PNPM Mandiri, bidang pendidikanpun tidak diprioritaskan, SPP juga kurang pembinaan, sehingga sekali dibantu tidak dikembangkan atau tidak berjalan dengan baik sehingga akibatnya tidak diberikan lagi.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan RESPEK di Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat. Melalui hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan pada umumnya dan khususnya pada

bidang Manajemen Sumberdaya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengelolaan RESPEK distrik Aifat Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Suebu (2009) bahwa Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) merupakan suatu paradigma pembangunan yang diterapkan di Provinsi Papua, Respek mulai diterapkan di Papua pada pertengahan tahun 2006 oleh Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu,SH. Selaku penggagas program Respek.Salah satu pendekatan yang digunakan didalam melaksanakan Respek adalah pengalokasian dana tunai (Block grant) sebanyak Rp. 100 juta rupiah yang berasal dari APBD Provinsi kepada setiap kampung di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), jumlah dana ini akan bertambah jika ada komitmen para bupati dan walikota untuk menyediakan dana tunai atau block grant yang bersumber dari APBD kabupaten/kotanya kepada tiap kampung diwilayahnya masing-masing. Sejalan dengan dana tunai (Block grant) dikucurkan juga dan Operasional Kegiatan Respek yang berjumlah 100 juta rupiah tiap distrik.

Dengan pendekatan ini pemerintah provinsi langsung membalik piramida yang terbalik selama beberapa tahun lalu, sehingga benar-benar secara nyata terjadi pengalokasian dana dalam jumlah yang signifikan ke kampung-kampung di Papua. Menurut Suebu (2009) menekankan bahwa Respek akan terus berlaku setiap tahun entah siapapun yang nantinya menjadi gubernur di tanah Papua. Istilah yang digunakan Suebu bahwa “dana tunai ke kampung-kampung harus terus mengalir setiap tahun keseluruh kampung-kampung di tanah Papua, samapai Tuhan Yesus datang kembali”.

Hal terpenting yang terkandung dalam Respek bukan besarnya jumlah uang melainkan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah rakyat Papua di kampung-kampung mengelola sendiri dana yang jumlahnya cukupbesar, milik mereka secara bersama-sama, untuk melaksanakan pembangunan bagi mereka sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan keberhasilan dan ketidak berhasilan setiap kegiatan pembangunan tersebut.

Menurut Suebu (2008) Respek merupakan Pemberdayaan yang sebenarnya. Tidak mungkin berbicara pemberdayaan ketika tidak ada stimulus,

tidak ada perangsang yang diberikan kepada masyarakat yang sudah begitu lama dibiarkan tidak berdaya. Dana tunai dalam Respek tidak saja merupakan alat pemberdayaan namun ini juga merupakan alat pembelajaran. Rakyat belajar untuk mengelola sendiri sumberdaya keuangan milik mereka, seperti ilustrasi tidak pernah ada manusia yang langsung tahu mengendarai sepeda, dia perlu belajar terlebih dahulu. Pada saat yang sama tidak pernah ada manusia yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh tetap tidak bias mengendarai sepeda. Dalam pemanfaatan dana Respek tidak mungkin hasilnya langsung terdapat pada tahun pertama di semua kampung yang jumlahnya ribuan di tanah Papua, kata kuninya adalah pembelajaran. Syaratnya sistemnya dirancang dengan baik dan diterapkan dengan sungguh-sungguh maka pasti akan terlihat perbaikan yang mencolok dari tahun ke tahun.

Selain pemberdayaan dan pembelajaran, Respek juga memungkinkan rakyat Papua mempraktekan demokrasi pembangunan dalam pengertian yang sehakikinya, sebab dalam pemanfaatan Respek seluruh rakyat disetiap kampung terlibat, tanpa kecuali. Setiap rakyat menentukan yang terbaik, tidak ada yang perlu mewakili mereka, setiap pendapat disampaikan dan dibahas bersama melalui proses musyawarah mufakat yang merupakan bagian dari budaya masyarakat kampung di Papua. Mereka sendiri mengambil keputusan program-program pembangunan apa yang seyogyanya harus dilakukan.

Aspek lain adalah soal transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan dana Respek, penting bagi setiap warga kampung untuk tahu nomor rekening kampung dan berapa dana yang ada pada rekening itu, menurut Suebu (2009) bahwa transparansi itu penting sebab korupsi bukan monopoli orang kota saja, korupsi juga sangat mungkin terjadi di kampung-kampung sehingga dengan prinsip transparansi yang sederhana ini, sudah sejak awal upaya-upaya penegahan korupsi di tingkat kampung dilakukan.

Selanjutnya transparansi tersebut akan menghasilkan akuntabilitas, mereka yang dipercayai rakyat kampung untuk melaksanakan program-program pembangunan dikampung mereka masing-masing (kepala kampung, aparat pemerintah kampung, kelompok-kelompok kerja masyarakat) tidak saja harus

bertanggungjawab, tetapi semua yang dikerjakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika rakyat di kampung-kampung diberdayakan maka sebenarnya pemerintah juga memberikan pembelajaran politik yang strategis kepada seluruh rakyat di Papua untuk berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembangunan bangsa (nation bulding) sebagai bagian dari partisipasi seluruh rakyat dari Negara kesatuan republic Indonesia.

Dari uraian pokok pemikiran tentang respek diatas dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya program pemberdayaan melalui Respek setidaknya menekankan pada 5 faktor sebagai substansi penting dari respek, yakni (1). Pemberdayaan, (2). Pembelajaran, (3). Transparansi, (4). Akuntabilitas dan (5). Pembelajaran politik. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), maka digunakan dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Suatu program dapat dinyatakan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diukur dengan menggunakan konsep manajemen. Dengan kata lain bahwa untuk mencapai kondisi yang efektif maka tergantung pada bagaimana perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang efektif pula. Definisi tersebut dirangkum dari berbagai definisi tentang manajemen dan juga merupakan bagian dari fungsi manajemen. Dari ukuran yang direkomendasikan oleh Siagian dan Duncan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan suatu Program diukur dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi.

Dalam berbagai kegiatan, perencanaan memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang, sekelompok orang, organisasi, perusahaan dan sebagainya, karena begitu penting maka Goal (2014) mendefinisikan Perencanaan sebagai proses penentuan langkah yang hendak dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan juga merupakan proses manajemen pengambilan keputusan diwaktu sekarang untuk tujuan di masa yang akan datang. Pada hakekatnya ditegaskan Goal (2014) bahwa perencanaan adalah penentuan prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan. Hal tersebut sama saja dengan mendahulukan kepentingan yang mendesak dan kemudian dilanjutkan dengan kepentingan yang tidak begitu mendesak.

Menurut Siagian dalam Goal (2014) mengungkapkan bahwa salah satu definisi klasik tentang perencanaan yaitu pada dasarnya perencanaan adalah

pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Menurut Najoran (2010) Perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lainnya, perencanaan akan berhubungan dengan apakah sesuatu rencana berjalan baik atau tidak. Perencanaan yang baik akan menentukan hasil yang baik pula yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh subjek pembangunan itu, banyak perencanaan pemerintah yang gagal akibat apa yang direncanakan tersebut tidak memiliki pijakan yang relevan dengan kondisi social budaya masyarakat.

Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan maka faktor penting yang harus diperhatikan adalah Partisipasi masyarakat didalamnya, Sitepu (2012) mengungkapkan bahwa istilah partisipasi diambil dari bahasa Inggris, “*participation*” yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam hal demikian menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam Sitepu (2012) merumuskan pengertian partisipasi dengan dengan meninjau beberapa dimensi, partisipasi dapat juga dalam bentuk buah pikiran yang diberikan melalui pertemuan, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk memberikan harta benda, partisipasi dalam bentuk keterampilan dan kemahiran, yang terakhir adlah partisipasi sosial.

Menurut Walino dalam Tinggihe (2004) Partisipasi adalah keterlibatan atau pengaruh dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya memberikan kemungkinan untuk turut mengambil bagian atau peranan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan. Menurut Tjokroamidjoyo dalam Tinggihe (2004) partisipasi adalah suatu sikap/tindakan dapat dibentuk, dipengaruhi melalui informasi. Oleh karena itu penyuluhan atau penerangan tentan pembangunan dapat dipaparkan melalui sosialisai.

Menurut Najoran (2010) Dari model perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat ini banyak manfaat yang dapat dipetik yaitu:

1. Tahap perencanaan melahirkan *sense of indetification*.
2. Tahap implementasi melahirkan *sense of integrity*(rasa kesatuan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan).
3. Tahap pemanfaatan hasil melahirkan *sense of belonging* (rasa memiliki).

4. Tahap evaluasi melahirkan *sense of responsibility* (rasa ikut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang termanifestasi dalam bentuk pengawasan secara berkelajut).

Adapun strategi pembangunan partisipasi menurut Najoran (2010) meliputi:

1. Strategi penyadaran masyarakat (dari sisi peranan aparat pemerintah local)
2. Rencana pembangunan harus disesain dalam skala kecil,dalam skala organisasi pelaksanan kecil, wilayah operasinya kecil,target penerima mafaat kecil.Berdimensi *self-help* (penolong diri-sendiri).

Perencanaan berkaitan dengan proses pengadaan sumber daya manusia yang tepat dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang tepat, dalam waktu yang tepat, dan dengan perhitungan ekonomis yang tepat sebagai upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain perencanaan yang baik, faktor berikut adalah sitem evaluasi, Menurut Dunn (2000) Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan dengan penilaian terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum menurut Dunn istilah evaluasi dapat disamakan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*asesment*). Dalam arti yang lebih sempit menurut Dunn, Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Dunn Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, evaluasi member informasi yang falid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik, ketiga, Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi. Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi merupakan bagian terpenting dalam menilai efektif tidaknya suatu program.

Pengendalian kegiatan Respek dilakukan Melalui Kegiatan pengawasan, Evaluasi dan pelaporan secara berjenjang oleh pemerintah kampung/kelurahan, distrik, kabupaten/kota dan provinsi. Pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan kampong/kelurahan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, bentuk-bentuk pengawasanya sebagai berikut:

- a. Pengawasan Masyarakat, pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat (adat dan agama) serta masyarakat

kampung/kelurahan pada umumnya, dalam rangka memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam formulir-formulir pengawasan. Hasil pengawasan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

- b. Pengawasan Pemerintah, pengawasan pemerintah terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung atau kelurahan sampai tingkat pemerintah provinsi. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam formulir-formulir pengawasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan tiga cara yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan secara *purposive* pada total informan yang berjumlah 23 orang yang terdiri dari pengelola kegiatan dan Masyarakat sebagai sasaran program. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan data dari tiga cara tersebut di atas yang dikenal dengan Triangulasi data (Sugiyono, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memahami pengelolaan Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) di ditrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat yang diukur dengan menggunakan tiga ukuran yakni bagaimana Perencanaannya, Pelaksanaannya dan Pengawasan atau Evaluasinya, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Perencanaan Program

Dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi ditemukan bahwa penggunaan dana Respek tanpa melalui suatu perencanaan yang baik. Modus dalam pembangunan menggunakan dana respek adalah kepala kampung yang juga sebagai ketua tim pengelola dana respek ditingkat kampung bersama anggota yang diangkatnya sendiri tanpa melalui suatu musyawarah akan melihat kebutuhan apa yang bisa dibangun, dengan mempertimbangkan kemauan masyarakat. Jika menginginkan untuk dibagi maka dana tersebut akan dibagi. Namun terkadang juga dana tersebut digunakan untuk melengkapi kekurangan pembangunan dari dana kosering agar rampung dan lulus dalam penilaian untuk tahun anggaran berikutnya.

Suatu perencanaan yang baik akan memberikan manfaat dalam hal:

- 1) Standar pelaksanaan dan pengawasan
- 2) Pemilihan berbagai alternative terbaik
- 3) Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan.
- 4) Menghemat pemanfaatan sumber daya.
- 5) Membantu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.
- 6) Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait.
- 7) Alat meminimalkan perkerjaan yang tidak pasti.

Pembangunan yang tidak terencana akan berdampak pada pemborosan anggaran, pembangunanya tidak tepat sasaran dan tidak bisa dimanfaatkan. Pemborosan anggaran sebab anggaran yang diberikan yang jumlahnya hanya Rp. 100 juta tidak digunakan dengan baik, dibagikan kepada masyarakat bukan tujuan dari pembangunan dengan dana respek sehingga anggarannya hanya berupa pemborosan.

Pembangunan tidak tepat sasaran dikarenakan pembangunan tersebut bukan kebutuhan prioritas, misalnya membagikan uang kepada masyarakat, membayar masalah sosial, membayar tunggakan listrik dan sumbangan untuk gereja merupakan contoh pembangunan yang tidak tepat sasaran, sekalipun untuk kebutuhan bersama namun hal tersebut bukan merupakan bidang atau program pokok yang harus dibiayai dengan dana respek, karena bertentangan dengan tujuan pembangunan menggunakan dana respek. Tujuan akhir dari pemberian dana respek adalah kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung dan merupakan solusi menyeluruh pemantapan integritas NKRI.

Pembangunanya tidak dimanfaatkan karena pembangunan tersebut tidak tepat sasaran, contoh masyarakat di kampung ayawasi timur membangun MCK sebanyaknya namun MCK tersebut tidak digunakan sebab tidak ada Air bersih, MCK akan berfungsi jika musim hujan. Seharusnya masyarakat menyepakati untuk membangun air bersih terlebih dahulu.

Selanjutnya dalam variabel perencanaan digunakan tiga indikator yakni Musyawarah, Partisipasi dan analisis kebutuhan, indikator tersebut dapat diurai sebagai berikut:

a. Musyawarah perencanaan pembangunan kampung

Sebanyak 15 orang yang mengatakan bahwa pembangunan dikampung dilaksanakan tidak melalui musyawarah. Pemerintah kampung melalui kepala kampung dan stafnya melihat sendiri apa yang menjadi kebutuhan prioritas dalam masyarakat. Musyawarah tidak dilakukan sebab sepengetahuan kepala kampung bahwa dana respek adalah uang masyarakat yang harus dibagikan kepada masyarakat. Tidak sepenuhnya apa yang dilakukan kepala kampung untuk tidak melaksanakan musyawarah itu salah sebab selain sebagai kepala kampung dia juga sebagai masyarakat yang sehari-harinya berada di kampung tersebut jadi bisa mengetahui kebutuhan apa yang mendesak untuk dibangun dikampung.

Namun ada sebagian informan yang mengatakan bahwa selalu ada pertemuan bersama untuk sepakati uang respek mau digunakan untuk apa. Dalam musyawarah dimaksud kepala kampung dan TPKK mengundang segenap tokoh masyarakat untuk menyepakati penggunaan dana respek tahun anggaran berjalan. Musyawarah kampung yang merupakan tempat untuk masyarakat merencanakan bersama apa yang hendak dibangun dengan dana respek tersebut suatu dalam perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. Perencanaan yang matang membutuhkan penyatuan berbagai pihak yang bersinggungan langsung dengan sasaran tersebut maka mekanismenya yang sesuai di Indonesia adalah Musyawarah untuk Mufakat, artinya perlu ada musyawarah untuk menyepakati apa yang hendak dilakukan untuk kebaikan bersama.

Musyawarah untuk merumuskan program yang akan dilakukan itu sangat penting, sebab:

- 1) Melalui musyawarah masyarakat akan berkumpul dan membina kebersamaan
- 2) Melalui musyawarah masyarakat akan mengusulkan hal-hal penting yang merupakan kebutuhan dalam kampung
- 3) Melalui musyawarah akan tercipta rasa memiliki program yang dibangun dan pada akhirnya masyarakat akan mendukung sepenuhnya.

b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Perencanaan yang baik tentunya akan menentukan pada hasil pencapaian yang baik pula dan partisipasi aktif kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembangun dalam program respek seperti diketahui bahwa masih rendah sangat berdampak pada faktor kepuasan dan dukungan masyarakat. Alasan masyarakat tidak ikut berpartisipasi sebenarnya adalah karena pengelola tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Jika dinilai berdasarkan petunjuk teknis pengelolaannya maka tahapan perencanaan harus dilakukan melalui musyawarah tingkat desa yang dihadiri oleh seluruh masyarakat sebab semangat dasar dari respek adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Masyarakat harus duduk bersama-sama untuk menyepakati program apa yang nantinya dilakukan bersama menggunakan dan respek. Segala petunjuk teknis mengenai pengelolaan dana respek khususnya bagaimana merumuskan suatu kegiatan menurut sejumlah informan yang ditanyai ternyata tidak ada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ke kampung-kampung. Sehingga kepala kampung dan TPKK mengelola dana respek ibarat meraba-raba sehingga pada akhirnya setiap program yang dilakukan dengan dana respek di kampung-kampung hanya berdasarkan insting dari kepala kampung.

Partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang sedapat mungkin disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yakni musyawarah untuk mufakat merupakan suatu tradisi yang cocok dan berlaku di Indonesia. Dengan berpartisipasi setidaknya akan menghasilkan rasa memiliki program, bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pemanfaatan, masyarakat ikut mengawasi jalannya pelaksanaan Respek secara aktif.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa diwilayah distrik Aifat Utara pasca dikeluarkannya keputusan gubernur nomor 900/161/X/2010 maka pengelolaan Respek sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala distrik dan kepala kampung. Permasalahan yang timbul adalah tidak ada proses musyawarah bersama masyarakat untuk merencanakan dan merumuskan program yang hendak dilakukan dengan dana respek tersebut. Dengan tidak adanya musyawarah maka secara otomatis partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunanpun tidak ada.

Menurut informasi yang didapat dilokasi penelitian dimana masyarakat mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa sumber dana respect adalah melalui dana Otsus yang diasumsikan sebagai uang darah, uang masyarakat sehingga masyarakat menuntut uang tersebut untuk dibagikan saja kepada masyarakat untuk digunakan oleh setiap masyarakat sesuai kebutuhannya masing-masing. Dari pemahaman masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada proses sosialisasi yang baik bagi pengelolaan dana respect di kampung-kampung.

Secara konseptual pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan social itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat dalam suatu Negara. Dalam pemberdayaan sendiri faktor partisipasi masyarakat merupakan bagian terpenting, partisipasi tersebut melalui perencanaan akan berdampak pada rasa memiliki, tanggungjawab pada pelaksanaan maupun pengawasan masyarakat. Dengan demikian maka demokrasi pembangunan yang diimpikan akan terwujud melalui pengelolaan respect tidak berhasil.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Untuk berpartisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tentunya masyarakat harus tahu hal-hal apa yang bisa disumbangkan masyarakat atau partisipasinya dalam bentuk apa saja, maka pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Hal yang bisa dilakukan masyarakat dalam mendukung pembangunan seperti ikut merencanakan, ikut mengawasi, memanfaatkan hasil pembangunan, menjaga apa yang sudah dibangun, sama-sama membangun, menyumbangkan sesuatu yang merupakan bagian dari swadaya masyarakat seperti material, uang, mobil, dll.

c. Analisis kebutuhan

Pada bagian analisis kebutuhan berdasarkan data yang diperoleh dimana dalam melaksanakan suatu program tanpa melalui tahapan perencanaan yang baik, perencanaan yang partisipatif dimana masyarakat akan aktif untuk mengusulkan program apa yang merupakan kebutuhan bersama yang paling mendesak dalam kampung tersebut. Realita yang terjadi di distrik Aifat Utara dimana dana respek digunakan untuk membayar masalah sosial, dibagikan uang tunai kepada setiap KK di kampung, sebagai dana pendukung untuk merampungkan pembangunan yang menggunakan dana PNPM Mandiri agar rampung dan dinilai berhasil oleh pengelola PNPM Mandiri.

Dalam realisasi dana respek melalui pemberian uang tunai kepada kepala keluarga, membayar masalah, membantu melengkapi rumah warga yang sedang dibangunnya sebenarnya juga merupakan kebutuhan dari masyarakat, namun kebutuhan secara personal sehingga hal ini sangat bertentangan dengan program pokok pembangunan melalui dana respek yang pada dasarnya untuk kepentingan banyak orang yang pada akhirnya diharapkan terciptanya kemandirian masyarakat kampung.

Data dilokasi penelitian menunjukkan bahwa dana respek digunakan juga sebagai dana penunjang untuk merampungkan pembangunan melalui PNPM mandiri, yang jadi kendala bahwa dana respek dan PNPM mandiri bisa digabungkan namun pengelolanya berbeda, laporan bermasalah ketika dana respek digunakan untuk menopang PNPM Mandiri sehingga dalam sesi wawancara dengan kepala distrik mengungkapkan bahwa setiap laporan yang diberikan dari kampung selalu diperbaiki kepala distrik, sebab dananya digunakan bercampur aduk.

Jalan untuk menghimpun segala kebutuhan pembangunan bagi masyarakat adalah melalui rembuk bersama atau musyawarah bersama seperti yang tertera dalam petunjuk teknis pelaksanaan sehingga masyarakat akan menyampaikan apa yang baik bagi mereka. Namun realitanya hal itu tidak dilaksanakan. Pembangunan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan kebutuhan mendasar

masyarakat maka akan berdampak pada pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga pembangunan tersebut tidak efektif.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Musyawarah kampung, Partisipasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk menentukan efektif tidaknya program respek di Aifat Utara. Jika musyawarah dilakukan maka tentunya pasti ada partisipasi dari masyarakat atau dari kelompok masyarakat dalam mengusulkan kebutuhan mereka, sesungguhnya bahwa masyarakatlah yang paling tahu tentang apa yang baik bagi diri mereka sendiri. Musyawarah dilakukan, ada partisipasi aktif dari masyarakat maka dengan sendirinya hal yang dibangun merupakan kebutuhan mereka sebab mereka sendirilah yang mengusulkan program tersebut.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan RESPEK pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah pembangunan bidang Infrastruktur, bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pada bidang pendidikan, berikut diuraikan secara terperinci.

1. Bidang Infrastruktur

Dari informasi dan data yang dihimpun maka dapat disimpulkan bahwa dana respek didistrik Aifat Utara tidak digunakan untuk membangun infrastruktur dasar sebagai fasilitas penunjang di kampung-kampung. Sebagian besar dana respek dibagikan kepada masing-masing Keluarga dengan memprioritaskan janda dan lansia. Besaran uang yang diterima oleh masyarakat berkisar antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- yang jadi pertimbangannya adalah status dalam keluarga, misalnya janda atau lansia jumlahnya lebih besar dibanding keluarga pada umumnya.

Dalam pembangian dana tidak jarang ditemukan ada sebagian keluarga yang tidak mendapatkannya dikarenakan faktor hubungan personal dengan kepala kampung yang tidak harmonis akibatnya bibit-bibit konflikpun ditaburi oleh kepala kampung melalui pengelolaan dana respek. Dari ketegangan itulah yang cenderung mendorong masyarakat untuk membentuk kelompoknya sendiri agar bisa mengusulkan pemekaran kampung baru.

Memang ada sebagian menggunakan dana respek untuk pembangunan infrastruktur namun hanya sebagai penyempurna pada program PNPM Mandiri. Misalnya PNPM Mandiri di kampung Ayawasi Timur membangun jalan gang namun anggaran tidak memenuhi target maka dana respek digunakan juga untuk melanjutkan sisa-sisa jalan gang tersebut sebab ada penilaian yang ketat pada PNPM Mandiri.

Dalam hal pembangunan infrastruktur dengan dana respek sebagaimana diketahui bahwa tidak ada infrastruktur utama yang dibangun dengan dana respek, hanya dalam bentuk melengkapi sisa pembangunan dengan anggaran yang lainya seperti PNPM Mandiri, alasannya bahwa dana respek tidak cukup untuk membangun satu infrastruktur sendiri sebab sisa dari anggaran yang dibagikan kepada masyarat itu yang digunakan untuk melengkapi pembangunan dengan PNPM Mandiri.

Pembangunan infrastruktur dasar dalam program respek diarahkan untuk kebutuhan pembangunan kampung sebagai solusi atas keterlambatan pembangunan guna percepatan pembangunan di Papua sebagai solusi pemantapan intergritas Papua pada NKRI.

2. Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) disebagian besar kampung-kampung di wilayah Aifat Utara tidak berjalan karena faktor SDM perempuan untuk mengelolanya. Dan diberikan sekitar Rp. 15.000.000,- namun dana tersebut dipinjam lalu tidak dikembalikan maka kegiatan tersebut macet, karena tidak berhasil maka bagi kepala kampung tidak ingin memberikan bantuan untuk SPP lagi.

Tidak pernah dievaluasi mengapa hal tersebut bisa terjadi dalam rapat evaluasi bersama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakberhasilan SPP tersebut. Faktor trauma dan tidak mau mencoba lagi untuk memperbaiki kekurangan yang telah terjadi menjadi penyebab utama tidak diberikan kucuran dana respek untuk SPP lagi.

Dari dana tersebut semestinya digunakan untuk meminjamkan kepada kelompok perempuan yang hendak melakukan pengembangan ekonomi kreatif

namun yang terjadi adalah meminjamkan kepada ibu-ibu yang sedang menghadapi masalah yang membutuhkan uang, Masalah tersebut misalnya anaknya yang hendak melanjutkan pendidikan anamun kekurangan biaya, ada keluarga yang sakit dan perlu biya berobat ke pusat kota.

Jika ditinjau dari tujuan dana SPP yaitu untuk pengembangan ekonomi kreatif perempuan, maka hal tersebut diatas telah menyimpang, selain menyimpang kurangnya kesadaran masyarakat yang meminjam untuk mengembalikannya lagi dengan bunganya, masyarakat cenderung mengelak bahwa uang tersebut adalah uang rakyat, uang otsus jadi tidak dikembalikan juga tidak apa-apa.

Dana SPP semestinya dipinjam atau digunakan oleh kelompok perempuan dalam pengembangan ekonomi kreatif seperti ibu-ibu yang melakukan atau mengelola usaha dibidang kuliner, modal di bidang perdagangan seperti UKM dengan maksud agar bisa menunjang kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya mendorong adanya kemandirian masyarakat.

Pemerintah melalui kepala kampung selalu menyalahkan perempuan atas kondisi tersebut, namun sebenarnya pemerintahlah yang tidak proaktif dalam melakukan sosialisasi, pembinaan bahkan pengawasan kepada kelompok perempuan yang mengelola dana tersebut. Sebaiknya agar berhasil setiap yang meminjam perlu ada jaminan yang diberikan, ada pernyataan kesepakatan jika tidak dikembalikan dalam jangka waktu tertentu maka akan diberikan sanksi sebagaimana berdasarkan petunjuk pengelolaan jika ada yang menyimpang.

Pengembangan kaum perempuan atau yang dikenal dengan pemberdayaan perempuan di Papua pada umumnya terkendala dengan cara pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan dipandang sebagai ibu, yang aktifitasnya memasak, mengasuh anak, mencuci dan hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi sehingga membuat perempuan Papua teristimewa di kampung-kampung yang tingkat pendidikan masih rendah merasa minder. Untuk memberdayakan perempuan maka perlu adanya kesetaraan gender, dan telah diupayakan pemerintah melalui anggaran untuk pemberdayaan perempuan.

Sosialisasi dan penguatan kapasitas bagi perempuan di kampung-kampung tidak dilakukan, perempuan selain diberikan perhatian berupa anggaran mereka juga harus diberikan motivasi, dorongan agar mereka bisa melawan rasa minder yang tertanam dalam diri mereka. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui pelatihan dan sosialisasi agar kapasitas dan SDM perempuan memadai.

3. Bidang Pendidikan

Dari data yang diperoleh melalui wawancara telah dikemukakan bahwa secara umum di distrik Aifat Utara dapat disimpulkan bahwa perhatian terhadap pendidikan melalui dana respek tidak efektif disebagian besar kampung-kampung, namun sebagai kampung-kampung tetap menganggarkannya bidang pendidikan. Bagi kampung-kampung yang menganggarkan pembiayaan pada bidang pendidikan difokuskan pada mahasiswa studi akhir dengan alasan bahwa mahasiswa yang studi akhir sudah pasti akan selesai sedangkan yang belum masuk pada studi akhir tidak dibiayai sebab belum jelas kapan selesainya. Selain bantuan untuk mahasiswa studi akhir juga ada kampung seperti kampung Konja, Yarat dan Maan yang membelikan perlengkapan seperti komputer dan printer untuk mahasiswa yang berasal dari ketiga kampung tersebut dalam setiap kota studi satu unit.

Untuk kampung-kampung yang tidak menganggarkan dana respek untuk pendidikan alasannya uang habis terpakai untuk dibagikan kepada masyarakat yang merupakan orang tua mereka dikampung, nanti orang tuanyalah yang mengirimkan anaknya dengan uang tersebut, berbeda dengan pengelolaan di kampung Fonatu yang mengatakan bahwa anggarannya terserap habis untuk pembangunan infrastruktur.

Dari kedua alasan diatas dapat dihubungkan benang merahnya bahwa anggaran tidak memadai, untuk dibagikan kesetiap warga untuk membangun infrastruktur dengan pertimbangan jangkauan dan harga material yang mahal saja tidak cukup mana yang mau kirim anak sekolah lagi.

Ada sebagian kampung seperti kampung Yarat yang menggunakan dana respek untuk membangun fasilitas pendidikan seperti MCK disekolah,

menyumbangkan material untuk pembangunan sekolah dan mengklaim sebagai bagian pengalokasian dana dibidang pendidikan, namun kondisi yang sebenarnya bahwa fasilitas pendidikan ada dinas yang bertanggung jawab bahkan ada kucuran dana yang lebih untuk pembangunan fasilitas pendidikan baik dari APBN maupun APBD dan Respek tentunya. Sekali lagi faktor pengawasan dan sosialisasi menjadi penyebabnya.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sebab tantangan dalam pembangunan adalah kualitas SDM masyarakat yang minim, dengan alasan tersebut sehingga pemerintah memberikan prioritas anggaran melalui dana respek untuk pendidikan. Ketika pemerintah kampung memberikan biaya kepada bidang pendidikan khususnya membiayai mahasiswa yang berasal dari kampung tersebut maka secara psikologis ada keterikatan antara mahasiswa tersebut dengan kampung. Pembangunan kampung akan dinilai sebagai tanggung jawab anak yang dibiayai oleh biaya dari kampung tersebut.

Dengan rasa tanggungjawab tersebut akan mendorong untuk kelak bekerja akan memberikan sumbangsih dalam bentuk swadaya guna pengembangan pembangunan dikampung. Hal tersebut akan menjawab masalah minimnya swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan dikampung, ketika ada swadaya dari masyarakat maka akan ada tambahan baik anggaran maupun fasilitas dalam mendukung pembangunan dikampung. Selain menjawab masalah swadaya yang kurang juga bisa mendorong adanya partisipasi yang aktif baik dari anak tersebut maupun orang tuanya dalam mendukung pembangunan.

Dengan demikian maka pembiayaan pendidikan melalui dana respek perlu dilihat sebagai suatu infestasi pembangunan jangka panjang yang harus terus dialokasikan dalam dana respek, pembangunan akan lebih baik apa bila manusianya dididik, pembangunan infrastruktur itu penting namun pembangunan supra struktur juga tidak kalah pentingnya.

3. Pengawasan

Pengawanaan penggunaan dana respek terdiri dari pengawasan Masyarakat dan pengawasan pemerintah.

a. Pengawasan masyarakat

Masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana respect, pengawasan tersebut dilakukan semenjak proses awal perencanaan hingga pemanfaatan. Objek yang diawasi adalah bagaimana transparansi, pertanggungjawaban penggunaan keuangan, pemanfaatan hasil, keterlibatan masyarakat dalam program. Dalam mengawasi hal tersebut menurut pantauan peneliti dilokasi penelitian bahwa masyarakat aktif menjalankan fungsinya namun masyarakat tidak tau kemana mereka melaporkan temuan-temuannya sebab skema penyalahgunaan keuangan sudah terstruktur dari provinsi hingga ke daerah-daerah sehingga tidak diberikan kejelasan kemana masyarakat harus mengadu tentang temuan-temuannya.

Karena tidak ada tempat, lembaga maupun orang yang menjadi tempat untuk melaporkan temuan masyarakat maka masyarakat sering berkelahi dengan pengelola di kampung apabila tidak ada transparansi, contohnya bahwa pengelola tidak memberikan penjelasan yang terperinci tentang mengapa uang 100 juta yang diketahui untuk setiap kampung tapi realitanya sampai kampung hanya 85 juta, masalah lain adalah untuk pembayaran masalah sosial dikampung dengan alasan kamtibmas tidak melalui kesepakatan bersama sehingga masyarakat yang tidak puas sering melampiaskannya kepada pengelola, memalang pekerjaan yang sedang dikerjakan, berkelahi dengan kepala kampung, bahkan membuat kumpulan tersendiri untuk mengusulkan pemekaran kampungnya sendiri.

Selain itu pada tahap pembagian dana respect kepada masyarakat mekanisme yang digunakan kepala kampung adalah membeli amplop untuk mengisi uang yang hendak dibagikan kepada masyarakat dan mengantarnya satu-persatu kerumah masyarakat, setelah didalami ternyata tidak sedikit masyarakat yang tidak mendapatkannya, alasannya adalah menunggu pencairan tahap kedua, namun tidak diberikan penjelasan yang baik, menurut masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan melalui respect tersebut bahwa mereka tidak dapat karena tidak sepaham atau bertentangan dengan kepala kampung, atau pembagian dana respect kepada masyarakat dilakukan sesuka kepala kampung. Dari kronologis tersebut yang terjadi di beberapa kampung lokasi penelitian membuktikan bahwa

pembagian dana respek kepada masyarakat yang pada dasarnya tidak sesuai dengan pokok program yang dibiayai oleh dana respek juga menimbulkan adanya potensi konflik.

Kendala yang dihadapi untuk melengkapi permasalahan pengawasan adalah masyarakat dan pengelolaan dana respek tingkat kampung termasuk kepala kampung sendiri juga tidak tau kemana mengarahkan masyarakat untuk mengadu sebab tidak ada sosialisasi menyeluruh tentang alur pengawasan pengelolaan dana respek. Pengawasan yang tidak berjalan dengan baik berujung pada tidak adanya kontrol sehingga transparansi, akuntabilitas pengelolaan respek menjadi suatu masalah yang sistemik.

Masyarakat akan aktif untuk mengawasi secara baik dan tidak menimbulkan masalah seperti pemalangan proyek yang disimpulkan pemerintah sebagai upaya masyarakat untuk menghambat pembangunan dikampung sehingga pemerintah cenderung menyalahkan masyarakatnya apabila dari proses awal perencanaan masyarakat dilibatkan dalam segala tahapan program pembangunan dengan dana respek.

Keterlibataan masyarakat tersebutlah yang akan menimbulkan rasa memiliki program pembangunan sebab program tersebut dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat seperti yang tertuang dalam semangat dasar pengelolaan respek. Secara teoritis tahap pengawasan akan menimbulkan rasa ikut bertanggung jawab atas perogram tersebut apabila dari awal masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam segala prosesnya. Sehingga dalam petunjuk pengelolaan respek disebutkan bahwa Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat (adat dan agama) serta masyarakat kampong/kelurahan pada umumnya, dalam rangka memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam formulir-formulir pengawasan. Hasil pengawasan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Formulir pengawasan yang dimaksud menurut data yang diperoleh masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, petunjuk teknis pelaksanaan saja tidak diberikan apalagi formulir pengawasan. Uang respek adalah uang untuk

masyarakat namun dalam pengelolaanya harus dilakukan pengawasan yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan maupun kewenangan.

b. Pengawasan pemerintah

Seperti yang telah diutarakan pada Bab 3 bahwa Pengawasan pemerintah terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung atau kelurahan sampai tingkat pemerintah provinsi. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam formulir-formulir pengawasan. Sanksi terhadap penyimpangan terhadap program pembangunan kampung/kelurahan dapat berupa sanksi adat, hokum dan administrative. Sanksi adat adalah sanksi yang diberikan oleh tokoh masyarakat sesuai dengan nilai dan norma-norma adat istiadat setempat. Sanksi administrative adalah sanksi yang diberikan pemerintah dalam bentuk penundaan pencairan, pengurangan bantuan dan pemberhentian bantuan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada saat peneliti menanyakan kepada masyarakat bahwa apakah ada pengelolala yang pernah diberikan sanksi atau kampung pernah diberikan sangsi jawab dari masyarakat adalah tidak ada atau tidak pernah terjadi demikian. Padahal jika ditinjau secara struktural bahwa lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan melalui program respek hampir ada dari tingkat kampung hingga provinsi. Menurut petunjuknya bahwa Setiap pengaduan atau keluhan dari masyarakat harus segera secara serius. Dan proses penyelesaiannya juga harus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, Distrik, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Mekanisme pengaduan terdiri dari:

- 1) Masyarakat membuat pengaduan secara lisan/tulisan kepada Lembaga Pengelola
- 2) Lembaga Pengelola memproses dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- 3) Bila tidak dapat diselesaikan oleh Lembaga Pengelola tingkat Kampung maka dilanjutkan ke lembaga pengelola tingkat Distrik, begitu pula selanjutnya ke tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Program RESPEK dibentuk kelompok kerja (Pokja) Kesekretariatan, dengan sekertaris tim koordinasi sebagai

kepala Sekertariat, dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani Program RESPEK. Lembaga yang berwenang dalam pengawasan dana respek untuk tingkat kabupaten adalah kelompok kerja (pokja) asistensi Program RESPEK, yang terdiri dari unsur / unit :

- 1) Unsur Bappeda sebagai unit perencana.
- 2) Unsur Pemberdayaan Masyarakat sebagai unit pengembang kelembagaan
- 3) Unsur Dinas Teknis sebagai unit pengarah unit bangunan.
- 4) Unsur Dinas / instansi terkait.

Tim pemantau, pengendali dan monitoring dibentuk Tim Pemantau dan Pengendali dengan keanggotaan dari staf khusus Walikota dan Dinas / instansi terkait. Pengawasan oleh pemerintah menurut data yang dihimpun bahwa pemerintah tidak pernah turun ke kampung-kampung untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan dana respek. Segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah.

Pengawasan yang baik akan menghasilkan pengelolaan kegiatan yang tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran dan tepat prosedur, padahal dana operasional kegiatan diberikan juga bagi pengelola. Hal tersebutlah yang mengakibatkan adanya asumsi dari masyarakat bahwa ketidak efektifaan pengelolaan dana respek merupakan suatu proses yang disengaja oleh pemerintah, ada proses pembiaran kepada pengelola dan tingkat kampung hingga provinsi untuk melakukan kesalahan dalam mengelola dana respek tersebut.

Minimnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dana Respek terbukti melalui penyalahgunaan anggaran pada program yang tidak termasuk dalam bidang prioritas pembangunan menggunakan dana respek, contohnya adalah adanya pemberian dana tunai kepada masing-masing keluarga di kampung yang sama sekali tidak ada indikasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat maupun kemandirian masyarakat di kampung itu sendiri.

PENUTUP

Dari hasil analisis pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak pengelolaan Respek di distrik Aifat Utara belum baik berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh (1) perencanaan tidak efektif, tidak dilakukan Musyawarah Kampung oleh Kepala kampung untuk merencanakan kebutuhan apa yang hendak dibangun, tidak ada partisipasi masyarakat dalam merumuskan hal-hal apa yang hendak dibangun menggunakan dana respek, alasan masyarakat tidak berpartisipasi karena tidak ada musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah kampung. (2) Pelaksanaan, pembangunan yang menggunakan sumber dana Respek tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan. Pendidikan, SPP dan Infrastruktur tidak berjalan maksimal. (3) Pengawasan, tidak ada pengawasan dari pemerintah dalam pengelolaan program Respek, sedangkan masyarakat ikut mengawasi namun tidak ada sosialisasi dari pemerintah tentang bagaimana alur pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran-peanggaran yang ditemukan, sehingga masyarakat sering berkelahi dengan Tim Pengelola Kegiatan Kampung (TPKK).

Dari simpulan yang ada maka disanakan beberapa hal, yakni:

1. Penggunaan dana Respek harus memperhatikan tahapan Perencanaan dalam perumusan program.
2. Perencanaan yang dilakukan harus melalui musyawarah kampung melibatkan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat.
3. Pemerintah mendistribusikan petunjuk operasional kegiatan ke kampung-kampung.
4. Pemerintah harus melakukan sosialisasi rutin kepada kampung-kampung tentang pengelolaan Respek.
5. Pemerintah melalui lembaga terkait harus selalu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana Respek.
6. Pengelola mengajak masyarakat untuk juga melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pemerintah jika ditemukan indikasi penyalahgunaan pengelolaan Respek.

DAFTAR PUSTAKA

- Goal L.Jimmy 2014. *A to Z Human Capital*. Garasindo. Jakarta
- Imelda Tingginehe, 2004, Tesis “*partisipasi masyarakat Talaud dalam pembangunan kabupaten kepulauan talaud* ” (*study kasus masyarakat kecamatan Rainis*), PPS. Unsrat, Manado.
- Kritsjane M. Najooan, 2010, tesis “*sinergitas program lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan pemerintah pada perencanaan pembangunan di kelurahan Malalayang II Kota Manado*”, PPS. Unsrat, Manado
- Siagian, Sondang P., 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (cet. 9). Bumi Aksara.Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2006, *Manajemen SumberDaya Manusia*. (cet. 13) Bumi Aksara. Jakarta
- Siepu P. Antonius. 2012. *Teori Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Suebu Barnabas 2009. *Pembangunan Kampung Respek – GMPK (Laporan kepada Wakil Presiden)*, Jayapura.
- Sugiyono, 2010. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*, perebit Alfabeta, Bandung.
- Wrihatnolo, R.R & Riant, N.D., 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan UntukPemberdayaan Masyarakat*. Gramedia,Jakarta.

**Pacaran dan Perilaku Seksual Remaja Di Provinsi Sulawesi utara
(Analisis Data Survei RPJMN Remaja Tahun 2013)**

Oleh :

Urip Tri Wijayanti²⁶

E-mail: urip.wijayanti@bkkbn.go.id / haidar1602@yahoo.co.id

Abstract

One of the survey elaborated on teenager dating behavior is youth RPJMN. Respondents in this survey are unmarried teenager on the range age between 15-24 years old who are selected in the family's survey. Analyses are needed in order to make this survey being useful. The data resources used in this analysis are the results from 2013 RPJMN. The results stated 95% had handrails, 63% had kissed, and 24% had touched/stimulate their couple's body. All of these percentages are above the national average. Furthermore, for the teenager percentages who had sexual intercourse both man and women are also above the national standard. In details, 13 % man teenager and 7 % women teenager had sexual intercourse.

Based on those survey, there are some suggestions, firstly, the attendance of PIK R/M on schools or universities must be more active. It is necessary to socializing the genre with proactive system from BKKBN coordinate with the Department of Education. The may come to the schools coupled with utilizing counseling teachers who have been trained by BKKBN. The existence of religious leaders, community and traditional leaders who have been trained in the KKB program and PK BKKBN program should be empowered, because they are figures whose close to the people (teenagers and parents).

Keywords: Dating behavior, RPJMN youth.

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga telah mengamanatkan bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dari itu penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, salah satunya pada usia remaja. Mengingat

²⁶ Pegawai Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus Manado

usia remaja merupakan usia rawan terhadap berbagai arus baik positif maupun negatif.

Benar adanya globalisasi dan modernisasi sebenarnya memiliki dua sisi yang berbeda, disatu sisi mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya yang sudah tentu akan mempercepat proses pembangunan di segala bidang, seperti ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial dan kesehatan. Namun disalah satu sisi memberikan kontribusi pada perilaku negatif para remaja. Mulai dari menikah diusia muda, hamil diluar nikah, seks bebas, aborsi bahkan HIV/AIDS.

Kondisi ini tentunya menimbulkan keprihatinan bagi semua elemen masyarakat. Pemerintah sebagai penyagom dan pelindung masyarakat tentunya tidak tinggal diam dalam memotret keadaan remaja, salah satunya tertuang dalam RPJMN 2010-2014 program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) atau yang saat ini diganti dengan sebutan Program Genre (Generasi Berencana). Tujuan dari program itu sendiri adalah untuk mengurangi kehamilan dibawah usia 20 tahun dan menyiapkan remaja untuk kehidupan berkeluarga. Bahkan kalau kita menengok pada target Millenium development Goals (MDGs 2015), dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia salah satu targetnya dengan menurunkan angka kehamilan remaja sebesar 15 %.

Kajian-kajian mengenai pacaran dan perilaku seksual remaja pra nikah menjadi penting adanya sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan. Apa lagi menurut data SP (Sensus Penduduk) tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, dimana tercatat sebanyak 63,4 juta jiwa atau sebanyak 26,7 % dari penduduk Indonesia merupakan penduduk remaja. Keberadaan mereka dengan segala perilakunya tentunya tidak boleh dipandang sebelah mata. Selanjutnya bagaimana dengan provinsi Sulawesi Utara. Provinsi dengan jumlah remaja menurut SP 2010 sebanyak 358.935 jiwa atau sebanyak 15,81 % dari jumlah penduduk Sulawesi Utara. Memang bila dilihat dari sisi kuantitasnya remaja di Sulut belum mencapai separuh dari jumlah penduduk di Sulawesi Utara, namun kajian tentang perilaku seksual menjadi teramat mutlak dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sekilas Mengenai Survei Indikator Kinerja RPJMN Remaja

Survei indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional program kependudukan dan keluarga berencana Nasional adalah survei berskala nasional yang mengumpulkan berbagai keterangan tentang program kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana, keterpaparan informasi kependudukan, KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja serta pemberdayaan dan ketahanan keluarga yang menghasilkan estimasi hasil tingkat provinsi. Survei dilakukan di 33 provinsi yang menggambarkan tingkat nasional dan provinsi. Pengelola/Koordinator Survei RPJMN adalah Perwakilan BKKBN dimasing-masing provinsi dan survei dilaksanakan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau LSM di provinsi setempat.

2. Pengertian Perilaku

Perilaku menurut Miftah Toha adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan masyarakat, tempat dimana manusia saling berinteraksi dengan sesamanya. Dalam interaksi manusia saling menyelami dan mempelajari apa yang dilakukan orang lain, kemudian memikirkan dan mempertimbangkan baik serta buruknya. Apa bila dirasakan banyak manfaatnya, maka akan melaksanakannya.

Selanjutnya menurut Soekidjo Notoatmojo yang dimaksud perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sementara menurut Solita Sarwono perilaku dapat pula diartikan sebagai hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain perilaku merupakan respon/reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Kemudian respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan seperti berfikir, berpendapat dan bersikap) selanjutnya respon juga ada yang bersifat aktif (melakukan tindakan). Oleh karena itu berdasarkan batasan tersebut perilaku aktif dapat dilihat sedangkan perilaku pasif tidak terlihat atau masih

tersembunyi. Berdasarkan pada pengertian perilaku, maka perilaku dalam kajian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh remaja ketika mereka berpacaran.

3. Pengertian Pacaran

Sebelum membahas tentang perilaku remaja dalam berpacaran, ada baiknya kita membahas tentang pengertian pacaran terlebih dahulu. Ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya tentang pacaran, salah satunya DeGenova & Rice pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. selanjutnya Bowman pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, dimana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan dilangsungkan. Benokraitis menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Menurut Saxton dalam Bowman, pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh kaum muda yang belum menikah dan berlainan jenis).

Menurut Reiss (dalam Duvall & Miller) pacaran adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Menurut Papalia, Olds & Feldman, keintiman meliputi adanya rasa kepemilikan. Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pacaran adalah hubungan antara dua orang berlawanan jenis yang belum menikah bertujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian yang bisa sebagai pertimbangan menuju jenjang pernikahan.

4. Pengertian Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa peralihan ini banyak perubahan terjadi pada remaja, mulai dari perubahan fisik, psikologis dan perubahan sosial. Sebenarnya apa definisi dari

remaja, menurut Kartini Kartono “ masa remaja disebut pula sebagai penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa”. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual. Disisi lain Sri Rumini dan Sundari menjelaskan masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja adalah suatu masa ketika

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disampaikan maka, dapat diambil kesimpulan remaja adalah seseorang yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis dan sosialnya.

5. Batasan Usia Remaja

Untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori remaja atau bukan perlu ada batasan. Batasan ini didasarkan atas usia, ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang batasan usia remaja. Salah satunya Kartini Kartono, menurutnya usia remaja dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Remaja Awal (12-15 Tahun)

Pada masa ini, remaja mengamali perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.

- b. Remaja Pertengahan (15-18 Tahun)

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekakan-kanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal ini rentan akan timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya.

c. Remaja Akhir (18-21 tahun)

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. WHO (World Health Organization) juga membagi batasan usai remaja, menurut WHO usia remaja adalah 10-19 tahun. Selanjutnya berdasarkan United Nations (UN) batasan usia anak muda (youth) adalah 15-24 tahun dan disatukan dalam batasan kaum muda (young people) yang mencakup usia antara 10-24 tahun. Berdasarkan pendapat diatas, batasan usia remaja memang bervariasi namun pada dasarnya penduduk tergolong usia remaja yakni penduduk yang berusia diatas 10 tahun dan maksimal berumur 24 tahun. Dalam survei ini yang masuk pada kategori responden remaja dibatasi pada kelompok usia 15-24 tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data Survei RPJMN tahun 2013 khususnya data Provinsi Sulawesi Utara. Survei ini dikelola oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Fakultas ISIP Universitas Sam Ratulangi Manado. Metode penarikan sampel yang digunakan yaitu penarikan sampel stratifikasi dua tahap :

- a. Tahap pertama memilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size (pps) dengan size jumlah rumah tangga/keluarga pada kerangka sampel blok sensus SP 2010.
- b. Tahap kedua memilih sejumlah rumah tangga /keluarga (n=25) secara systematic random sampling (SRS) dari setiap blok sensus terpilih. Selanjutnya menentukan responden remaja umur 15-24 tahun belum menikah

dari rumah tangga/keluarga terpilih maksimum 3 (tiga) remaja dalam satu keluarga terpilih.

Instrument dalam penelitian ini menggunakan kuesioner remaja dan dokumen lainnya berupa Daftar Keluarga Terpilih dan Daftar Remaja Terpilih. Setelah wawancara selesai dilakukan, tahap pengolahan data yang pertama dilakukan adalah editing data. Editing ini dilakukan dengan memeriksa kelengkapan isian, konsistensi antara jawaban dan ketepatan isian. Selanjutnya dilakukan pengecekan jumlah kuesioner apakah telah sesuai dengan yang direncanakan, kemudian dikirim ke BKKBN provinsi dan untuk selanjutnya dikirim ke Puslitbang KB, KS BKKBN pusat. Di pusat kuesioner-kuesioner tersebut diperiksa kembali untuk editing ulang, kelengkapan isian dan pengkodean untuk jawaban terbuka. Tahap berikutnya dilakukan entri data (perekaman data) dan diolah menggunakan mikro computer dengan menggunakan program SPSS-PC. Proses validasi data dilakukan segera setelah pelaksanaan entri data. Kesalahan karena tidak mengikuti alur pertanyaan dikoreksi pada tahap perekaman dan validasi data. Selanjutnya data dioleh lebih lanjut untuk menghasilkan tabel-tabel sesuai kebutuhan dalam analisis. Analisis yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis ini dilakukan untuk melihat gambaran pacaran dan Perilaku Seksual Remaja pra nikah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil analisis ini diharapkan bisa berguna karena menurut Agung analisis deskriptif merupakan analisis sederhana, namun hasil analisis deskriptif dapat menjadi masukan berharga bagi para pengambil keputusan.

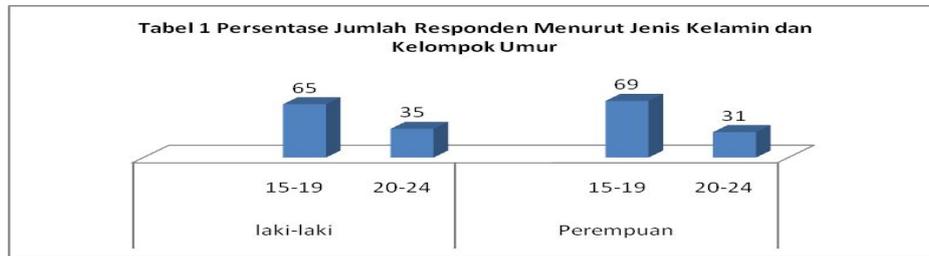
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Responden

Responden remaja dalam Survei RPJMN Tahun 2013 berasal dari 15 kab/kota se Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah responden sebanyak 206, responden remaja ini dikelompokkan dalam dua kelompok umur yakni berumur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Gambaran latar belakang responden remaja berikut ini merupakan gambaran umumnya bukan gambaran yang lebih spesifik pada remaja yang berpacaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan sebagai berikut ini

1.1. Jenis Kelamin Responden dan Kelompok Umur

Responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, untuk lebih jelasnya mengenai jumlah responden menurut jenis kelamin dan



kelo
mpo
k
umur
dapat
kita

lihat dalam tabel berikut :

Sumber : BKKBN:Puslitbang KB, KR. 2013

Jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini sebanyak 106 orang dan responden perempuan sebanyak 100 orang, jadi dalam penelitian ini jumlah responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan. Hal ini ada beberapa kemungkinan bisa karena saat wawancara ke lokasi responden yang bersangkutan tidak berada dirumah dalam waktu lama misalnya sekolah ke luar daerah atau bisa juga ada responden yang menolak diwawancarai. Sebab berdasarkan pengalaman responden perempuan biasanya malu-malu untuk diwawancarai berbeda dengan responden laki-laki.

Selanjutnya bila kita melihat persentase responden berdasarkan kelompok umurnya responden perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun memiliki persentase lebih banyak dari yang lainnya. Berarti bila melihat usianya responden pada penelitian ini secara umum masih berada pada bangku kelas 3 SLTP – 3 SLTA. Dari kesemua itu jumlah responden remaja yang pernah/sedang mempunyai pacar ada sebanyak 167 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 88 orang dan perempuan sebanyak 79 orang.

1.2. Pendidikan Responden

Pendidikan yang ditamatkan sangat penting dikaji dalam penelitian ini, agar bisa dilihat secara umum remaja di Sulawesi Utara telah menamatkan level pendidikan pada tingkatan yang mana. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



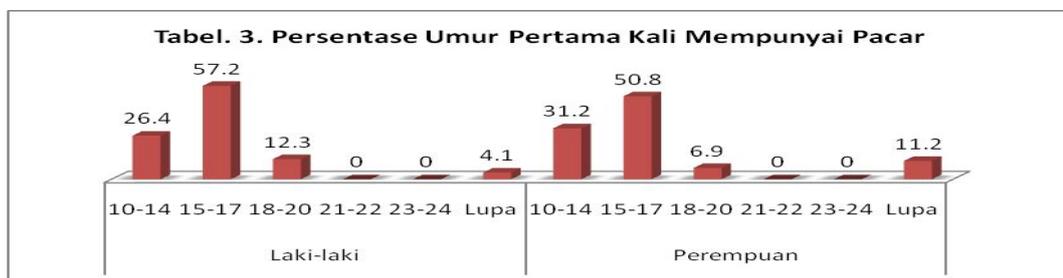
Sumber : BKKBN:Puslitbang KB, KR. 2013

Berdasarkan tabel terlihat pendidikan responden lebih banyak tamat SLTA sebesar (43,4 %). Bila melihat kondisi ini dapat dikatakan responden dalam RPJMN Remaja berpendidikan tinggi sebab mereka telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, meskipun disisi lain masih ada responden yang tidak pernah sekolah sebesar (0,7 %). Hal ini tetap memerlukan perhatian penuh mengingat di usia remaja mereka tidak pernah mengenyam pendidikan. Apa karena fasilitas pendidikan yang tidak terjangkau terkait dengan akses atau karena faktor ekonomi yang mengharuskan mereka membantu orang tua mencari nafkah.

2. Perilaku Seksual Remaja

2.1. Umur Pertama Kali Berpacaran

Umur pertama kali berpacaran penting untuk dikaji agar dapat diketahui pada usia berapa mereka mengenal pacaran. Tabel berikut akan menyajikan persentase umur pertama mempunyai pacar.



Sumber : BKKBN:Puslitbang KB, KR. 2013

Berdasarkan tabel 3. Persentase Umur Pertama Kali Mempunyai Pacar baik laki-laki maupun perempuan terlihat umur terbanyak pertama berpacaran berada pada usia 15-17 tahun, umur inipun sebenarnya sama dengan umur nasional yang secara umum umur pertama kali mempunyai pacar berada pada umur 15-17 tahun. Sebenarnya pada usia-usia ini mereka berada pada bangku SLTA. Boleh dikatakan wajar mereka mulai tertarik dengan lawan jenisnya, mengingat pada masa-masa SLTA biasanya mereka lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya yang besar kemungkinan akan menemukan teman-teman baru yang ujungnya bisa membentuk komunitas. Namun masih

disayangkan juga Maka tak heran pada usia-usia tersebut orang tua maupun guru disekolah perlu memberikan arahan tentang pergaulan yang sesuai dengan norma agama, adat dan budaya agar mereka tidak terjerumus pada pergaulan bebas.

Pada sisi lain ada remaja yang memulai berpacaran pada usia 10-14 tahun baik laki-laki maupun perempuan masing-masing (26,7 % dan 31,2 %), asumsinya usia 10-14 tahun masih berada di bangku SD kelas 5 – kelas 3 SLTP. Ini patut untuk mendapatkan perhatian baik dari orang tua, guru maupun para tokoh agama, mengingat pada usia tersebut belum pantas mereka mengenal pacaran. Sebab semakin dini mengenal pacaran bisa berdampak pada semakin banyak menikah pada usia muda. Maka tak ada salahnya bila pendidikan tentang seksualitas diberikan sejak dini dan jangan menganggap pendidikan tentang seksualitas merupakan hal tabu yang belum pantas disampaikan pada anak SD dan SLTP. Perlu diingat bila pendidikan seksualitas disampaikan sesuai dengan umurnya, maka besar kemungkinan dalam perjalannya mereka akan menghindari seks bebas. Hal ini sejalan dengan para peneliti internasional yang telah mempelajari efek dari pendidikan kesehatan reproduksi terhadap sejumlah murid sebagai responden. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mereka yang menerima pendidikan kespro menjadi lebih bertanggung jawab terhadap perilaku seksual dan mampu menunda memulai hubungan seksual.

Harapannya para remaja memulai pacaran pada usia diatas 20 tahun, namun berdasarkan penelitian baik pada remaja laki-laki maupun perempuan tidak ada yang memulai pacaran pada usia tersebut. Bila banyak remaja yang memulai pacaran pada usia diatas 20 tahun maka akan berkontribusi besar pada program genre (generasi berencana) dan keluarga berencana sebab semakin matang memulai pacaran maka semakin banyak menikah pada usia ideal dan nantinya akan mengurangi jumlah kelahiran selain itu pandangan secara medis usia ideal bagi perempuan untuk menikah adalah pada usia diatas 20 tahun sebab pada usia tersebut organ-organ perempuan sudah siap untuk dibuahi sedangkan untuk laki-laki idelanya pada usia 23 tahun membangun rumah tangga. Usia 23 tahun pada laki-laki biasanya mereka sudah menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi dan sudah memiliki pendapatan.

2. 2. Perilaku Remaja Dalam Berpacaran

Maksud dari perilaku remaja dalam berpacaran disini yakni kegiatan yang dilakukan remaja bila sedang berpacaran. Maka dari itu perilaku remaja dalam berpacaran sangat patut untuk dilakukan kajian agar nantinya bisa menjadi bahan masukan bagi para orang tua, tenaga pendidikan bahkan tokoh agama serta pemerintah. Sebab perilaku yang dilakukan akan mengarahkan pada pernyataan patut atau tidak patut serta upaya apa harusnya dilakukan agar para remaja tidak melakukan hal-hal yang belum masuk pada kategori patut ataupun tidak patut.

Menurut hasil survei RPJMN Remaja tahun 2013, perilaku remaja dalam berpacaran dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : BKKBN:Puslitbang KB, KR. 2013

Perilaku remaja dalam berpacaran pada penelitian ini meliputi pegangan tangan, cium bibir dan meraba/merangsang bagian tubuh tertentu. Berdasarkan hasil penelitian terlihat persentase perilaku remaja baik laki-laki maupun perempuan yang pernah punya pacar dalam berpacaran melakukan pegangan tangan sebanyak 95 % sudah melakukan aktifitas tersebut, persentase ini diatas angka nasional yang hanya 87 % sementara pada perilaku ciuman bibir sebanyak 63 % responden menjawab telah melakukan lagi-lagi persentase ini jauh melonjak diatas angka nasional yang hanya 28 % terakhir pada kegiatan meraba/merangsang bagian tubuh kembali persentasenya diatas persentase nasional yakni 24 % Sulut dan nasional 8 %.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan secara umum perilaku pacaran remaja di Provinsi Sulawesi Utara diatas angka nasional. Hal ini mengindikasikan kondisi awas yang patut diwaspadai mengingat perilaku pacaran remaja di Sulut sudah menjurus ke hal-hal yang belum sepatutnya mereka

lakukan. Kalau hal ini dibiarkan maka besar kemungkinan kondisi fatal akan banyak terjadi mulai dari hamil di luar nikah, menikah di usia muda bahkan bisa juga tingkat aborsi akan tinggi. Oleh karena itu para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat perlu memberikan pemahaman dan mencari strategi pendekatan yang efektif sebagai langkah preventif menyelamatkan generasi muda. Tak kalah pentingnya adalah bentengi para generasi muda kita dengan nilai-nilai agama yang kuat dari sejak dini agar mereka dapat menghadapi perubahan-perubahan zaman namun tetap mampu menyelaraskan dengan ajaran agamanya. Sementara disisi lain pemerintah sebagai pelindung masyarakat perlu membuat kebijakan dan program yang mengena bagi mereka, mengingat mereka adalah asset bangsa yang akan mengisi negara ini dengan karya dan inovasi-inovasi.

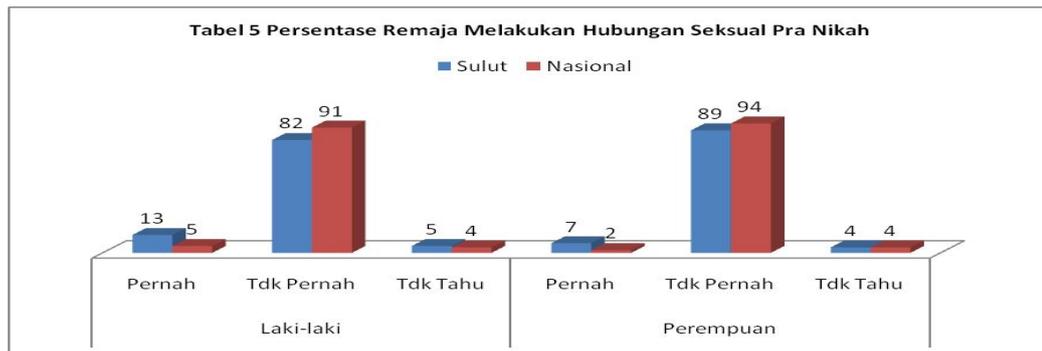
Program yang mengena bagi remaja melalui PIK R/M harus kembali digalakkan, sebagai wadah bagi generasi muda untuk menimba ilmu dan wawasan tentang pergaulan aman, bebas dari triad KRR dan terpenting menjadi generasi berencana. Mengutip pendapat Prof. Hasbullah Trabani, beliau menyatakan bahwa menanam atau investasi pada manusia sangatlah berbeda dan harus ada perlakuan special, kalau ingin hasil untuk setahun tanamlah sayuran, bila ingin panen sepuluh tahun tanamlah pohon buah namun bila ingin panen 100 tahun ++ tanamlah manusia. Hal ini sangatlah jelas bila mengajarkan pengetahuan, sikap serta perilaku yang baik akan terus menunai kemanfaatannya.

Pertanyaan sekarang apakah ada kolerasi antara kemajuan teknologi dengan perilaku seksual remaja saat ini, mengingat semakin meluasnya media menjadikan mereka mudah mendapatkan akses ke tontonan ataupun hal-hal yang belum sepatutnya disisi lain pengawasan lemah menjadi peluang empuk bagi tumbuhnya perilaku negatif remaja dalam hal seksual. Pelan namun pasti media memiliki andil bagi kesemuanya, tengok saja dulu ketika remaja kita belum disuguhkan kecanggihan teknologi mereka akan sibuk dengan tugas belajar kelompok, berkumpul dalam suatu wadah karang taruna dsb. Nyatanya saat ini para remaja lebih suka mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan membuka di google semua bisa dijawab dengan cepat. Hal ini disatu sisi memperluas

pengetahuan namun disisi lain meningkatkan hal-hal yang negatif bila tidak diawasi.

2.3. Hubungan Seksual Sebelum Menikah

Hubungan seksual yang dimaksud dalam RPJMN Remaja tentunya hubungan layaknya dilakukan oleh suami istri sah. Maka dari itu para remaja



dalam konteks ini seharusnya belum melakukan mengingat mereka belum sah baik secara agama dan legalitas secara hukum. Namun faktanya remaja di Sulawesi Utara sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Sumber : BKKBN:Puslitbang KB, KR. 2013

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa sebanyak 13 % remaja laki-laki di Sulawesi Utara telah melakukan hubungan seksual sementara untuk remaja putri ada sebanyak 7 % persentase ini diatas persentase nasional, dimana persentase nasional pada remaja laki-laki hanya 5 % sementara perempuan hanya 2 %. Ini kenyataan yang patut membuat kita miris ternyata di Sulawesi Utara berpeluang bebas pada tumbuhnya seks bebas. Meskipun bila membandingkan dengan persentase remaja tidak pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah persentasenya remaja yang pernah melakukan hubungan seksual kecil. Namun tetap saja patut diwaspadai, agar tidak semakin meluas.

Pada usia remaja mereka berada dalam masa peralihan, sehingga mudah terbawa arus. Remaja dan teman-temannya dapat saling mempengaruhi apalagi dalam hal mencoba sesuatu yang baru dan ingin diketahui. Maka dari itu remaja harus membentengi diri dengan bekal agama yang kuat dan siap untuk mengatakan tidak pada hubungan seksual sebelum menikah, remaja harus dapat

menahan diri pada saat berpacaran. Hindari sikap-sikap yang menimbulkan rangsangan seperti menyentuh bagian tubuh yang mudah terangsang. Dan perlu ditanamkan cara mengungkapkan kasih sayang bukan dengan cara melakukan hubungan seksual. Ingat remaja adalah generasi penerus bangsa dan aset berharga.

Tak kalah pentingnya juga bagi para orang tua, arahkan para remaja pada hal-hal yang positif dengan diikuti kursus-kursus yang bisa menggali bakat dan potensi remaja. Serta pengawasan dan komunikasi yang berkualitas patut untuk dilakukan. Orang tua hendaknya juga menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya karena sarana sosialisai yang pertama dan utama berada pada keluarga.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Jumlah responden pada RPJMN Remaja sebanyak 206, dari jumlah tersebut sebanyak 167 responden pernah/sedang mempunyai pacar dengan perincian laki-laki sebanyak 88 orang dan perempuan sebanyak 79 orang. Berdasarkan umur secara umum mereka berumur 15-19 tahun dengan pendidikan yang ditamatkan kebanyakan pada level tamat SLTA. Pada umur memulai berpacaran secara umum memulai pacaran pada umur 15-17 tahun.
2. Persentase perilaku remaja dalam berpacaran di Provinsi Sulawesi Utara memiliki persentase diatas persentase nasional. Dengan perincian sebagai berikut sebanyak 95 % remaja baik laki-laki maupun perempuan yang pernah punya pacar pernah melakukan pegangan tangan , sementara pada perilaku ciuman bibir sebanyak 63 % sudah melakukannya terakhir pada kegiatan meraba/merangsang bagian tubuh ada 24 %.
3. Persentase remaja yang pernah melakukan hubungan seksual di provinsi Sulawesi Utara baik laki-laki maupun perempuan persentasenya diatas persentase nasional. Hasil penelitian dapat dilihat sebanyak 13 % remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual sementara untuk remaja putri ada sebanyak 7 %.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran antara lain :

1. BKKBN sebagai instansi yang konsen pada remaja tentunya harus semakin menggiatkan program yang mengena bagi remaja, kehadiran PIK R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa) disekolah-sekolah maupun perguruan tinggi harus semakin digiatkan dan semakin meningkatkan akses informasi dan kualiatys pelayanan bagi para remaja.
2. Perlu adanya sosialisasi Genre (Generasi Berencana) dengan sistem jempot bola yaitu pihak BKKBN dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan turun ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan Guru-guru BK (Bimbingan Konseling) yang sudah dilatih oleh BKKBN untuk membekali remaja mengenai pengetahuan perilaku seksual pra nikah tujuannnya agar para remaja tidak setuju pada seksual pra nikah sehingga para remaja tidak melakukannya.
3. Keberadaan tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat yang selama ini telah di latih program KKB dan PK di BKKBN harus diberdayakan mengingat mereka merupakan tokoh-tokoh yang dekat dengan masyarakat (remaja dan orang tua)

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti Ngurah. 2002. *Statistika : Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Benokraitis, Nijole V. 1996. *Marriage and Families 2nd edition : Changes, Choices and Constraint*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Bowman, H.A & Spanier, G.B.1978. *Modern Marriage* (8th ed). New York: McGraw Hill Co.
- Degenova & Rice. 2005. *Intimate Relationships, Marriages & Families. 6thed*. New York: McGraw-Hill.
- Duvall, E.M. ; Miller, B.C. 1985. *Marriage and family development* (6th ed). New York: Harper & Row, Publishers
- Definisi Pacaran.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23381/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2014
- Edi, Setia. 2012. Kiat Kembangkan Infrastruktur Lini Lapangan. *Jurnal Keluarga*, Desember 2012 : 19.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Toha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada.

Sarwono, Solita. 1993. *Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*. Yogyakarta : Gajdah Mada University Press.

Sri Rumini dan Sundari. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta : PT Rineke Cipta.

Papalia, D. E., S. W., & Feldman, R.D. 2004. *Human development*. (9th ed). USA: Mc Graw-Hill Companies, Inc.

Pendidikan Kespro Picu Remaja Lebih Bebas. 2012. *Jurnal keluarga*, Mei 2012 :18